Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia

DOKUMEN DESAIN PROGRAM KOMPONEN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERKOTAAN

PRAKARSA AIR MINUM DAN SANITASI - INDONESIA

INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE

Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia

DOKUMEN DESAIN PROGRAM KOMPONEN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERKOTAAN

PRAKARSA AIR MINUM DAN SANITASI - INDONESIA

INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE

April 2010

INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE

Dokumen ini dipublikasikan oleh Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang merupakan proyek yang didanai oleh Pemerintah Australia. IndII dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas investasi di bidang infrastruktur.

Padangan yang disajikan pada laporan ini tidak mewakili sepenuhnya pandangan dari Australian Indonesian Partnership atau Pemerintah Australia. Silakan menyampaikan komentar dan pertanyaan kepada Direktur IndII, tel. +62 (21) 230-6063, fax +62 (21) 3190-2994. Website: www.indii.co.id.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini disusun oleh Jim Coucouvinis yang terlibat dalam Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) sebagai bagian dari kegiatan untuk menfinalisasi disain detil komponen hibah air minum dan air limbah dalam rangka Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI), yang dibiayai oleh Pemerintah Australia (AusAID).

Kami ucapakan banyak Terima kasih atas bantuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Kesalahan fakta atau interpretasi sepenuhnya menjadi tanggung-jawab penulis.

Jim Coucouvinis,

Jakarta, Juli 2010

© IndII 2010

Semua kekayaan intelektual asli yang terkadung dalam dokumen ini adalah milik Indonesian Infrastructure Initiative (IndII). Kekayaan intelektual tersebut dapat dipergunakan secara bebas tanpa referensi oleh para konsultan dan mitra IndII dalam menyusun dokumen, merencanakan dan mendisain laporan; dan juga dapat dipergunakan secara bebas oleh lembaga maupun organisasi lain, dengan menyebutkan sumbernya.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang direferensikan di dalam publikasi ini telah dicantumkan dengan benar. Namun, IndII akan menerima setiap saran untuk perbaikan yang diperlukan, atau tentang sumber dokumen dan / atau data terkini.

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN ISTILAH ..... **VI**

RINGKASAN ..... **VIII**

BAB 1: KOMPONEN AIR MINUM **1**

1.1 ANALISIS SEKTOR AIR MINUM DAN ISU STRATEGIS **1**

1.1.1 Analisis Masalah dan Isu dalam Sektor Air Minum 1
1.1.2 Kebijakan dan Strategi Sektor Air Minum Pemerintah Indonesia 2
1.1.3 Prakarsa Pemerintah Indonesia untuk pembangunan air minum perkotaan 3
1.1.4 Pelajaran yang Berguna 4
1.1.5 Donor lain pendukung air minum perkotaan 5
1.1.6 Hibah Air Minum dalam program WSS AusAID Indonesia 5
1.1.7 Penyesuaian dengan rekomendasi ODE 6
1.1.8 Keterkaitan dengan IndII dan program AusAID lainnya 6
1.1.9 Keterlibatan mitra-mitra pembangunan 7
1.1.10 Dasar pemikiran program WSI Indonesia yang diusulkan 11

1.2 DESKRIPSI PROGRAM PERCONTOHAN HIBAH AIR MINUM WSI **11**

1.2.1 Tujuan Hibah Air Minum 12
1.2.2 Penanganan tujuan program WSI 12
1.2.3 Disain Hibah Air Minum 14
1.2.4 Pemilihan Pemerintah Daerah dan PDAM Peserta 15
1.2.5 Identifikasi Daerah Sasaran Hibah 15
1.2.6 Penetapan Sasaran Kemiskinan 16
1.2.7 Survei Dasar dan Verifikasi 16
1.2.8 Kesadaran akan Kemiskinan dan Isu Jender 17
1.2.9 Perkiraan Biaya Hibah Air Minum 17
1.2.10 Pembayaran Hibah Air Minum ke Pemerintah Daerah 19

1.3 PENGATURAN PELAKSANAAN **19**

1.3.1 Pelaksanaan Hibah Air Minum 19
1.3.2 Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi 20
1.3.3 Jadual Pelaksanaan Program 20
1.3.4 Persiapan pelaksanaan program Hibah Air Minum 22
1.3.5 Penyaluran Dana Hibah Air Minum 22

BAB 2: KOMPONEN SANITASI **23**

2.1 ANALISIS SEKTOR SANITASI DAN ISU STRATEGIS **23**

2.1.1 Analisis masalah dan isu dalam sektor sanitasi 24
2.1.2 Kebijakan dan strategi sanitasi perkotaan Pemerintah Indonesia 24
2.1.3 Prakarsa sanitasi perkotan Pemerintah Indonesia 25
2.1.4 Pelajaran yang ditarik dari proyek-proyek sanitasi di Indonesia 26
2.1.5 Donor lain pendukung air limbah 26
2.1.6 Penyesuaian dengan rekomendasi ODE mengenai bantuan WSS di Indonesia 28
2.1.7 Keterlibatan bersama dengan mitra pembangunan 28
2.1.8 Dasar pemikiran pencatuman kedalam WSI 30
2.1.9 Menangani tujuan WSI 30

2.2 DESKRIPSI KOMPONEN SANITASI WSI **31**

2.2.1 Sistim Saluran Air Limbah Banjarmasin 31
2.2.2 Sistim Saluran Air Limbah Surakarta 32

2.2.3 WSI Assistance for Sanitation and Sewerage Expansion 33
2.2.4 Tujuan Komponen Sanitasi WSI 33
2.2.5 Disain Hibah Sanitasi WSI 34
2.2.6 Penetapan Sasaran Rumah Tangga Miskin 35
2.2.7 Perkiraan Biaya Hibah Sanitasi 35
2.2.8 Dampak Lingkungan dan Sosial 36
2.2.9 Survei Dasar dan Verifikasi 36
2.2.10 Kesadaran Kemiskinan dan Isu Jender 36
2.2.11 Pengaturan Pelaksanaan 36
2.2.12 Pelaksanaan Komponen Sanitasi 37
2.2.13 Bantuan Teknis Pendukung Kegiatan 37
2.2.14 Jadual Pelaksanaan 38

2.3 RENCANA INVESTASI AIR LIMBAH – LIMA KOTA 38

2.3.1 Pemilihan Pemerintah Daerah 39
2.3.2 Mendapatkan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan 39
2.3.3 Isu Pro Warga Miskin dan Jender 39
2.3.4 Pelaksanaan oleh WSI/IndII 39
2.3.5 Hubungan Sanitasi WSI dengan Program AusAID Lainnya 40
2.3.6 Jadual Pelaksanaan 40

BAB 3: PENGATURAN PENGELOLAAN YANG DIUSULKAN 42

3.1 PERUBAHAN "SUBSIDIARY AGREEMENT" (*SUBSIDIARY*) FASILITAS INDII 42

3.1.1 Pengaturan organisasi pelaksanaan WSI 42

3.2 PERUBAHAN "SUBSIDIARY AGREEMENT" 43

3.3 PERAN DAN TANGGUNG-JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN 43

3.4 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO – KOMPONEN AIR MINUM 44

3.4.1 Keterlambatan dalam memulai Hibah Air Minum 44
3.4.2 Kapasitas yang terbatas untuk pra-pembiayaan 45
3.4.3 Waktu yang terbatas untuk melaksanakan Hibah Air Minum dalam satu tahun 45
3.4.4 Risiko Kepercayaan (*Fiduciary*) 46

3.5 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO – KOMPONEN SANITASI 46

3.5.1 Dimulainya Sambungan 46
3.5.2 Keterlambatan Konstruksi 47
3.5.3 Dana yang Tersedia 47
3.5.4 Risiko Kepercayaan (*Fiduciary*) 47

BAB 4: KETENTUAN PERLINDUNGAN 50

4.1 PRIORITAS KEBIJAKAN AUSAID 50

4.1.1 Kemiskinan 50
4.1.2 Kesetaraan Jender 50
4.1.3 Pendekatan pro warga cacat 51
4.1.4 Pendekatan lingkungan 51

BAB 5: KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI (MEF) 53

5.1 IKHTISAR MEF WSI 53

5.2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI YANG DIUSULKAN UNTUK M&E WSI 53

5.2.1 Gambaran Umum dan Definisi 53
5.2.2 Metodologi 53
5.2.3 Pelaporan Primer 54

5.2.4 Pemantauan Sekunder 54
5.2.5 Pelaporan dan Studi Dampak 55
5.2.6 Pengaturan Pengelolaan M&E WSI 56

LAMPIRAN 57

LAMPIRAN 1: PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH 57

LAMPIRAN 2: FORMAT PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH 57

LAMPIRAN 3: DAFTAR PEMERINTAH DAERAH YANG TERPILIH UNTUK HIBAH AIR MINUM 58

LAMPIRAN 4: PENYALURAN DANA HIBAH AIR MINUM 59

LAMPIRAN 5: GAMBARAN UMUM KERANGKA ACUAN UNTUK SURVEI DASAR 61

LAMPIRAN 6: KERANGKA ACUAN UNTUK KAJIAN PARUH-PROYEK DAN PENYELESAIAN KEGIATAN ... 63

LAMPIRAN 7: KERANGKA KINERJA WSI 67

LAMPIRAN 8 : JADWAL PELAKSANAAN HIBAH AIR MINUM 69

LAMPIRAN 9: JADUAL PELAKSANAAN HIBAH SANITASI 70

LAMPIRAN 10: ANALISIS SALURAN AIR LIMBAH BANJARMASIN 71

LAMPIRAN 11: ANALISIS SISTIM SALURAN AIR LIMBAH SURAKARTA OLEH INDII 75

LAMPIRAN 12: LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN AIR LIMBAH TINGKAT KOTA OLEH INDII 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keterlibatan bersama para Mitra Pembangunan 8
Tabel 2: Struktur Bantuan AusAID untuk WSS – Indonesia 9
Tabel 3: Hibah Air Minum WSI dalam kaitannya dengan program mitra 11
Tabel 4: Tujuan program WSI 13
Tabel 5: Urutan Kegiatan 14
Tabel 6: Perkiraan biaya perluasan sistim PDAM untuk 5.000 sambungan 18
Tabel 7: Biaya WSI 18
Tabel 8: Jadual Pelaksanaan 20
Tabel 9: Akses ke sanitasi 23
Tabel 10: Kegiatan donor lain 27
Tabel 11: Keterlibatan bersama mitra pembangunan – komponen sanitasi WSI 29
Tabel 12: Sanitasi WSI dalam kaitannya dengan program mitra 30
Tabel 13 Perkiraan Biaya Hibah Sanitasi 35
Tabel 14: Jadual pelaksanaan yang diusulkan 41
Tabel 15: Tanggung-Jawab Pemangku Kepentingan 43
Tabel 16: Matrik Risiko 47
Tabel 17: Kerangka indikatif – pemantauan 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Pelaksanaan WSI 42
Gambar 2: Aliran dana dan proses pelaksanaan Hibah Air Minum 60

SINGKATAN DAN ISTILAH

ADB	Bank Pembangunan Asia
AIPD	Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (*Australia Indonesia Partnership for Decentralisation*)
AIPEG	Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata-Kelola Ekonomi (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*)
AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AusAID	Lembaga Australia untuk Pembangunan Internasional (*Australian Agency for International Development*)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	Bank Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPP SPAM	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
CDD	Pembangunan atas Dorongan Masyarakat
CLTS	Sanitasi Total atas Prakarsa Masyarakat
CSS	Strategi Sanitasi Kota (*City Sanitation Strategy*)
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DED	Disain Teknis Rinci (*Detailed Engineering Design*)
DJCK	Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum)
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	Kementerian Pekerjaan Umum
DSID	Ringkasan Disain dan Dokumen Pelaksanaan (*Design Summary and Implementation Document*)
FY	Tahun Anggaran
GoA	Pemerintah Australia
Pemerintah Indonesia	Pemerintah Indonesia
GTZ	Kerjasama Teknis Jerman (*German Technical Cooperation*)
HC	Sambungan Rumah (*Household Connection*)
IA	Badan Pelaksana
IDPL	Pinjaman Program Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development Program Loan*)
IEG	Hibah Peningkatan Infrastruktur (*Infrastructure Enhancement Grant*s)
IFGI	Infrastruktur untuk Prakarsa Pertumbuhan (*Infrastructure for Growth Initiative*)
IFI	Lembaga Keuangan Internasiona (*International Financial Institutions*)
IndII	Insiatif Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Initiative*)
JICA	Lembaga Kerjasama Internasional Jepang (*Japan International Cooperation Agency*)
KDP	Program Pembangunan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*)
LG	Pemerintah Daerah (*Local Government*)
MDB	Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*)
MDG	Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*)
Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
MoHA	Kementerian Dalam Negeri

MSMHP	Proyek Kesehatan dan Pengelolaan Sanitasi Metropolitan (*Metropolitan Sanitation Management and Health Project*)
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPPH	Naskah Perjanjian Penerusan Hibah
OBA	Bantuan Berbasis Luaran (*Output-Based Aid*)
ODE	Kantor Efektivitas Pembangunan (*Office of Development Effectiveness*)
PAMSIMAS	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDPAL	Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah
PEMDA	Pemerintah Daerah
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
PEMKOT	Pemerintah Kota
PERPAMSI	Persatuan Pengembang Air Minum Seluruh Indonesia
PERPRES	Peraturan Presiden
PIM	Petunjuk Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Manual*)
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyakat
RKL	Rencana Kelola Lingkungan
RKT	Rencana Kelola Tahunan
RNE	Kedutaan Kerajaan Belanda (*Royal Netherlands Embassy*)
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SANIMAS	Program Sanitasi Berbasis Masyarakat
SDG	Kelompok Pembangunan Berkelanjutan
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA	Tahun Anggaran
T/A	Bantuan Teknis (*Technical Asistance*)
TOR	Kerangka Acuan
UPP	Program Kemiskinan Perkotaan (*Urban Poverty Program*)
USAID	Lembaga Bantuan Amerika Serikat (*United States of America Aid Agency*)
UWSSWG	Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Perkotaan (*Urban Water Supply and Sanitation Working Group*)
UWSSP	Proyek Air Minum dan Sanitasi Perkotaan (*Urban Water Supply and Sanitation Project*)
WASAP	Program Air Minum dan Sanitasi (*Water and Sanitation Program*)
WASPOLA	Perencanaan Tindakan dan Kebijakan Air Minum dan Sanitasi (*Sanitation Policy and Action Planning*)
WATSAN	Air Minum dan Sanitasi (*Water and Sanitation*)
WB	Bank Dunia (*World Bank*)
WSI	Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (*Water and Sanitation Initiative*)
WSLIC	Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Kecil (*Water and Sanitation for Low Income Communities*)
WSS	Sektor Air Minum dan Sanitasi (*Water and Sanitation Sector*)
WWTP	Instalasi Pengolahan Air Limbah (*Waste Water Treatment Plant*)

RINGKASAN

PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI) diumumkan Pemerintah Australia (GoA) pada bulan Desember 2008. Tujuan utamanya adalah untuk:

- Memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi, terutama bagi warga miskin, perempuan dan anak sekolah;
- Membuat layanan air minum dan sanitasi menjadi lebih berkelanjutan, dengan jalan mendukung reformasi sektor dan meningkatan kapasitas;
- Meningkatkan mutu kesehatan dan kehidupan rentan masyarakat miskin, dengan jalan meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku hidup bersih dan memperluas akses mereka ke layanan air minum dan sanitasi; dan
- Meningkatkan efektivitas bantuan dan melengkapi program lain.

Dana yang disetujui untuk WSI adalah AUD 300 juta, dimana AUD 100 juta akan disalurkan melalui lembaga pembangunan multi-lateral dan AUD 200 juta untuk program negara bilateral. Pelaksanaan program bilateral diharapkan selesai di akhir Juni 2011. Indonesia akan menjadi salah satu negara penerima manfaat, dan peningkatan alokasi senilai AUD 60,5 juta telah dikonfirmasikan pada bulan Juni 2009.

Komponen yang nantinya akan masuk kedalam program WSI Indonesia senilai AUD 35 juta telah diidentifikasi oleh misi AusAID pada bulan Juni-Juli 2008. *Dokumen Konsep* yang dihasilkan disetujui pada bulan Desember 2008, dan konsultan disain dipekerjakan pada bulan Februari 2009. Keputusan selanjutnya untuk banyak meningkatkan alokasi dana, dibarengi dengan pembangunan yang cepat dan penting di sektor WATSAN Indonesia, memerlukan banyak perubahan dalam program ini, dan revisi dokumen konsep dipertimbangkan dalam Pertemuan Kajian pada tanggal 26 Agustus 2009. Dokumen ini mengusulkan empat komponen inti:

- **Air Minum & Sanitasi Perdesaan (AUD 22,5 juta)**; yang akan dilaksanakan melalui perluasan program PAMSIMAS yang disepakati, dengan alokasi indikatif senilai AUD 12 juta untuk air minum, AUD 8 juta untuk sanitasi dan AUD 2,5 juta untuk sosialisasi pogram;
- **Air Minum Perkotaan (AUD 20 juta)**; untuk melakukan percontohan pelaksanaan skema hibah insentif berbasis luaran yang baru (Hibah Air Minum), yang ditujukan untuk menumbuh-kembangkan investasi pemerintah daerah secara berkelanjutan untuk memperluas sambungan air minum perpipaan;
- **Sanitasi Perkotaan (AUD 10 juta)**; untuk menyusun rencana investasi sistem air limbah di empat kota besar, dan memperluas layanan sistem air limbah dan sanitasi di Banjarmasin dan Surakarta; dan
- **Komponen Masyarakat Madani (AUD 5 juta)**.

Selain itu, AUD 3 juta disediakan untuk pengelolaan program, pemantauan & evaluasi, serta jasa verifikasi.

Pertemuan Kajian menyetujui konsep yang diubah ini dan antara lain mengintruksikan bahwa disain harus disusun untuk komponen air minum dan sanitasi perkotaan. Disain yang diusulkan yang membahas dua tujuan WSI yang pertama, dijelaskan dalam dokumen ini. Tanggapan terhadap instruksi dari hasil Rapat Pembahasan (*Review Meeting)* yang berkaitan dengan komponen lain dan keseluruhan pengelolaan program WSI Indonesia, disajikan pada dokumen terpisah.

AIR MINUM PERKOTAAN

Kontek

Laju pertumbuhan perkotaan Indonesia selama dekade terakhir jauh lebih cepat daripada investasi yang masih terbatas dalam infrastruktur air minum, dan populasi perkotaan yang dilayani oleh jaringan air perpipaan telah menurun dari 39 persen menjadi 31 persen selama sepuluh tahun terakhir. Rendahnya tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk desentralisasi yang cepat dengan kecepatan transfer fungsi yang lebih tinggi daripada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kondisi keuangan PDAM yang memburuk sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997.

Pemerintah Indonesia sekarang menetapkan prioritas tinggi untuk memobilisasi investasi baru yang dapat dilihat dari usaha reformasi kebijakan secara terpadu baru-baru ini. Reformasi kebijakan ini meliputi:

- **Pedoman penetapan tarif yang semakin baik** untuk PDAM (*melalui Peraturan Pemerintah 16/2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 23/2006*): Pedoman ini dirancang agar PDAM bisa memulihkan biaya dan mendapatkan pengembalian aset, sambil memberikan tarif seumur-hidup yang terjangkau bagi rumah-tangga miskin (melalui subsidi silang antar pelanggan);
- **Restrukturisasi hutang** PDAM yang menunggak pelunasan pinjamannya ke Kementerian Keuangan (*melalui Keputusan Menteri Keuangan PMK 12/2008*): Kebijakan ini memberikan penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan bunga dan denda, dengan catatan adanya peningkatan dalam tata-kelola tertentu dan perbaikan lainnya (termasuk pelaksanaan pedoman tarif);
- **Skema Jaminan Pinjaman dari Pemerintah Pusat dan Subsidi Bunga** untuk membantu PDAM agar bisa mendapatkan pinjaman komersial (melalui Peraturan Presiden 29/2009): skema ini disediakan bagi PDAM yang masuk peringkat "sehat" atau yang disetujui untuk ikut serta dalam program restrukturisasi hutang;
- **Skema Hibah Insentif (*"Hibah Air Minum"*)** untuk sambungan air perpipaan baru (akan dilaksanakan dengan memakai mekanisme hibah baru seperti yang ditetapkan dalam *Peraturan Menteri Keuangan PMK 168 dan 169/2008*; skema ini menyediakan hibah jumlah bulat (*lumpsum*) bagi pemerintah daerah untuk sambungan air perpipaan baru yang telah diverifikasi dan mengalirkan air.

Kecepatan pengembangan strategi ini sangat mengesankan. Skema restrukturisasi hutang ditetapkan tidak lama sebelum Misi Identifikasi WSI di bulan Oktober 2008, sementara untuk *Hibah Air Minum* dan skema Jaminan Pinjaman dari Pemerintah Pusat dan Subsidi Bunga dirancang segera setelah Dokumen Konsep WSI Indonesia disetujui dan bersamaan dengan penyusunan Ringkasan Disain dan Dokumen Pelaksanaan (DSID).

Komponen Air Minum Perkotaan WSI

Komponen air minum perkotaan WSI dirancang dengan tiga tujuan, yakni: memperluas cakupan layanan air perpipaan di kawasan perkotaan (terutama kawasan dengan jumlah rumah-tangga

berpenghasilan rendah yang tinggi), meningkatkan keberlanjutan PDAM[1] dan membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan percontohan program Hibah Air Minum yang lebih besar dan luas. Disainnya berbasis luaran dan mencantumkan ciri-ciri yang dikembangkan oleh dua proyek percontohan skala kecil, yang sekarang dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya dengan bantuan *Global Partnership for Output-Based Aid* (GPOBA).

Untuk tahun 2010 dana WSI akan membantu menyediakan 70.000 sambungan baru yang melayani sekitar 420.000 jiwa di sejumlah 25 kota. Nilai hibah adalah Rp. 2 juta per sambungan untuk 1.000 sambungan pertama dan setelah itu Rp. 3 juta hingga batas pagu sambungan per pemerintah daerah (Kota/Kabupaten). Untuk program 3.000 sambungan, nilai agregat hibah diharapkan mencakup sekitar 45 persen dari biaya investasi secara bertahap. Dana WSI akan disalurkan melalui pemerintah daerah (PEMDA) dengan memakai prosedur penyaluran hibah yang baru dikembangkan (PMK 168 dan 169), dan dana WSI akan menjadi pelopor penyaluran dana donor untuk program berbasis-luaran.

Partisipasi dalam program yang didanai WSI bersifat sukarela dan terbuka bagi pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menambahkan penyertaan modal kedalam PDAM mereka, dengan nilai paling tidak sama dengan hibah yang mereka terima. Agar memenuhi syarat, PDAM harus: (a) memiliki kapasitas pengolahan air yang memadai untuk mendukung perluasan basis pelanggan yang diusulkan; (b) memenuhi persyaratan utama untuk mendapatkan Jaminan Pinjaman dari Pemerintah Pusat dan Subsidi Bunga; dan (c) memiliki program perluasan distribusi yang logis dan siap untuk dilaksanakan pada tahun 2010. Selain itu, PEMDA/PDAM harus bisa menunjukkan kapasitas dan niat mereka untuk membiayai lebih dahulu program mereka melalui APBD. Proses penyaringan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui konsultasi dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan AusAID. Mulai akhir Oktober 2009, 15 dari 25 pemerintah daerah yang diundang sudah menegaskan niat mereka untuk ikut serta.

Seperti disebutkan diatas, komponen *Hibah Air Minum* WSI dikembangkan sejalan dan berkontribusi bagi pengembangan strategi sektor air minum Pemerintah Indonesia, dan komponen ini mendapatkan dukungan kuat dan aktif dari BAPPENAS (Badan Perencaanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Waktu pelaksanaan komponen ini bersamaan dengan fase tahunan pertama dari program Hibah yang lebih luas yang diharapkan antara lain untuk mewujudkan sekitar 1,5 juta sambungan air baru selama periode 2010-2014. Dana untuk komponen ini diharapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari donor.

SANITASI PERKOTAAN

Kontek

Bentuk sanitasi yang dominan di kota-kota Indonesia adalah sanitasi yang disediakan sendiri dengan memakai septik tank. Septik tank ini sering dibangun seadanya, sehingga menyebabkan rembesan ke aquifer dan sumur dangkal untuk pasokan air minum rumah-tangga. Pembuangan endapan tinja

[1] Keberlanjutan PDAM tergantung pada campuran tipe pelanggan agar subsidi silang bisa dilakukan untuk tarif seumur-hidup bagi warga miskin. Pendanaan WSI akan membantu program sambungan rumah di kampung dengan jumlah rumah-tangga berpenghasilan kecil yang diatas rata-rata.

cenderung jarang dilakukan, dan kontraktor swasta umumnya membuang endapan tinja di sungai atau saluran air bukannya di fasilitas pembuangan yang benar.

Proyek peningkatan kampung Indonesia, yang dilaksanakan di tahun 1980an dan awal 1990an, menyertakan pembangunan fasilitas toilet dan cuci komunal (MCK), walau ini tidak begitu berhasil. Baru-baru ini Pemerintah Indonesia melalui program SANIMAS menyediakan dana pendamping kecil untuk membantu pembangunan septik tank komunal dan sambungan ke sekelompok kecil rumah-tangga.

Memang penggunaan septik tank swadaya ini tidak tepat untuk kawasan perkotaan yang berpenduduk padat – terutama kawasan yang kekurangan akses ke pasokan air perpipaan – tapi pembangunan sistem saluran air limbah membutuhkan biaya yang mahal dan kesediaan rumah-tangga untuk membayar diperkirakan akan rendah. Ini membuat Pemerintah Indonesia memprioritaskan penyediaan layanan air minum, dan sanitasi melalui pipa menerima hanya sedikit perhatian atau dana. Hanya ada 11 kota yang saat ini memiliki beberapa bentuk sistem saluran air limbah, yang melayani hanya satu persen dari total populasi perkotaan di Indonesia.

Namun demikian, pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap sanitasi sekarang berubah dengan cepat, seperti terbukti dalam *Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah* yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada bulan Desember 2008. Dokumen ini menangani lima tema utama: (i) meningkatkan akses ke sanitasi bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, dengan prioritas rumah-tangga berpenghasilan kecil; (ii) meningkatkan peran masyarakat dan sektor swasta dalam penyediaan layanan sanitasi; (iii) mengembangkan kerangka peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan sanitasi; dan (v) meningkatkan investasi dan mengembangkan sumber dana alternatif untuk infrastruktur air limbah.

Sanitation Road Map (Arah Kedepan Sanitasi) yang disusun bersama oleh BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, menyajikan usulan-usulan untuk fase pelaksanaan awal yang mencakup periode 2010-2014. Sasaran-sasaran utama untuk kawasan perkotaan meliputi peningkatan jumlah kota dengan saluran air limbah dari 11 menjadi 15; peningkatan cakupan sistem air limbah perkotaan, hingga mencapai 20% dari populasi tiap kota; dan keterlibatan 330 kota/kabupaten dalam penyusunan strategi sanitasi dengan rencana pembiayaan yang wajar. Program SANIMAS akan berlanjut dengan kelompok masyarakat yang nanti tersambung ke saluran air limbah (dan septik tank mereka tidak dipakai lagi).

Kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia untuk sanitasi *perkotaan* telah berkembang dengan cepat selama periode pengembangan dan perancangan komponen WSI Indonesia. Namun, tantangan pelaksanaan untuk pekerjaan sanitasi perkotaan lebih besar karena terbatasnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Komponen Sanitasi Perkotaan

Komponen sanitasi perkotaan dirancang untuk membantu pelaksanaan *Sanitation Road Map* Pemerintah Indonesia dan terdiri dari dua komponen:

- bantuan untuk penyambungan hingga 10.000 rumah-tangga ke fasilitas sanitasi yang semakin baik di Banjarmasin dan Surakarta, dengan memakai kombinasi saluran air limbah dan saanitasi setempat (*on-site*); dan
- penyusunan rencana investasi saluran air limbah untuk empat kota, hingga mencapai standar yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan dari MDB.

SAMBUNGAN SALURAN AIR LIMBAH

Selama penyusunan Ringkasan Disain dan Dokumen Pelaksanaan, Pemerintah Indonesia dan Australia meminta agar banyak bagian alokasi WSI Indonesia dipakai untuk membiayai peningkatan akses ke sanitasi yang lebih baik bagi rumah-tangga perkotaan. Setelah keputusan dibuat pada bulan Juni 2009 untuk banyak meningkatkan nilai alokasi Indonesia, maka tim disain diminta untuk mempelajari cara-cara membantu perluasan sistem saluran limbah yang ada selama 2010. Satu-satunya opsi yang layak yang ditentukan adalah memakai skema hibah berbasis luaran, yang secara umum mirip dengan skema yang dikembangkan untuk pasokan air minum perkotaan.

Tujuannya disini adalah agar WSI menyediakan hibah jumlah bulat (lump sum) untuk sambungan baru yang berfungsi ke sistem saluran air limbah, dan untuk warga misksin ke sistem setempat komunal baru yang dirancang untuk nantinya akan dilayani melalui perluasan sistim air limbah. Dalam waktu perancangan yang sempit masih bisa ditentukan dua calon kota yakni Banjarmasin dan Surakarta yang selain sudah memiliki sistim saluran air limbah juga telah memiliki rencana yang jelas dan kesiapan pembiayaan (APBD) untuk perluasan sistim pada 2010.

Disain tersebut memperkirakan bahwa WSI akan membantu penyediaan layanan saluran air limbah / sanitasi bagi sekitar 10.000 rumah-tangga, dari kebutuhan yang ditetapkan sebesar 8.600 sambungan saluran air limbah baru dan 3.000 sambungan ke sistim setempat komunal yang baru. Secara keseluruhan ini diharapkan bisa melayani sekitar 60.000 jiwa. Nilai hibah adalah Rp. 5 juta per sambungan saluran air limbah baru dan Rp. 2 juta per sambungan ke sistem komunal setempat, dengan batas maksimal hibah yang telah ditentukan untuk tiap kota. Pendanaan WSI diharapkan mencakup sekitar 60% dari jumlah biaya investasi secara bertahap. Untuk skema *Hibah Air Minum* ini dana WSI akan disalurkan ke pemerintah daerah dengan menggunakan prosedur PMK 168/169.

Ciri-ciri sistim saluran limbah yang ada dan pengaturan kelembagaan pengelolaannya, berbeda-beda di setiap kota. Sistim **Banjarmasin** dikembangkan antara tahun 1995 dan 2002 sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Perkotaan Kalimantan yang didanai Bank Dunia. Sistim ini sekarang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PDPAL) yang merupakan salah satu dari hanya dua yang ada di Indonesia (satunya di Jakarta). Jaringan saluran air limbah ini sekarang melayani kawasan pusat dan utara kota Banjarmasin dengan total jumlah sambungan sekitar 3.200 sambungan. Kapasitas instalasi pengolahan cukup tinggi dan kota ini memiliki rencana untuk menambahkan 15.000 sambungan lagi. Kajian pendahuluan yang dilaksanakan oleh konsultan dengan dana IndII, menunjukkan bahwa pembangunan total 3.000 sambungan mungkin dilakukan dalam tahun 2010.

Sistim saluran air limbah **Surakarta** dibangun selama 1995-2001, sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Perkotaan Semarang Surakarta yang didanai oleh Bank Dunia. Sistim saluran air limbah ini terdiri dari dua instalasi pengolahan air limbah dengan kapasitas 84 l/detik, pipa saluran induk sepanjang 12 km dengan diameter 600 mm hingga 1300 mm, dan saluran lateral dan sekunder sepanjang 70 km dengan diamater 300 mm hingga 500 mm. Sistem saluran ini melayani 10.800 sambungan. PDAM bertanggung-jawab atas operasi sistim saluran air limbah ini dengan membentuk bagian air limbah yang dikepalai oleh direktur teknis.

Pengaturan pelaksanaan yang diusulkan sama dengan yang sudah dikembangkan untuk skema *Hibah Air Minum*. Walau jangka waktu untuk menyelesaikan ini sangat sempit mengingat peraturan yang ada mengenai pengelolaan anggaran dan penyaluran hibah, namun Pemerintah Indonesia dalam hal ini Ditjen Cipta Karya telah menunjukkan komitmen kuat mereka untuk solusi pendanaan sehingga memungkinkan dana WSI dapat dimanfaatkan dalam batas waktu pencairannya.

RENCANA INVESTASI SALURAN AIR LIMBAH

Penyusunan rencana investasi saluran air limbah untuk empat kota prioritas akan membantu pelaksanaan *Sanitation Road Map* dan perlu segera dimulai jika ingin mencapai target. Kementerian Pekerjaan Umum sudah memulai menyaring 17 calon kota dengan bantuan teknis yang dibiayai oleh Fasilitas IndII. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, pemerintah daerah akan diminta menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan rencana dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya ditanggung bersama pemerintah pusat dan menunjukkan bahwa komitmen ini telah disetujui oleh DPRD.

Dalam menyusun rencana investasi sanitasi, perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan tercakupnya kawasan berpenduduk miskin. Untuk tujuan ini, analisis kemiskinan akan dilakukan dan kemungkinan hambatan untuk partisipasi rumah-tangga miskin akan diidentifikasi. Opsi untuk menyediakan layanan secara setempat dan lalu sambungan ke jaringan saluran air limbah, akan dikembangkan jika dianggap tepat. Temuan dari analisis ini dan rencana yang dihasilkan akan disebarluaskan dalam lokakarya bersama pemerintah daerah.

PERLINDUNGAN

Kedua komponen tersebut akan membawa dampak positif pada lingkungan, kesehatan dan kesetaraan jender. Selama pelaksanaan, langkah-langkah yang tepat akan dilakukan untuk mengoptimalkan dampak ini termasuk melalui proses sosialisasi dan konsultasi. Usaha juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa warga dengan cacat fisik juga merasakan manfaat dari investasi ini, walau diakui bahwa peran pemerintah dalam menyediakan sambungan tidak termasuk sambungan di dalam rumah.

PENGATURAN PENGELOLAAN

Alokasi WSI Indonesia akan disalurkan ke Pemerintah Indonesia melalui perubahan terhadap *Subsiadiary Arrangement* Fasilitas IndII yang ada. Draft perubahan yang diperlukan sudah disusun bersama Kementerian Keuangan dan diperkirakan perubahan ini akan diselesaikan dengan cepat setelah disain komponen air minum dan sanitasi perkotaan disetujui.

Diharapkan bahwa pelaksanaan kedua komponen ini akan diawasi oleh tim IndII yang diperluas dengan tambahan komponen WSI. Sebagai satu-satunya opsi yang layak mengingat adanya hambatan waktu yang sempit, pilihan opsi ini akan memastikan sinergi dengan kegiatan WATSAN lainnya yang didanai oleh IndII, termasuk untuk memperkecil biaya tetap *(overhead costs)*. Perluasan lingkup layanan IndII diperbolehkan menurut kontrak yang ada, dan rincian perubahan kontrak yang diusulkan sekarang sedang dibahas. Ciri utama usulan ini adalah pembentukkan jabatan baru yakni “Direktur Teknis – Air Minum & Sanitasi” untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang didanai IndII dan WSI.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rencana pemantauan dan evaluasi sudah disusun untuk dua komponen tersebut dan dicantumkan dalam Bab 5.

RISIKO

Risiko utama yang diidentifikasi berkaitan dengan pelaksanaan program *Hibah Air Minum dan Sanitasi* adalah jangka waktunya yang sangat ketat. Untuk mengatasi masalah ini maka diperlukan interaksi intensif terus-menerus dengan Pemerintah Indonesia selama penyusunan program dan pengawasan kemajuan secara cermat. Risiko pengelolaan kepercayaan (*fiduciary*) akan ditangani dengan mempekerjakan perusahaan yang berkualifikasi dan mempunyai nama baik untuk melaksanakan survei dasar dan verifikasi sambungan baru.

BAB 1: KOMPONEN AIR MINUM

1.1 ANALISIS SEKTOR AIR MINUM DAN ISU STRATEGIS

Pemerintah pusat dan pemda di Indonesia telah meningkatkan penyediaan layanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi. Namun demikian masih banyak yang perlu dilakukan. Kecepatan desentralisasi dan otonomi daerah telah melebihi kapasitas pemerintah daerah (PEMDA) dalam menyediakan layanan-layanan dasar ini. Tingkat sistim air perpipaan di pusat-pusat perkotaan telah menurun secara ajeg sejak 1998 karena berkurangnya investasi. Sebelum desentralisasi, sebagian besar investasi berasal dari program pemerintah pusat. Sejak itu, investasi di sektor air minum perkotaan sebagian besar terbatas pada kapasitas pendanaan yang dimiliki oleh PDAM dengan kapasitas yang terlalu rendah untuk menghasilkan dana investasi. Ditambah dengan tata-kelola yang buruk dan kelembagaan yang tidak efisien, lebih dari separuh PDAM menanggung hutang dan tidak cukup layak untuk mengakses pinjaman dari bank komersial. Jadi investasi PDAM tidak mengimbangi kecepatan urbanisasi atau kebutuhan untuk mempertahankan dan mengganti asset yang rusak. Pada saat yang sama, studi menunjukkan bahwa PEMDA mengabaikan kebutuhan investasi di sektor air minum.

Karena itu. kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini untuk sektor air minum perkotaan adalah untuk meningkatkan investasi oleh PEMDA; meningkatkan kelayakan kredit PDAM; dan membantu PDAM dalam mengakses pinjaman komersial untuk perluasan layanan. Secara lebih umum, mewujudkan tata-kelola yang baik dalam sektor air minum perkotaan diharapkan akan membawa pada peningkatan berkelanjutan dalam cakupan layanan – terutama untuk warga miskin, sesuai dengan *Millenium Development Goals*. Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI) telah sejalan dangan sasaran-sasaran milenium ini.

1.1.1 Analisis Masalah dan Isu dalam Sektor Air Minum

Mengalihkan tanggung-jawab atas penyediaan layanan air minum perkotaan ke PEMDA, telah membuahkan hasil yang campur-aduk. Di sektor air minum, ada pandangan yang luas di lingkungan PEMDA bahwa PDAM bertanggungjawab atas layanan air minum dan harus menyediakan air minum tanpa bantuan PEMDA. Walaupun menurut peraturan perundang-undangan tanggungjawab atas penyediaan air minum berada di PEMDA tapi sebagian besar PEMDA membentuk PDAM sebagai perusahaan yang sepenuhnya milik daerah. Aset infrastruktur air minum yang sebelumnya dimiliki oleh PEMDA dan pemerintah pusat, dalam beberapa kasus telah dialihkan secara tidak lengkap ke PDAM, walaupun PDAM memakai aset ini.

Masalah menjadi semakin rumit karena tumpang-tindih tanggungjawab atas penyediaan layanan air minum. Walau PEMDA telah membentuk PDAM, tapi mereka tetap menyediakan beberapa layanan air minum. PEMDA menyediakan layanan ini langsung melalui anggarannya sendiri, yang biasanya dimobilisasi melalui Dinas Pekerjaan Umum. Garis pemisah antara bidang operasi PDAM dan bidang operasi PEMDA berbeda-beda, tapi umumnya terkait dengan ibukota kecamatan (IKK). Contohnya, beberapa pemerintah kabupaten meminta PDAM bertanggung-jawab sepenuhnya atas pasokan air minum untuk IKK; beberapa PEMDA lain membangun aset fisik IKK dan menyerahkannya ke PDAM untuk dioperasikan; dan beberapa lainnya lagi membangun dan mengoperasikan layanan air minum IKK melalui dinas-dinas pekerjaan umum mereka.

Kerumitan lain ditambahkan karena keterlibatan terus-menerus dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum. DJCK memiliki anggaran tahunan untuk membantu

pembangunan sistem air minum IKK, yang diserahkan ke PEMDA dan PEMDA selanjutnya mengoperasikan sistem ini melalui dinas pekerjaan umum atau meminta PDAM untuk mengoperasikannya. Dalam kerangka kerja seperti ini, PEMDA melihat tanggung-jawab mereka atas penyediaan layanan air minum sebagai beban keuangan dan administratif. Tidak mengejutkan bahwa sebagian besar PEMDA menganggap bahwa tanggung-jawab mereka atas pasokan air minum terbatas hanya pada pembayaran langsung dana DAK melalui PU (Dinas Pekerjaan Umum), dan bahwa hanya PDAM bertanggung-jawab atas penyediaan layanan air minum perkotaan. Namun hampir semua PDAM kekurangan modal dan sebagian besar beroperasi dengan tarif yang jauh dibawah tingkat pemulihan biaya penuh – situasi yang membuat mereka sulit untuk melakukan perbaikan walau peraturan terkini memperbolehkan mereka untuk menetapkan tarif pada tingkat pemulihan biaya. Akibatnya, investasi di aset air minum baru tidak seimbang dengan depresiasi aset yang ada. Dengan meningkatnya populasi perkotaan, persentase warga perkotaan yang mendapatkan layanan air perpipaan malah cenderung menurun dari 39 menjadi 31 persen selama dekade terakhir.

1.1.2 Kebijakan dan Strategi Sektor Air Minum Pemerintah Indonesia

Kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia untuk sektor air minum dikenal karena penekanan yang berjangkauan luas pada pengurangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui serangkaian program dibawah payung PNPM (Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan), atau Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PPMN). Sebagian besar program PNPM adalah "menu terbuka," yakni pemilihan intervensi ditentukan oleh masyarakat yang ikut serta. PAMSIMAS merupakan program khusus air minum dan sanitasi, dan menjadi program utama Pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan air minum dan sanitasi perkotaan bagi warga miskin. Program PAMSIMAS dan semua program PNPM memakai model pembangunan atas dorongan masyarakat sebagai skema utama pelaksanaan program. Program Hibah Air Minum yang dibahas secara rinci dalam bab berikutnya, ditetapkan menjadi mekanisme utama Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses ke air perpipaan bagi rumah-tangga miskin perkotaan.

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah, pertama di tahun 1999[2] dan kemudian di tahun 2004,[3] telah mengubah wajah pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Peraturan-peraturan ini membebankan tanggung-jawab atas pembangunan sektor ini ke PEMDA, dan secara khusus tidak menyebutkan pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggung-jawab untuk menggagas dan melaksanakan proyek air minum dan sanitasi. Dengan kondisi di atas dan dengan adanya tunggakan pinjaman banyak PDAM dan pemerintah daerah setelah krisis moneter, membuat Pemerintah Indonesia menetapkan jalur reformasi sektor yang konsisten dalam tujuan dan dengan kemajuan yang tetap stabil. Tanggung-jawab dan peran dari beberapa tingkat pemerintahan yang berbeda dijelaskan dalam *Peraturan Pemerintah 38/2007.*[4] Walaupun fokus awal reformasi oleh Pemerintah ini diletakkan pada sektor air minum, tapi perhatian akhir-akhir ini diberikan pada sanitasi.

---

2 UU 22/1999 mengenai Otonomi Daerah dan UU 25/1999 mengenai Keseimbangan Fiskal.

3 UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang masing-masing sebagai revisi UU 22 dan UU 25.

4 Peraturan Pemerintah mengenai Pembagian Tanggung-jawab antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, PP38/2007.

1.1.3 Prakarsa Pemerintah Indonesia untuk pembangunan air minum perkotaan

Saat Pemerintah Indonesia melaksanakan prakarsa yang dirancang untuk meningkatkan akses ke air perpipaan, usaha ini menghadapi kondisi yang berbeda-beda di tingkat lokal. Di satu sisi, beberapa kota besar dan menengah dengan PEMDA yang lebih efektif dan PDAM yang dikelola dengan baik dan terbukti mampu memperbanyak jumlah pelanggan dan menutup seluruh biaya operasionalnya. Di sisi lain, banyak PDAM kabupaten kecil tidak memiliki prospek untuk beroperasi dengan basis komersial yang berkelanjutan. Diantara dua sisi ekstrim ini ada lebih dari 330 PDAM yang menunggak pelunasan hutangnya ke Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia, juga penerusan pinjaman dari Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan), sehingga tidak layak untuk memperoleh pinjaman baru.

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa strategi yang berbeda diperlukan untuk berbagai kelompok PDAM, dan fokus awalnya diletakkan pada PDAM yang sudah "sehat"[5] atau berpotensi menjadi sehat dengan cepat karena reformasi manajemen dan restrukturisasi keuangan. Strategi yang dipakai untuk kelompok ini diarahkan untuk menumbuh-kembangkan keberlanjutan PDAM dan mempercepat penyediaan sambungan air baru, yang terdiri dari empat unsur:

(a) Reformasi tarif
(b) Restrukturisasi hutang
(c) Jaminan pinjaman dan subsidi bunga dari pemerintah pusat
(d) Skema hibah berbasis-luaran (*Hibah Air Minum*)

(a) ***Reformasi tarif: Peraturan*** Menteri Dalam Negeri 23/2006 berusaha menetapkan pasokan air minum perkotaan dengan dasar bahwa PEMDA harus menentukan tarif PDAM pada tingkat yang memungkinkan pemulihan biaya penuh. Subsidi-silang akan memungkinkan warga miskin untuk membayar tarif yang rendah guna memenuhi kebutuhan dasarnya.

(b) ***Restrukturisasi hutang:*** Ini adalah program sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 120/2008, yang memberikan penghapusan seluruh atau sebagian tunggakan akumulatif PDAM dan denda karena pelunasan terlambat. Sebagai imbalannya PEMDA dan PDAM harus mematuhi sejumlah ketentuan tata-kelola yang meliputi penerapan tarif pemulihan biaya penuh; penunjukan direksi PDAM berdasarkan tes uji kepatutan (fit and proper test); memiliki rencana usaha jangka menengah; dukungan dari PEMDA untuk restrukturisasi hutang; dan hak Kementerian Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) jika ketentuan-ketentuan ini tidak dipatuhi.

(c) ***Skema jaminan pinjaman dan subsidi bunga dari Pemerintah:*** Skema ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 29 yang ditanda-tangani pada 23 Juni 2009, dan dirancang untuk membantu PDAM agar bisa mendapatkan pinjaman komersial dari bank dengan persyaratan yang terjangkau. Skema ini terbuka bagi PDAM yang menunjukkan kinerja "sehat," atau yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk ikut serta dalam program restrukturisasi hutang. Pemerintah pusat akan menjamin 70% nilai pinjaman yang harus dibayar, dan PEMDA hanya perlu membayar 30% jika jaminan diminta kembali. Selain itu, pemerintah pusat akan memberikan subsidi untuk pembayaran bunga hingga 5% agar suku pinjaman tetap dibawah suku bunga BI (bank Indonesia).

---

[5] Sistem peringkat PDAM ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, berdasarkan indek indikator finansial, operasional dan administratif. Kategorinya adalah Sehat, Kurang Sehat dan Sakit.

(d) Skema hibah berbasis luaran (Hibah Air Minum):

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan baru pada bulan November 2008 [PMK 168/169] untuk menyalurkan hibah ke pemerintah daerah. Ini adalah prakarsa penting yang memungkinkan dana dari pusat dan dana dari luar negeri dapat dialihkan ke pemerintah daerah sebagai hibah. Pemerintah Indonesia memakai saluran baru ini untuk membagi transfer senilai Rp. 7,1 triliun sebagai hibah selama 2010 untuk pemerintah daerah. Dari angka ini, sekitar Rp. 270 miliar (AUD 33 juta) diharapkan diberikan sebagai Hibah Air Minum untuk 35 pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia merancang program Hibah Air Minum untuk memberi penghargaan pada pemerintah daerah yang bersedia melakukan investasi sarana air minum. Prakarsa Hibah Air Minum dirancang atas rekomendasi Program Sanitasi dan Air Minum Bank Dunia (WASAP)6. Tujuan program ini adalah untuk membuka cadangan finansial pemerintah daerah dan mengarahkan sebagian darinya ke penyertaan modal PDAM. Disain berbasis luaran ini disusun berdasarkan kisah sukses dalam program serupa di lingkungan intersional, serta program insentif yang akhir-akhir ini dilaksanakan di Indonesia (Surabaya Output-Based Aid [OBA]7, PAMJaya OBA8, dan program insentif Kementerian PU untuk PDAM9). Skema ini secara resmi diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada bulan April 2009, dan mendapatkan dukungan kuat dari Kementerian Keuangan.

Prakarsa ini berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan, mengingat banyak pemerintah daerah yang terlibat. Pada saat misi identifikasi WSI dilakukan, strategi restrukturisasi hutang ditetapkan, tetapi pertimbangan belum diberikan untuk membuat PDAM bisa mengakses pinjaman komersial atau merancang skema berbasis luaran untuk mempercepat sambungan baru. Memang ada beberapa rincian yang masih harus disempurnakan, tetapi Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan DJCK telah menegaskan dukungan kuat mereka pada AusAID untuk segera memulai pelaksanaan percontohan skema Hibah Air Minum dan mengembangkan pengaturan tata-kelola yang wajar.

1.1.4 Pelajaran yang Berguna

Komponen WSI yang diusulkan bisa memanfaatkan pengalaman sebelumnya, dengan tetap berpegangan pada tujuan Hibah Air Minum untuk memicu investasi PEMDA dalam utilitas air minum sebagai jalur jangka panjang yang harus diikuti demi keberlanjutan pertumbuhan sektor air minum.

Sukses akan dikaitkan dengan komitmen Pemerintah Indonesia: Kecepatan dan komitmen Pemerintah Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mewujudkan prakarsa air minum ini, mencerminkan kuatnya komitmen dan rasa memiliki dalam agenda reformasi.

Pelaksanaan harus mengikuti mekanisme pengadaan dari Pemerintah Indonesia: Hibah Air Minum dirancang untuk dilaksanakan melalui sistem dan lembaga Pemerintah Indonesia. Ini akan

---

6 WASAP is funded by a Dutch Trust fund implemented through the World Bank.

7 Perluasan Layanan Air Minum ke Kawasan Berpenghasilan Kecil di Jakarta, *World Bank Output Based Aid* [P096686]

8 Perluasan Pasokan Air Minum ke Keluarga Miskin Perkotaan di Surabaya, *World Bank Output Based Aid* [P105590]

9 Bantuan PU untuk 19 PDAM sehat selama TA 2009 untuk pelaksanaan sambungan baru.

memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program. Penggunan prosedur AusAID akan dibatasi hanya untuk beberapa komponen inti bantuan teknis dalam penyusunan dan pengelolaan program.

Rasa memiliki pemerintah daerah sangatlah penting artinya: Kegagalan utama dalam pembangunan di masa lalu adalah kurangnya keterlibatan dan rasa memiliki PEMDA pada sektor air minum, akibat investasi yang tidak menentu dalam PDAM oleh pemerintah pusat. Investasi selama 25 tahun terakhir dianggap PEMDA sebagai aset pemerintah pusat, dan banyak yang tercatat sebagai milik DJCK.

Hibah Air Minum menangani keberlanjutan sektor air minum, dengan jalan memberikan penghargaan ke PEMDA yang menumbuh-kembangkan kinerja PDAM yang bagus. Hibah Air Minum mengalir langsung ke PEMDA untuk investasi di PDAM dan bukan ke PDAM, tidak seperti yang terjadi sebelum otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memobilisasi penyertaan modal dari PEMDA ke PDAM, dengan demikian meningkatkan penyediaan layanan PDAM dan yang terpenting peningkatan ini berlanjut karena aanya rasa memiliki PEMDA yang semakin besar dan pengelolaan yang semakin bagus. Hibah ini akan menjadi pelopor aplikasi skala besar dari bantuan berbasis luaran untuk layanan pemerintah daerah. Jika nanti percontohan aplikasi berbasis luaran berdasarkan mekanisme penerusan hibah dari Kementerian Keuangan ini terbukti efektif, maka skema ini kemungkinan besar bisa diterapkan di sektor-sektor lain.[10]

1.1.5 Donor lain pendukung air minum perkotaan

Program donor yang membantu restrukturisasi hutang PDAM meliputi: Bank Dunia WASAP(B) dan WASAP(I). WASAP(B) membantu 14 PDAM dalam penyusunan rencana perusahaan untuk investasi jangka menengah, sebagai kriteria untuk ikut serta dalam program restrukturisasi hutang dan mendapatkan bantuan dalam mengakses skema jaminan kredit untuk pinjaman komersial. Program ini akan diperluas ke 20 PDAM lainnya dalam tahap berikutnya. WASAP(I) adalah studi pembiayaan sektor air minum yang mengidentifikasi hambatan pembiayaan di sektor air minum tingkat PEMDA melalui kerjasama dengan sembilan PEMDA.

Program Sanitasi Lingkungan ESP-USAID bekerjasama dengan 18 PDAM dalam hal membantu kemampuan teknis dan finansial untuk pembangunan berkelanjutan. PDAM-PDAM ini akan menjadi bagian dari proses untuk aplikasi hibah AusAID dan skema Hibah Air Minum Pemerintah Indonesia.

Konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan mitra-mitra pembangunan selama penyusunan WSI, menegaskan minat Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang besar pada model pendanaan Hibah Air Minum. Sejumlah opsi untuk hibah pendamping dan pinjaman bank pembangunan multi-lateral telah dipertimbangkan sebagai pendanaan kedepan untuk mendukung target investasi Pemerintah Indonesia.

1.1.6 Hibah Air Minum dalam program WSS AusAID Indonesia

AusAID memiliki sejarah yang panjang dalam sektor air minum dan sanitasi Indonesia, yang selama tahun-tahun terakhir tefokus pada WSLIC/PAMSIMAS (Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahap ke-Tiga)/dan WASPOLA (Perencanaan Tindakan dan Perumusan Kebijakan Sektor Sanitasi dan Air

[10] Kementerian Keuangan juga mulai menerapkan mekanisme penerusan hibah untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Minum). Kedua prakarsa ini terfokus sebagian besar pada bantuan di tingkat desa yakni program yang dikelola masyarakat, mengingat antara lain karena kurang tegasnya pihak Pemerintah Indonesia dalam menangani hambatan-hambatan investasi yang sangat diperlukan dalam sektor air minum dan sanitasi.

WASPOLA sekarang memasuki perluasan tahap ketiga dan beroperasi sebagai fasilitas. Fokus program ini adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan sistim air minum dan penyehatan lingkungan. Fasilitas WASPOLA dan PAMSIMAS didanai melalui Infrastruktur untuk Prakarsa Pertumbuhan (IFGI) yang menyediakan dana senilai AUD 10 juta untuk masing-masing program dan akan disalurkan melalui dana "Trust Fund" (*Trust Funds)* masing-masing di Bank Dunia.

IndII yang didanai melalui IFGI dan membantu usaha Pemerintah Indonesia untuk menangani isu air minum dan sanitasi dan khususnya menumbuh-kembangkan pembangunan secara berkelanjutan dalam penyediaan layanan yang dikelola secara kelembagaan di kota-kota besar. Fasilitas IndII dimulai di pertengahan 2008 dan Dewan Pengelolanya (termasuk Penasehat Menteri AusAID dan Asisten Menteri Pemerintah Indonesia sebagai anggota) memerintahkan bahwa WSS akan menjadi salah satu sektor prioritas.[11]

Pihak pengelola IndII dibebani tugas mengelola dana rekening pra-pembayaran (*imprest account*) dengan nilai total sekitar AUD 40 juta; diperkirakan sebagian besar dana ini akan diarahkan untuk layanan bantuan teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan investasi jangka pendek; pengembangan kebijakan, strategi dan rencana tindak untuk investasi jangka panjang; serta identifikasi dan penyusunan jaringan air minum dan kegiatan sanitasi untuk kemungkinan bantuan AusAID di masa depan.

1.1.7 Penyesuaian dengan rekomendasi ODE

Tujuan program WSI erat kaitannya dengan temuan dan rekomendasi dalam laporan evaluasi pihak ODE *(Office of Development Effectiveness)* mengenai bantuan air minum dan sanitasi di Indonesia,[12] yakni perluasan bantuan layanan air minum dan sanitasi bagi warga miskin perdesaaan melalui PAMSIMAS, serta perhatian yang lebih besar pada air minum perkotaan melalui bantuan program Hibah Air Minum untuk PDAM dan PEMDA. Hibah Air Minum menandai masuknya AusAID untuk pertama kalinya dalam bantuan air minum perkotaan sejak desentralisasi dan otonomi daerah. Komponen utama WSI menjadi inti fokus Pemerintah Indonesia untuk reformasi sektor air minum dan sanitasi, dan hal ini sesuai dengan rekomendasi ODE untuk sektor ini.

1.1.8 Keterkaitan dengan IndII dan program AusAID lainnya

Penempatan WSI sebagai komponen tambahan IndII (*lihat Bab 3: Usulan Pengaturan Pengelolaan*) memberikan fleksibilitas yang semakin baik dan saling dukungan antara WSI dan program IndII terkait lainnya. Sebagian besar kegiatan IndII berkaitan dengan air mnum dan sanitasi, seperti

---

[11] Sektor lainnya adalah transportasi.

[12] *Independent Evaluation of Australian Aid to Water Supply and Sanitation Services, Indonesia Draft Country Working Paper*, Maret 2009.

program 20 PDAM yang langsung membantu pelaksanaan Hibah Air Minum di masa depan. Yang lain kurang begitu berkaitan tapi bisa menambah kekuatan pelaksanaan dan efektivitas program. Penempatan seperti ini juga memungkinkan "pembatasan" program WSI hanya pada tiga komponen dengan luaran yang ditentukan dengan jelas, sambil menyediakan bantuan teknis melalui program kegiatan IndII.

WSI ditempatkan dengan baik agar bisa terkait dengan dan membantu AIPD (Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi) dan AIPEG (Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi), yang nantinya akan didanai oleh AusAID melalui kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada desentralisasi penyediaan air minum, penguatan penyediaan layanan PEMDA (di sektor air minum dan sanitasi), restrukturisasi hutang (PDAM), dan secara umum peningkatan tata-kelola sektor air minum dan sanitasi di tingkat pusat dan daerah. Desentralisasi keuangan publik adalah bidang lain yang bersinergi dengan kedua prakarsa AusAID ini, terutama dalam percontohan hibah sebagai mekanisme baru transfer antar-pemerintah untuk membiayai infrastruktur.

1.1.9 Keterlibatan mitra-mitra pembangunan

Sejumlah besar pemangku kepentingan dan Kementerian Pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan dan BAPPENAS telah dilibatkan dalam Hibah Air Minum. Keterlibatan ini diawali dengan disain Hibah Air Minum oleh Pemerintah Indonesia melalui program WASAP(I) yang mengarahkan penggunaan Hibah Air Minum sebagai alasan utama untuk dimulainya proyek IDPL Bank Dunia tahap ketiga. Dialog intensif yang diprakarsai DJCK, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Dunia telah menghasilkan usulan DJCK untuk pelaksanaan program Hibah Air Minum secara nasional. Selanjutnya, AusAID berada pada posisi terdepan dalam mengadakan dialog dengan mitra-mitra Pemerintah Indonesia, hal ini karena jadual waktu WSI dilakukan lebih awal daripada program mitra Pemerintah Indonesia yang akan dimulai di akhir 2010.

Keterlibatan dan dialog terkait Hibah Air Minum dan program donor lain yang berhubungan dengan Hibah ini, telah menghasilkan pembentukan forum donor sektor air minum perkotaan yang diketuai oleh DJCK, dengan nama *Kelompok Kerja Sektor Air Minum Perkotaan (UWSSWG)*. Anggotanya meliputi donor multilateral dan bilateral, kelompok masyarakat madani, LSM dan lembaga keuangan lokal/internasional yang terlibat dalam sektor air minum perkotaan Indonesia.

Para wakil dari PU, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPP-SPAM, Bank Dunia, ADB, Kedutaan Kerajaan Belanda, JICA, AusAID, USAID dan PERPAMSI merupakan anggota awal kelompok kerja ini.

Keterlibatan yang lebih resmi bersama Pemerintah Indonesia telah ditetapkan melalui Dewan IndII segera setelah WSI ditetapkan sebagai program yang akan dilaksanakan oleh IndII melalui *Subsidiary Arrangement* awal. Tabel dibawah menjelaskan tingkat keterlibatan para mitra pembangunan.

Tabel 1: Keterlibatan bersama para Mitra Pembangunan

Hibah Air Minum	
Kemitraan	
Mitra Utama	Pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan, DJCK, Bappenas)
Pemangku Kepentingan	PEMDA terpilih (+/-25)
Pelaksanaan	
Metode Pelaksanaan	Penerusan hibah melalui anggaran Pemerintah Indonesia
Tipe Perjanjian	Revisi *Subsidiary Arrangement* Pemerintah Indonesia dan Australia
Dokumen Disain	Dokumen disain dari konsultan WASAP(I) Bank Dunia
Sumberdaya	
Sumberdaya Tambahan	Konsultan Verifikasi
	Konsultan M&E
Jangka Waktu	
Q2 *Apr- Jun 2009*	Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan, BAPPENAS, DJCK) menyelesaikan disain program Hibah Air Minum, 200 PEMDA dan 1,500,000 sambungan. AusAID bekerjasama terkait disain. AusAID mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk komponen AusAID (-/+ 20 PEMDA dan sambungan hingga 60.000 unit). Dokumen pendukung untuk Bank Dunia disusun dengan mencantumkan isu perlindungan.
	Kajian Analisis oleh Rekan Kerja (Appraisal Peer Review)
Q3 *Jul - Nov 2009*	IndII menyelesaikan usulan termasuk petunjuk pelaksanaan proyek (PIM), dan menyiapkan rekening pra-pembayaran BI (*BI Imprest Account*).
Q4 *Des 2009*	Program Hibah Air Minum perkotaan dimulai

Tabel 2: Struktur Bantuan AusAID untuk WSS – Indonesia

	Infrastruktur untuk Prakarsa Pertumbuhan	Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI)	Dana PAMSIMAS (Trust Funds)	Dana Fasilitas WASPOLA (Trust Funds)
	IndII (AUD 40 M)[13]	AUD 60.5 M[14]	AUD 10 M	AUD 10 M
SEKTOR	Komponen WATSAN Pengelolaan Kelembagaan Air Minum Perkotaan dan Sanitasi	• Prakarsa dasar untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi :	Bantuan teknis dan komponen Hibah Desa (AUD 10 juta)	
Air Minum Perkotaan	• Bantuan Teknis untuk PDAM, terkait rencana usaha dan kelayakan kredit	**Hibah Air Minum AUD 20 juta** • Sekitar 70.000 rumah-tangga menerima layanan air perpipaan, 420.000 jiwa penerima manfaat.		Bantuan pengembangan prakarsa kebijakan WSS Pemerintah Indonesia
Air Minum Perdesaan		**Sektor perdesaan melalui Hibah Desa PAMSIMAS AUD 12 juta** • Sekitar 400 desa dengan populasi 500.000 jiwa, menerima layanan air minum.	Bantuan pengembangan WSS untuk 100 desa 150.000 jiwa menerima layanan air minum	Bantuan pelaksanaan kebijakan WSS WASPOLA yang dikembangkan dalam WASPOLA 1&2.
Sanitasi Perkotaan	**Saluran Air Limbah AUD 3 juta** • Peningkatan Kapasitas MSMHP	**Saluran Air Limbah Perkotaan AUD 10 juta** • Bantuan teknis untuk rencana induk saluran air limbah di 4 kota, AUD 5 juta • Hibah Investasi Kecil (saluran air limbah dan perluasan, AUD 5 juta – yang menghasilkan 10.000 sambungan baru untuk 60.000 jiwa penerima manfaat)		Mengkaitkan kebijakan WSS perdesaan dengan pelaksanaan PAMSIMAS

[13] $40 juta untuk semua infrastruktur
[14] Termasuk $ 3 juta untuk biaya pengelolaan, survei dll.

	Infrastruktur untuk Prakarsa Pertumbuhan	Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI)	Dana PAMSIMAS (Trust Funds)	Dana Fasilitas WASPOLA (Trust Funds)
	IndII (AUD 40 M)[13]	AUD 60.5 M[14]	AUD 10 M	AUD 10 M
Sanitasi Perdesaan		**Hibah Desa PAMSIMAS AUD 8 juta** Sekitar 400 desa dengan populasi 800.000 jiwa, merasakan manfaat penyehatan lingkungan **PAMSIMAS AUD 2,5 juta** untuk membantu sosialisasi program di desa-desa baru	Bantuan pengembangan WSS untuk 100 desa 200.000 jiwa menerima layanan air minum Wahana untuk meningkatkan kebijakan WSS Perdesaan dalam WASPOLA	
WSS Perkotaan dan Perdesaan		**Komponen Masyarakat Madani AUD 5 juta**		

1.1.10 Dasar pemikiran program WSI Indonesia yang diusulkan

Hibah Air Minum merupakan salah satu inti dari prakarsa Pemerintah Indonesia untuk reformasi sektor air minum yang ditujukan untuk memperkuat komitmen PEMDA untuk layanan air minum yang semakin baik. Empat prakarsa yang terdiri dari reformasi tarif, restrukturisasi hutang, peningkatan kelayakan kredit PDAM dan Hibah Air Minum, bekerja secara sinergis untuk mewujudkan investasi lebih besar dan berkelanjutan dalam utilitas air minum. Hibah Air Minum ditujukan untuk meningkatkan tata-kelola sektor air minum di tingkat pemerintah daerah dengan jalan menunjukkan kepada pemerintah daerah, imbalan dari investasi yang besar dalam utilitas air minum. Seperti disebutkan sebelumnya, DJCK mengusulkan program Hibah Air Minum dengan sasaran 200 pemerintah daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan 1.500.000 juta sambungan baru melalui stimulus hibah senilai Rp. 3 triliun selama periode 2010 – 2014. Hibah Air Minum WSI yang diusulkan akan melakukan percontohan program dengan dana senilai AUD 20 juta dan sasaran 70.000 sambungan baru di 25 PEMDA hingga Juni 2011.

Program ini akan membantu pencapaian tujuan dan sasaran MDG, termasuk: peningkatan kesejahteraan warga miskin, peningkatan kesetaraan jender, pengurangan angka kematian balita dan peningkatan kesahatan ibu, perluasan cakupan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanggulangan penyakit akibat air kotor, dan peningkatan lingkungan.

Tabel 3: Hibah Air Minum WSI dalam kaitannya dengan program mitra

Hibah Air Minum WSI	Program Pemerintah Indonesia dan Mitra Pembangunan	Penjelasan
Hibah insentif air minum (**Hibah Air Minum**) untuk sekitar 25 PEMDA terpilih, yang menghasilkan 70.000 sambungan baru	Program hibah insentif air minum nasional untuk sekitar 150-200 PEMDA	Hibah berbasis luaran untuk perluasan penyediaan layanan air minum, yang ditentukan oleh peningkatan jumlah sambungan layanan yang berfungsi yang dilaksanakan oleh PDAM, yang sekurang-kurangnya mencakup minimum 50% rumah-tangga miskin perkotaan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR).

1.2 DESKRIPSI PROGRAM PERCONTOHAN HIBAH AIR MINUM WSI

Hibah Air Minum WSI merupakan percontohan hibah insentif air minum dari Pemerintah, yakni suatu prakarsa untuk mendorong investasi pemerintah daerah dalam sektor air minum. Hibah ini adalah salah satu komponen restrukturisasi sektor air minum yang menyeluruh oleh Pemerintah Indonesia yang juga menyertakan penetapan tarif, keuangan kredit untuk PDAM dan restrukturisasi hutang.

Hibah Air Minum yang diusulkan adalah untuk sekitar 70.000 sambungan yang akan dilaksanakan hingga Juni 2011.

1.2.1 Tujuan Hibah Air Minum

Tujuan Hibah Air Minum adalah untuk meningkatkan cakupan layanan air minum di pemerintah daerah terpilih hingga 70.000 sambungan rumah, yang 50% diantaranya merupakan rumah-tangga miskin.

Hasil yang lebih tinggi yang diharapkan adalah untuk meningkatkan investasi PEMDA terpilih untuk masing-masing PDAM. Investasi dari anggaran PEMDA sebagai penyertaan modal PDAM merupakan langkah penting dalam proses peningkatan tata-kelola sektor air minum. Penerimaan tanggung-jawab oleh PEMDA untuk sektor air minum mereka merupakan jalan bagi keberlanjutan peningkatan cakupan layanan bagi masyarakat dan layanan yang lebih baik bagi rumah-tangga miskin.

Dukungan untuk tujuan Pemerintah Indonesia: Hibah Air Minum WSI akan membantu Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan layanan melalui tambahan 1,5 juta sambungan dari 2010 hingga 2014 dan mencapai tujuan MDG untuk sektor air minum. Hibah ini akan membantu kebijakan dan strategi Pemerintah untuk membuka kebuntuan penyaluran dana APBD pemda sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk membuat PDAM layak mendapatkan kredit dan lebih mampu mengakses sumber dana komersial.

Pencairan melalui Sistim Pemerintah Indonesia: Hibah Air Minum akan diberikan seluruhnya melalui kerangka administratif dan peraturan Pemerintah Indonesia yang ada yakni dengan melalui mekanisme penerusan hibah yang baru-baru ini ditetapkan untuk OBA, yakni PMK 168/169. Dana hibah akan ditempatkan di anggaran dalam rekening khusus Kementerian Keuangan di Bank Indonesia. Pembayaran dana akan disahkan oleh penanda-tangan rekening khusus yang berwenang dan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia akan memantau dan melaporkan pembayaran dana rekening khusus ini melalui WSI untuk disampaikan ke AusAID dan Dewan IndII.

1.2.2 Penanganan tujuan program WSI

Disain Hibah Air Minum WSI menangani semua tujuan global WSI. Tabel 4 menunjukkan cara bagaimana Hibah Air Minum menangani setiap tujuan global WSI, yakni:

(a) memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi;

(b) membuat layanan air minum dan sanitasi menjadi berkelanjutan dengan jalan mendukung reformasi sektor dan peningkatan kapasitas;

(c) meningkatkan kesehatan dan mutu kehidupan warga miskin dan rentan dengan jalan meningkatkan kesadaran mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta memperluas akses mereka ke layanan air minum dan sanitasi; dan

(d) meningkatkan efektivitas bantuan dan melengkapi program pembangunan lembaga lainnya.

Tabel 4: Tujuan program WSI

	(a) Memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi	(b) Membuat layanan air minum dan sanitasi lebih berkelanjutan	(c) Meningkatkan kesehatan dan mutu kehidupan warga miskin	(d) Meningkatkan efektivitas bantuan dan melengkapi program lain
Hibah Air Minum	**Sangat mendukung** tujuan ini pada skala nasional. Ini adalah komponen utama prakarsa Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 1,5 juta sambungan air baru. Komponen ini mentargetkan 50% sambungan baru ke rumah-tangga miskin.	**Sangat mendukung** tujuan ini pada skala nasional, karena ini erat kaitannya dengan inti penguatan kapasitas PEMDA dan tanggung-jawab untuk investasi pemeliharaan bagi PDAM masing-masing. Tujuan ini juga menyertakan peningkatan kapasitas dalam penyediaan layanan yang bersifat pro warga miskin dan peka terhadap jender.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui prioritas peningkatan akses ke air perpipaan untuk warga miskin. Kesehatan dan kesejahteraan warga miskin dan rentan akan mendapatkan manfaat karena meningkatnya akses ke air minum.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui percontohan terhadap prakarsa Pemerintah Indonesia yang akan memberikan sarana tunggal untuk menyalurkan bantuan ke sektor air minum secara komprehensif dan terkoordinir dengan baik.
Perluasan Saluran Air Limbah dan Penyehatan Lingkungan	**Sangat mendukung** tujuan ini, secara langsung melalui perluasan cakupan sistem untuk penyediaan layanan.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui bantuan untuk prakarsa Pemerintah Indonesia dalam perluasan sistem.	**Mendukung** tujuan ini secara langsung, melalui peningkatan akses ke sarana pembuangan air limbah melalui saluran, dan dengan demikian mengurangi kebutuhan lahan untuk fasilitas setempat (*on-site*) di kawasan miskin. Kesehatan dan kesejahteraan warga miskin dan rentan akan mendapatkan manfaat karena peningkatan kesehatan llingkungan.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui aplikasi percontohan bantuan donor langsung untuk pemerintah daerah yang melaksanakan perluasan saluran air limbah / sanitasi dengan memakai mekanisme penerusan hibah Pemerintah Indonesia.
Rencana Investasi Air Limbah	**Sangat mendukung** tujuan ini secara langsung melalui penyusunan rencana investasi air limbah, yang cocok untuk mendapatkan dana donor dan siap untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah.	**Mendukung** tujuan ini melalui pemaduan saluran air limbah di kawasan perkotaan padat penduduk, melalui fasilitas setempat (*on-site)* untuk warga miskin yang tidak terlayani oleh sistim saluran air limbah.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui pemaduan fasilitas sanitasi setempat untuk warga miskin, dengan investasi dalamm saluran air limbah. Kesehatan dan kesejahteraan warga miskin dan rentan akan mendapatkan manfaat karena meningkatnya kesehatan lingkungan.	**Sangat mendukung** tujuan ini melalui penyediaan rencana investasi yang cocok untuk donor lain dan pendanaan IFI sesuai prioritas Pemerintah Indonesia untuk sanitasi 2010 – 2014.

1.2.3 Disain Hibah Air Minum

Dasar pemikiran Hibah Air Minum adalah untuk memberikan stimulus agar PEMDA mau melakukan investasi ke PDAM dan memperluas sistim pasokan air minum, yakni melalui Hibah Air Minum. Nilai hibah tertentu akan ditentukan oleh peningkatan jumlah sambungan layanan utilitas air minum, dan dibayarkan hanya *setelah* sambungan telah dibuat dan diverifikasi. Pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk ikut serta harus memenuhi kriteria seleksi yang dilaksanakan *oleh Executing Agency –dalam hal ini Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU* (lihat bab 1.16).

PEMDA yang terpilih akan menanda-tangani "Perjanjian Penerusan Hibah" dengan Kementerian Keuangan yang menetapkan ketentuan dan pagu hibah. Nilai hibah akan ditetapkan secara bertahap, yakni Rp. 2 juta (AUD 240) per sambungan untuk 1000 sambungan pertama dan Rp. 3 juta per sambungan untuk sambungan tambahan hingga pagu yang disepakati. Perjanjian penerusan hibah akan menetapkan bidang-bidang tanggung-jawab dan wewenang masing-masing pihak, dan parameter pelaksanaan. PEMDA akan membiayai terlebih dahulu investasi yang terkait, dan pekerjaan baru akan dilaksanakan oleh PDAM. DJCK akan melaksanakan program atas nama Pemerintah Indonesia.

Setelah perjanjian ditanda-tangani, DJCK sebagai *Executing Agency* akan melakukan survei dasar di kawasan yang ditetapkan untuk perluasan yang diusulkan. Hibah Air Minum WSI akan dilaksanakan secara beriringan dengan program Hibah Air Minum Pemerintah Indonesia[15] dan akan membantu dalam menentukan prosedur dan tata-cara pelaksanaan. Urutan acara dan kegiatan diringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 5: Urutan Kegiatan

1	Pemilihan PEMDA	Proses pemilihan dimulai oleh Badan Pelaksana (DJCK) dan memberikan prioritas ke PEMDA yang memiliki persediaan air yang mencukupi tapi membutuhkan perluasan sistim distribusi untuk menjangkau pelanggan baru.
2	Pemilihan daerah perluasan	PEMDA mengusulkan kawasan untuk perluasan layanan air minum, yakni kawasan yang paling banyak dihuni oleh rumah-tangga miskin.
3	Penetapan nilai hibah	DJCK menetapkan pagu awal untuk sambungan baru yang dibantu oleh hibah, berdasarkan volume air yang tersedia untuk distribusi, kapasitas pendanaan oleh PEMDA, dan sambungan yang sudah ada di kawasan perluasan yang diusulkan. Ada ketentuan untuk menyesuaikan pagu berdasarkan analisis kinerja paruh-proyek.
4	Penanda-tanganan perjanjian Hibah	Kementerian Keuangan menanda-tangani perjanjian dengan PEMDA untuk sejumlah sambungan yang ditentukan dan nilai total hibah yang akan dibayarkan dalam kelompok, untuk setiap 500 – 1000 sambungan yang berfungsi. Hibah ini terikat pada rasio minimum sebesar 50% antara sambungan untuk warga miskin dan non-miskin. Perjanjian ini memberi WSI hak untuk menunjuk konsultan verifikasi independen atas nama DJCK.
5	Survei dasar	DJCK melaksanakan survei dasar dengan memakai konsultan yang ditunjuk IndII untuk menentukan rumah-tangga yang belum tersambung, juga untuk mengumpulkan data rumah-tangga di kawasan perluasan yang ditetapkan.
6	Pelaksanaan	PDAM melaksanakan perluasan dengan memakai prosedur pengontrakan umumnya dan

[15] Hibah Air Minum Pemerintah Indonesia ditujukan untuk mewujudkan 1,500,000 sambungan baru selama periode 2010 – 2014. Progam 2010 menyediakan alokasi dana senilai $ 35 juta.

	perluasan	membiayai pekerjaan terlebih dahulu dengan dana PDAM dan dana dari PEMDA. Kajian paruh-proyek akan memungkinkan DJCK dan WSI untuk mengalokasi-ulang dana hibah – untuk PEMDA yang berkinerja lambat dan baik.
7	Verifikasi .	Pada saat perluasan selesai, PEMDA harus mengajukan permohonan verifikasi kepada DJCK. DJCK akan memakai konsultan dasar yang diperkerjakan melalui WSI untuk melakukan verifikasi survei dan menegaskan bahwa sambungan sudah berfungsi di kawasan perluasan yang ditetapkan.
8	Pembayaran	PEMDA mengajukan permohonan pembayaran hibah ke DJCK yang memberi Kementerian Keuangan wewenang untuk membayarkan hibah.
9	Pemantauan	Pemantauan dilakukan terus selama proyek dan harus sesuai dengan ketentuan Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (MEF). Pemantauan operasional menjadi tanggung-jawab WSI/IndII dan Pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan/PU).
10	Pelaporan	Pelaporan harus sesuai dengan ketentuan MEF. Pelaporan operasional dilakukan oleh WSI/IndII dan Pemerintah Indonesia [Kementerian Keuangan/DJCK].

1.2.4 Pemilihan Pemerintah Daerah dan PDAM Peserta

Pemilihan pemerintah daerah dan PDAM peserta sedang berjalan bersamaan dengan penyiapan WSI. DJCK memimpin kegiatan ini dan menetapkan kriteria tata-kelola dan operasional dasar sebagai prasyarat untuk ikut serta dalam program ini:

(a) PDAM tidak memiliki tunggakan hutang atau telah diterima dalam program Pemerintah Indonesia untuk restrukturisasi hutang.

(b) Pemerintah daerah bersedia menanamkan dana sebagai penyertaan modal ke PDAM.

(c) PDAM memiliki kapasitas penyediaan yang tak-terpakai untuk peningkatan jumlah sambungan.

(d) PDAM memiliki program yang dilaksanakan tahun 2010 disertai dengan dana anggaran untuk membiayai perluasaan terlebih dahulu dengan dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

(e) Ada cukup banyak jumlah rumah-tangga miskin, hingga bisa mencapai 50 persen dari peningkatan yang diusulkan dalam jumlah sambungan rumah.

DJCK telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk sosialisasi program dan melakukan evaluasi terhadap PEMDA dan PDAM. Pertemuan lebih lanjut direncanakan dengan walikota dan bupati dari pemerintah-pemerintah daerah calon peserta untuk menyelesaikan komitmen mereka untuk program ini. Diskusi intensif telah diadakan antara DJCK dan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan Proyek (PIM) dan draf perjanjian penerusan hibah.

1.2.5 Identifikasi Daerah Sasaran Hibah

Identifikasi kawasan sasaran awal hibah akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan PDAM. Kriteria identifikasi adalah untuk menentukan kawsan dengan konsentrasi tertinggi rumah-tangga miskin yang belum terlayani; bisa lebih dari satu kawasan jika ditentukan dengan cara ini. Kawasan terpilih akan ditentukan oleh batas jalan dan disebutkan dalam perjanjian penerusan hibah antara PEMDA

dan Pemerintah Indonesia. Setelah ditentukan, survei dasar akan menetapkan jumlah rumah tanpa sambungan air di kawasan yang ditentukan. Survei dasar juga akan menentukan jumlah rumah-tangga miskin dengan memakai kriteria[16] Pemerintah Indonesia berikut:

- luas rumah sama atau kurang dari 60 meter persegi;
- lebar jalan akses sama atau kurang dari 4 meter;
- sambungan listrik sama atau kurang dari 900 VA atau tidak ada sambungan listrik.

Suatu rumah-tangga akan dianggap miskin jika memenuhi tiga kriteria diatas. IndII juga akan melakukan surveinya sendiri.

1.2.6 Penetapan Sasaran Kemiskinan

Hibah Air Minum tidak akan diterapkan hanya untuk sambungan ke rumah-tangga miskin. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan tarif,[17] penyediaan air besih dilakukan dengan tarif rendah yang dirancang untuk memungkinkan warga miskin memenuhi kebutuhan dasarnya dan biaya terkait ditutup melalui subsidi silang dari pelanggan lain. Karena itu PDAM harus mempunyai kombinasi tipe sambungan agar bisa mewujudkan perluasan layanannya secara layak dan berkelanjutan. Tingkat pertama dari penetapan sasaran kemiskinan adalah pemilihan kawasan perluasan oleh PEMDA/PDAM untuk konsentrasi rumah-tangga miskin terbesar. Tingkat kedua memakai kriteria untuk menentukan rumah-tangga miskin seperti tersebut di atas. Melalui mekanisme ini Hibah Air Minum ditujukan untuk mencapai minimum 50 persen cakupan kemiskinan dari sambungan baru.

1.2.7 Survei Dasar dan Verifikasi

IndII akan mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia untuk Hibah Air Minum. Menurut peraturan ini, DJCK bertanggung-jawab atas verifikasi pekerjaan yang tercantum dalam Hibah ini. Namun Pemerintah Indonesia dan AusAID sepakat bahwa verifikasi akan dilakukan oleh konsultan independen yang diperkerjakan WSI atas nama DJCK.

Karena Hibah Air Minum dilaksanakan sebagai hibah berbasis luaran, maka perlu dilakukan survei dasar sebelum pelaksanaan Hibah untuk menentukan jumlah rumah-tangga yang belum tersambung di kawasan perluasan yang ditetapkan. IndII telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini karena waktu yang tersedia tinggal sedikit. Bagan kerangka acuan untuk konsultan ini bisa dilihat di Lampiran 5. Diusulkan untuk memakai jasa konsultan survey dasar untuk melaksanakan verifikasi dengan dana WSI.

Tujuan utama konsultan dasar adalah untuk menentukan jumlah rumah-tangga yang belum tersambung di kawasan perluasan yang ditetapkan. Ini memerlukan survei setiap rumah-tangga yang belum tersambung berdasarkan daftar pelanggan PDAM yang ada. Selain mengidentifikasi rumah-tangga yang belum tersambung, survei ini akan mengumpulkan data sekunder yang meliputi: (i) sumber air yang ada; (ii) biaya air harian vs konsumsi; (iii) ukuran rumah-tangga; (iv) profil jender dan

---

[16] Berdasarkan kriteria untuk Surabaya OBA yang didanai oleh Bank Dunia, tapi lebih ketat untuk lebar jalan dan pasokan listrik (Surabaya memakai 6m, dan 1.300 VA)

[17] Keputusan Menteri Dalam Negeri 23/2006 mengenai Tarif yang Diperbolehkan untuk PDAM

usia dalam rumah-tangga; dan (v) keberadaan orang cacat. Data sekunder ini akan dipakai untuk menganalisis cara Pemda dan PDAM menanggapi isu jender dan kemiskinan dalam melaksanakan Hibah Air Minum WSI.

Verifikasi akan dilaksanakan oleh konsultan survei dasar setelah sambungan layanan baru terpasang dan berfungsi selama lebih dari tiga bulan. PEMDA aka meminta verifikasi ke DJCK yang akan memobilisasi tim verifikasi. Konsultan verifikasi akan membuktikan setiap rumah-tangga yang menurut PDAM telah memiliki sambungan air baru. Konsultan verifikasi akan membuktikan langsung di rumah-tangga tersebut bahwa: (i) sambungan air telah dipasang dan berfungsi dengan baik;[18] (ii) sambungan air telah berfungsi selama tiga bulan atau lebih; dan (iii) penghuni rumah-tangga telah membayar tagihan air selama dua bulan.[19] IndII telah mempekerjakan profesional dari Indonesia untuk merancang kuesioner bagi pelaksanaan survei dasar dan verifikasi.

1.2.8 Kesadaran akan Kemiskinan dan Isu Jender

Hibah Air Minum WSI tidak menetapkan cara-cara bagaimana PEMDA harus mencapai target pro warga miskin sebesar 50% sambungan baru; demikian juga aspek jender dan cacat fisik tidak diharapkan menjadi faktor penting dalam penyediaan layanan. Walau begitu, WSI akan mengumpulkan data sebagai bagian dari survei dasar mengenai cakupan kemiskinan dan komposisi jender dalam jumlah penerima manfaat dan juga parameter sosial lainnya. Ini semua akan digunakan dalam MEF untuk menganalisis cara bagaimana masing-masing PEMDA menanggapinya dan jika pada kenyataannya isu terkait jender dan orang cacat merupakan faktor pembeda dalam pelaksanaan oleh tiap PEMDA.

Konsultan yang melaksanakan survei dasar akan bekerjasama dengan PEMDA dan PDAM untuk memastikan bahwa instansi pelaksana di tingkat PEMDA mengetahui persyaratan pro warga miskin dalam Hibah Air Minum, juga aspek sosial terkait jender dan orang cacat sehingga PEMDA mampu untuk:

- meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pendekatan pro warga miskin dan kesetraan jender yang terkait dengan penyediaan layanan air perpipaan, termasuk kebijakan AusAID dan Pemerintah Indonesia;
- mengembangkan langkah-langkah yang inovatif dan bisa diterima untuk meningkatkan partisipasi warga miskin dalam program Hibah Air Minumnya;
- memastikan bahwa informasi mengenai Hibah Air Minum memberi semua warga masyarakat (termasuk warga miskin, perempuan dan orang cacat) penjelasan mengenai program sambungan rumah dan manfaatnya.

1.2.9 Perkiraan Biaya Hibah Air Minum

Biaya Hibah Air Minum telah ditetapkan dalam kisaran 35 persen hingga 40 persen dari biaya rata-rata sambungan baru, walau beberapa sambungan mungkin lebih murah dan beberapa lainnya lebih mahal. Menetapkan hibah dengan nilai sebagian dari biaya rata-rata untuk luaran yang diserahkan,

---

[18] Dengan baik berarti layanan diberikan terus menerus, dengan tekanan yang memadai untuk menjangkau semua keran air yang ada di rumah, dan dengan mutu yang aman untuk konsumsi.

[19] Dua bulan sudah cukup karena tagihan air diberikan untuk satu bulan sebelumnya.

menghilangkan kebutuhan audit yang rumit dan verifikasi biaya pelaksanaan. Penjelasan mengenai cara bagaimana perkiraan biaya hibah diperoleh, diberikan dalam Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan biaya komparatif sektor WSI. Nilai tukar yang dipakai untuk biaya adalah Rp. 8.300/AUD yang memungkinkan untuk mencakup sekitar 70.000 sambungan baru.

Tabel 6: Perkiraan biaya perluasan sistim PDAM untuk 5.000 sambungan

	Rp Miliar [A]	
Komponen Sistim	**Rendah**	**Tinggi**
Penambahan pipa masuk (*intake*)		2
Pipa transmisi atau pemompaan		3
Penambahan pengolahan	5	8
Jaringan distribusi	10	10
Pipa retikulasi	14	14
Sambungan[B]	3	3
Total	**32**	**40**
Hibah Air Minum	14	14
Hibah sebagai % dari biaya investasi[C]	**44%**	**35%**

Catatan:

A. *Perkiraan biaya rendah atau tinggi mengacu pada tingkat kapasitas yang ada dan yang bisa dipakai didalam sistim PDAM. Perkiraan rendah menunjukkan kapasitas tak-terpakai yang ada dan kebutuhan minimum untuk perluasan sistim tambahan.*

B. *Ongkos sambungan biasanya diminta dari pelanggan. Dalam kasus rumah-tangga miskin, cara bagaimana ini akan dilakukan tergantung pada PDAM. Biaya ini menunjukkan bahwa subsidi penuh mungkin dilakukan untuk sambungan ke rumah-tangga miskin.*

C. *Nilai hibah menunjukkan tingkat kenaikan hasil dan cakupan insentif untuk PEMDA agar mendukung program ini melalui investasi di PDAM.*

Tabel 7: Biaya WSI

Komponen	**AUD Juta**					**Keterangan**
	IndII	**WSI**				
	08/09	**09/10**	**09/10**	**10/11**	**TOT**	
Persiapan Hibah Air Minum	0,15					Saat ini sedang didanai oleh IndII
Survei Dasar Hibah Air Minum		0,5				Diusulkan untuk pendanaan oleh IndII
Hibah Air Minum			8	12	20	Dialihkan sebagai hibah Pemerintah Indonesia untuk PEMDA untuk sekitar 70.000 sambungan
PAMSIMAS			12	8	20	Bantuan tambahan untuk perluasan cakupan hingga 400 desa.
			1,2	1,3	2,5	Bantuan dengan sosialisasi tambahan dan pelatihan T/A
Saluran Air Limbah			2	3	5	Hibah Saluran Air Limbah dan Sanitasi
			3	2	5	Rencana investasi di 4 kota

Komponen	AUD Juta					Keterangan
	IndII	WSI				
	08/09	09/10	09/10	10/11	TOT	
Peningkatan Kapasitas untuk Hibah Sanitasi			0,7	0,2	1,2	
Masyarakat Madani			1,2	2,8	4	
Verifikasi biaya pasca manajemen WSI, dan kajian teknis			2,15	0,65	2,8	
Total	**0,65**		**30,25**	**30,25**	**60,5**	

1.2.10 Pembayaran Hibah Air Minum ke Pemerintah Daerah

Kementerian Keuangan akan membayarkan dana hibah setelah DJCK menyerahkan surat pernyataan yang membuktikan bahwa ketentuan prasyarat pembayaran telah dipenuhi. Dana AusAID akan dibayarkan melalui rekening khusus yang dibuka oleh Kementerian Keuangan di Bank Indonesia (BI). Kementerian Keuangan akan menyerahkan permohonan ke AusAID untuk mengisi rekening khusus ini, dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan bahwa dana telah dibayarkan sesuai ketentuan dari rekening khusus dan program Hibah Air Minum.

1.3 PENGATURAN PELAKSANAAN

Diusulkan agar WSI dan Hibah Air Minum dikelola melalui fasilitas IndII yang ada, dengan demikian memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di AusAID Jakarta, dan pengaturan yang ada bersama Pemerintah Indonesia. Sumberdaya dan anggaran pengelolaan WSI akan dipadukan kedalam kontrak IndII yang ada, melalui perubahan kontrak yang sesuai. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan GoA untuk pelaksanaan Hibah Air Minum akan dicantumkan dalam Pengaturan Tambahan (*Subsidiary*) yang ada, melalui surat pertukaran antara Pemerintah Indonesia dan GoA.

1.3.1 Pelaksanaan Hibah Air Minum

Hibah Air Minum akan dilaksanakan dengan memakai prosedur dan mekanisme Pemerintah Indonesia, dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (DJCK) sebagai Badan Pelaksana. Pelaksanaan akan mematuhi peraturan Pemerintah Indonesia, yang terkait dengan penggunaan dana hibah melalui anggaran Pemerintah Indonesia dan transfer dana hibah ke pemerintah sub-nasional

peserta.[20] Koordinasi dan pengawasan program Hibah Air Minum akan dilakukan melalui Dewan IndII dan Tim Teknis WSI yang dibentuk untuk mengkaji komponen WSI.

Dana Hibah Air Minum akan ditempatkan di anggaran nasional Pemerintah Indonesia dan disimpan di rekening khusus yang dibuka oleh Kementerian Keuangan. Dana ini akan disalurkan ke pemerintah sub-nasional (daerah) peserta dengan mengikuti prosedur, yang ditentukan dalam perjanjian penerusan hibah antara Kementerian Keuangan dan masing-masing pemerintah daerah peserta. Prosedur pelaksanaan Hibah Air Minum WSI akan mengikuti prosedur dasar yang sama untuk program Hibah Air Minum Nasional Pemerintah Indonesia, kecuali prosedur ini akan membawa program Pemerintah Indonesia pada satu siklus anggaran. Di kedua program ini, kelanjutan dan keseragaman praktek dan prosedur akan dipastikan melalui keterlibatan DJCK sebagai badan pelaksana.

1.3.2 Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi

Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (MEF) untuk WSI dijelaskan di Bab 5 dokumen ini. Pemantauan dana pengawasan operasional untuk Hibah Air Minum akan menjadi tanggung-jawab DJCK atas nama Pemerintah Indonesia, dan IndII atas nama AusAID. Survei dasar akan dilaksanakan sebagai satu kegiatan dan didanai oleh IndII.

Verifikasi sambungan menjadi tanggung-jawab DJCK, namun DJCK dan AusAID telah sepakat bahwa WSI akan menyediakan dana untuk mempekerjakan konsultan survei dasar untuk melaksanakan verifikasi dibawah pengawasan IndII.

Proses verifikasi akan menyertakan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum (DJCK), sebagai badan pengatur *de facto* untuk sektor air minum. BPPSPAM saat ini bertanggung-jawab atas audit kinerja PDAM, bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – sebagai lembaga audit nasional Indonesia. Ini akan menjamin bahwaa sambungan yang terpasang memenuhi kriteria operasional yang ditentukan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Proyek* dan perjanjian penerusan hibah.

1.3.3 Jadual Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Hibah Air Minum WSI akan diselesaikan selama satu siklus anggaran Pemerintah Indonesia (Januari 2010 hingga Desember 2010). Beberapa pengalihan pelaksanaan bisa dilakukan dalam tahun 2011 dengan memakai dana PDAM, walau pendanaan dari pemerintah daerah akan perlu dibayarkan selama 2010. Tahapan-tahapan pokok pelaksanaan telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 8: Jadual Pelaksanaan

	Tahapan Pokok Kegiatan	Jangka Waktu	Tindakan
1	Kementerian Keuangan memberitahukan anggaran untuk TA 2010	Nov 9- Nov 14	Kementerian Keuangan menegaskan anggaran berdasarkan SA yang ada

[20] Peraturan Menteri Keuangan 168 dan 169 tahun 2008 mengenai transfer hibah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

	Tahapan Pokok Kegiatan	Jangka Waktu	Tindakan
2	Kajian Hibah Air Minum dan Sanitasi oleh rekan kerja	23 Nov.	
3	PEMDA menanda-tangani Perjanjian Hibah	25 Nov- 27 Nov	Tergantung pada hasil kajian oleh rekan kerja (*peer review*)
4	PEMDA menegaskan anggaran	25 Nov – 31 Des	Tergantung hasil kajian oleh teman kerja dan sebelum batas waktu akhir tanggal 31 Desember 2010
5	PEMDA memberikan penyertaan modal untuk PDAM	1 Jan 2010 dan selanjutnya	Tindakan ini bisa terjadi kapan saja setelah persetujuan anggaran dan tergantung pada prosedur PEMDA. Tindakan ini diminta sebagai ketentuan pembayaran hibah.
6	Survei dasar	1 Jan 2010	Harus diselesaikan sebelum pelaksanaan dimulai di sekitar Mei 2010.
7	Menyelesaikan DED	1 Jan – 28 Feb	Dimulai dengan anggaran baru. Beberapa PDAM telah memiliki DED lengkap, dan beberapa lainnya mungkin perlu beberapa waktu. .
8	Tender	1 Mar – 30 Mei	Periode tender umumnya adalah 40 hari. Beberapa tender akan diundur hingga akhir Mei.
9	Konstruksi	1 Mei - 31 Dec	Beberapa kontruksi akan dimulai awal dengan DED dan tender. Perkiraan periode kontruksi adalah 6-9 bulan. Beberapa lainnya mungkin diperpanjang hingga setelah Desember 2010.
10	Kajian kemajuan dan re-alokasi hibah	1 Jul – 30 Agus	Hingga 1 Juli, kemajuan akan menunjukkan siapa yang tertinggal dan siapa yang mencapai kemajuan, jadi memungkinkan re-alokasi pagu hibah.
11	Revisi anggaran PEMDA	1 Agus – 30 Sep	Anggaran akan perlu direvisi untuk menampung alokasi hibah yang direvisi dan menentukan PEMDA yang tidak menyerahkan permohonan anggaran hingga batas waktu tanggal 31 Desember 2009.
12	Penyertaan modal oleh PEMDA untuk PDAM	1 Sep – 31 Okt	Ini bisa terjadi setelah revisi anggaran dan tanggapan terhadap re-alokasi hibah, juga PEMDA yang tidak memenuhi batas waktu sebelumnya pada 31 Desember 2009.
13	Verifikasi awal dan kelompok pertama hibah PEMDA	15 Okt 2010 dan selanjutnya	Ini bisa terjadi setelah sambungan pertama selesai dan paling tidak tiga bulan setelah kontruksi.
14	Verifikasi terakhir dan kelompok terakhir hibah PEMDA	30 Apr 2011	Ini memberi waktu dua bulan untuk pembayaran hibah dan penutupan rekening khusus hibah.

1.3.4 Persiapan pelaksanaan program Hibah Air Minum

Persiapan Hibah Air Minum sedang berjalan bersamaan dengan proses disain, yakni meliputi:

Pemilihan pemerintah daerah dan PDAM: Ini sudah selesai dilakukan. 25 PEMDA dan PDAM telah dipilih untuk ikut serta dalam Hibah Air Minum. Pemilihan telah dilaksanakan oleh DJCK bekerjasama dengan tim persiapan WSI. Daftar nama PEMDA dan PDAM dan kemungkinan jumlah sambungan baru yang mencakup rumah-tangga miskin, disajikan pada Lampiran 3.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Hibah Air Minum: Ini telah diselesaikan dan diterbitkan oleh DJCK sebagai *Executing Agency*.

Penyusunan perjanjian penerusan hibah standar: Walau masih disusun, perjanjian penerusan hibah akan menentukan nilai hibah yang dijanjikan untuk PEMDA dan kawasan yang dipilih untuk perluasan layanan air minum. Perjanjian ini juga mencantumkan kriteria untuk menambah atau menurunkan nilai hibah berdasarkan pencapaian tahapan pokok pelaksanaan oleh setiap PEMDA. Yang terakhir, perjanjian ini akan menyebutkan kriteria untuk verifikasi dana pembayaran hibah.

Pemilihan konsultan sosialisasi untuk membantu pelaksanaan: WSI akan mengalokasilkan dana untuk memilih dan menunjuk konsultan yang akan membantu sosialisasi Hibah Air Minum ke PEMDA dan mewujudkan penanda-tanganan perjanjian penerusan hibah. Konsultan sosialisasi ini akan menyebar-luaskan tujuan yang pro warga miskin dan cakupan yang ditargetkan dari program serta cara-cara untuk meraih target cakupan kemiskinan.

Revisi *"Subsidiary Agreement"* IndII yang ada: Ini sedang berjalan. Draf revisi perjanjian telah disusun dan tampaknya tidak ada kesulitan dalam penyelesaian draf ini. Revisi akan diberlakukan melalui surat pertukaran (*Exchange of letter)* antar para penanda-tangan perjanjian. Gambar 1 di bawah menunjukkan tahap-tahap utama pelaksanaan sebagaimana disebutkan di atas.

1.3.5 Penyaluran Dana Hibah Air Minum

Penyaluran dana Hibah Air Minum akan memerlukan pembukaan rekening khusus oleh Kementerian Keuangan di Bank Indonesia. Ketentuan dan persyaratan untuk operasi dan pengisian rekening khusus ini akan melindungi aspek penting dari pelaksanaan program Hibah Air Minum. Penanda-tangannya adalah pejabat Kementerian Keuangan yang ditunjuk Pemerintah Indonesia. Rekening khusus ini akan diisi dengan deposito awal senilai sama dengan ketentuan pembayaran tiga bulan. Pengisian rekening khusus akan mengikuti peraturan untuk penyelesaian pengeluaran, sesuai dengan *"Subsidiary Agreement"* yang direvisi dan *Petunjuk Pelaksanaan Proyek Hibah Air Minum (PIM)*.

BAB 2: KOMPONEN SANITASI

2.1 ANALISIS SEKTOR SANITASI DAN ISU STRATEGIS

Status sektor sanitasi Indonesia saat ini tercermin dalam sejarah ketergantungan pada penyediaan secara swadaya oleh pemilik properti dengan bentuk sanitasi perkotaan terbanyak adalah septik tank yang dibangun secara swadaya dalam bangunan-bangunan kantor dan komersial dan properti hunian.

Menurut peraturan perundang-undangan, setiap Pemerintah Daerah (PEMDA) bertanggung-jawab menyediakan layanan untuk pembuangan limbah sanitasi secara aman. Namun, ini terbatas hanya pada pengumpulan limbah septik tank dari properti individual dan pembuangannya ke fasilitas pembuangan endapan tinja yang dioperasikan pemerintah. Operator swasta juga menyediakan layanan seperti ini tapi tidak diatur dengan baik. Praktek umumnya dalam pembuatan septik tank masih memungkinkan rembesan ke air tanah sekitar. Banyak operator penyedotan septik tank membuang endapan tinja ke sungai dan saluran, bukannya didibuang di fasilitas pembuangan yang telah disepakati.

Hanya sebelas kota memiliki sistem saluran air limbah dan secara total ini melayani hanya sedikit di atas satu persen dari populasi perkotaan Indonesia.

Warga miskin perkotaan bergantung pada fasilitas umum yang disediakan melalui program pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, SANIMAS merupakan sarana utama untuk membantu warga miskin. Indonesia sudah berada dalam jalur untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDG) untuk sanitasi perkotaan, yakni cakupan layanan sebesar 81,8 persen,[21] tapi cakupan layanan masih rendah di kawasan miskin dan kumuh. Cakupan layanan sanitasi di daerah perdesaan masih 60 persen tapi masih berada dalam jalur untuk mewujudkan target MDG. Seperti halnya di kawasan perkotaan, cakupan layanan di perdesaan masih rendah dari segi perbandingan untuk warga miskin. Tabel 9 menjelaskan akses komparatif ke fasilitas sanitasi.

Tabel 9: Akses ke sanitasi

	Akses ke Fasilitas Sanitasi yang Memadai (persen dari populasi)				
	Program Pemantauan Bersama			Laporan UNDP-PEMERINTAH INDONESIA[23] 2007 (Data SUSENAS)	
	MDG	2006	Proyeksi 2015	MDG	2006
Perkotaan	82	72	80	78.8	81,8
Perdesaan	69	41	43	59.6	60
Total	**73**	**55**	**63**	**65.5**	**69,2**

[21] Laporan mengenai Pencapaian MDG di Indonesia, UNDP, Bappenas 2007

2.1.1 Analisis masalah dan isu dalam sektor sanitasi

Sektor sanitasi perkotaan umumnya bercirikan jumlah infrastruktur perkotaan yang sangat sedikit untuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah. Hingga kini pembuangan air limbah dianggap sebagai tanggung-jawab pemilik properti sehingga hampir semua pemilik properti memakai septik tank. Namun, pemakaian septik tank tidak tepat untuk lingkungan perkotaan yang padat penduduknya, karena keberadaan mereka dan tidak-adanya saluran air limbah menyebabkan polusi parah pada aquifer air tanah dangkal. Jika sambungan PDAM tidak tersedia maka aquifer air tanah ini dipakai oleh 50% populasi perkotaan sebagai sumber air utama.

Suatu masalah berkaitan dengan fakta bahwa infrastruktur air limbah jauh lebih mahal daripada prasarana air minum dan tidak membawa manfaat nyata secara langsung jika dibandingkan dengan pasokan air perpipaan. Selama bertahun-tahun DJCK lebih memprioritaskan penyediaan air minum daripada saluran air limbah. Hanya sedikit skema saluran air limbah yang dibangun dan ini pun masih bersifat sangat sederhana.

Prioritas yang diberikan PEMDA untuk saluran air limbah juga masih rendah dan PEMDA membelanjakan alokasi DAK mereka hanya untuk program sanitasi komunal yang sederhana. Total nilai DAK untuk air minum dan sanitasi adalah Rp. 1,14 triliun untuk 440 PEMDA, jadi hanya sekitar AUD 300.000 untuk air minum dan sanitasi bagi setiap PEMDA dan sebagian besar dana ini dipakai untuk air minum. Pemerintah dan masyarakat kurang memahami manfaat sanitasi dan baru kali ini pemerintah pusat memulai program sanitasi komprehensif untuk 2010-2014.

2.1.2 Kebijakan dan strategi sanitasi perkotaan Pemerintah Indonesia

Kebijakan sanitasi Pemerintah Indonesia disesuaikan dengan penekanan menyeluruh pada pengurangan kemiskinan dan pendekatan “menu terbuka” yang memungkinkan masyarakat untuk memilih intervensi. Untuk sanitasi perkotaan, prakarsa utama tetap SANIMAS,22 dan alokasi DAK khusus sektor. Tujuan Pemerintah Indonesia untuk perluasan saluran air limbah dilaksanakan dengan jalan memotong skema SANIMAS komunal yang ada (dan yang direncanakan) dengan sistem saluran air limbah. Dengan demikian banyak meningkatkan efisiensi dan cakupan sanitasi komunal melalui SANIMAS.

Strategi sanitasi Pemerintah Indonesia yang terus berkembang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang dikeluarkan pada bulan Desember 2008 (*PMPU 16/2008*), mengenai *Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pembangunan Sistim Pengelolaan Air Limbah*.[23] Pelaksanaan strategi ini ditetapkan dalam *Sanitation Road Map* yang merupakan usaha bersama dari DJCK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dengan koordinasi oleh BAPPENAS melalui kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Kebijakan ini untuk menangani lima

---

[22] SANIMAS adalah program insentif Pemerintah Indonesia untuk pengembangan sanitasi berbasis masyarakat oleh pemerintah daerah di kawasan perkotaan berpenghasilan kecil. Besaran masyarakat dibatasi hanya 100 rumah-tangga yang diorganisir dan dibantu dalam memilih salah satu dari tiga opsi sanitasi, yakni: i) blok fasilitas umum dengan pipa air perpipaan dan sarana cuci, mandi dan kakus; ii) septik tank bersama (untuk 3 -5 rumah-tangga); atau iii) sambungan saluran air limbah yang dangkal ke septik tank komunal atau Imhoff tank. Dua opsi terakhir mengharuskan rumah-tangga memiliki akses ke air. Biaya dibagi bersama dengan rasio 30:60:10 oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya total diperkecil hingga sekitar USD 30.000 atau sekitar Rp. 300 juta. Masyarakat bertanggung-jawab atas operasi, perawatan dan pengumpulan tagihan.

[23] Kebijakan dan strategi nasional pengembangan system pengololaan air limbah permukiman, PMPU 16/2008.

bidang: (i) peningkatan akses ke sarana sanitasi untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan dengan prioritas untuk rumah-tangga berpenghasilan rendah; (ii) peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam penyediaan layanan sanitasi; (iii) pengembangan kerangka peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan sanitasi; (iv) peningkatan kapasitas lembaga dan personil yang terlibat dalam pengelolaan air limbah; dan (v) peningkatan investasi dan pengembangan sumber dana alternatif untuk prasarana air limbah. *Sanitation Road Map*[24] memberikan rincian tujuan sanitasi dari 2010 hingga 2014. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cakupan sanitasi perkotaan hingga 80 persen dan 60 persen untuk sanitasi perdesaan; memperbanyak jumlah kota yang memiliki sistim saluran air limbah hingga 20 persen dari populasi perkotaan masing-masing; dan melibatkan 330 kota dalam penyusunan strategi sanitasi yang memiliki rencana pembiayaan yang disepakati.

2.1.3 Prakarsa sanitasi perkotan Pemerintah Indonesia

Sebelum desentralisasi dan otonomi daerah di tahun 1999, Pemerintah Indonesia menyediakan dana fasilitas sanitasi melalui program pemerintah pusat. Sejak 2003, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Dana Alokasi Khusus (DAK)25 untuk pemerintah daerah. Alokasi DAK bersifat khusus sektor tapi menyatukan air minum, sanitasi, persampahan dan drainase dalam satu alokasi generik. Contohnya, dari alokasi DAK 2008 senilai Rp. 21,2 triliun, sekitar Rp. 1,14 triliun dialokasikan ke sektor generik air bersih dan sanitasi bagi sekitar 451 pemerintah daerah. Selain sifat khusus alokasi DAK, sebagian besar investasi Pemerintah Indonesia yang kecil untuk sanitasi perkotaan telah dipergunakan untuk fasilitas sanitasi bagi warga miskin. Program sebelumnya memberikan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) komunal tapi banyak yang tidak termanfaatkan dan tidak bekerlanjutan karena masyarakat pengguna akhir tidak dilibatkan dalam proses disain dan pemilihan lokasi fasilitas. Seiring waktu, DJCK menyempurnakan konsep penyediaan sanitasi komunal yang membuahkan hasil berupa program SANIMAS. Menurut SANIMAS, pemerintah pusat menyediakan hibah senilai 30% untuk sarana sanitasi komunal yang dibangun dengan memakai pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. PEMDA menyediakan 60% dana SANIMAS dan masyarakat 10% berupa tenaga.

Hingga kini, perhatian Pemerintah Indonesia untuk penyaluran air limbah masih terbatas pada prakarsa dari masyarakat donor. Namun mulai lima tahun mendatang Pemerintah Indonesia menangani kebutuhan layanan sanitasi secara komprehensif melalui rencana pembangunan lima-tahunan 2010-2014 untuk berbagai macam ukuran kota. Program 2010-2014 Pemerintah Indonesia untuk saluran air limbah akan menyediakan sistim saluran air limbah baru di lima kota dan meningkatkan cakupan sistim saluran air limbah hingga mencapai 20% populasi setiap kota. Komponen sanitasi WSI ditujukan untuk membantu pencapaian dua tujuan di atas yakni: Pertama, dengan jalan menjadikan proyek saluran air limbah yang ”bankable” (dapat dijadikan jaminan di bank) untuk pendanaan oleh MDB. Kedua, bantuan diberikan untuk membantu perluasan sistim saluran air limbah yang ada melalui Hibah Sanitasi. Tujuan pemerintah selanjutnya adalah secara bertahap menyambung sistim komunal yang ada ke perluasan sistim saluran air limbah di masa depan, sehingga dengan demikian dapat menghindari masalah pengolahan setempat yang timbul dari skema komunal tapi tetap mempertahankan sambungan rumah-tangga. Tahap transisi ini dibentuk melalui komponen hibah sanitasi WSI dan dibahas di bab terakhir.

---

[24] *Sanitation Road Map* (Arah Kedepan Sanitasi) adalah untuk mewujudkan 330 kota yang memiliki Strategi Sanitasi Kota dan memberi 16 kota saluran air limbah (11 yang ada dan 5 yang baru) dengan cakupan 5% dari total populasi perkotaan.

[25] Alokasi DAK historis dari Kementerian Keuangan, data tahun: 2003, 2004, 2005 dan 2006 yang masing-masing nilainya adalah Rp. 2,3 triliun; Rp. 2,8 triliun; Rp. 4 triliun, dan Rp. 11,6 triliun

Pemerintah Indonesia telah menekankan perlunya bantuan dalam penyusunan proyek saluran air limbah yang *"bankable"* yang bisa didanai oleh donor dan lembaga keuangan internasional. Sekarang sedang dilakukan pemilihan lima kota untuk pembangunan sistim saluran air limbah yang baru melalui konsultasi intensif dengan Pemerintah Indonesia dan para calon peminjam dana MDB.

2.1.4 Pelajaran yang ditarik dari proyek-proyek sanitasi di Indonesia

Seperti halnya prakarsa air minum, pelajaran yang ditarik dari program sanitasi di Indonesia berkisar pada keberlanjutan intervensi. Dalam kasus sistim komunal, keberlanjutan berkorelasi erat dengan banyaknya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Keberlanjutan kemudian menjadi semakin kuat karena masyarakat dilibatkan dalam proses operasi dan perawatan sarana sanitasi dengan bantuan instansi PEMDA jika dirasa perlu. Ini adalah format umum intervensi SANIMAS yang memang terbukti berhasil.

Dalam kasus infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah kota, seperti instalasi pengolahan endapan septik tank dan instalasi saluran air limbah, rasa memiliki merupakan faktor yang lebih relevan dalam keberlanjutan. Karena sebagian besar instalasi di masa lalu dibangun dan dibiayai oleh pemerintah pusat, maka PEMDA umumnya tidak merasa memiliki dan cenderung tidak memprioritaskan perawatan dan operasi fasilitas-fasilitas ini.

Komponen sanitasi WSI akan memakai mekanisme Hibah Air Minum untuk pelaksanaan komponen sanitasi ini. Pemakaian mekanisme hibah bisa menumbuh-kembangkan keberlanjutan investasi dan lebih banyak keterlibatan dan rasa memiliki dari pemerintah daerah untuk infrastruktur baru. Praktek di masa lalu adalah melaksanakan proyek seperti ini melalui instansi pemerintah pusat, dan mengalihkan aset infrastruktur ke pemerintah daerah untuk operasi dan perawatan. Memang ini adalah cara yang efektif untuk membangun suatu sistim, tapi hasilnya berbeda-beda terkait operasi dan perawatan selanjutnya oleh pemerintah daerah. Mekanisme hibah mengharuskan keterlibatan dan komitmen pemerintah daerah sejak awal kegiatan dan hasilnya pada akhirnya bermuara pada keberlanjutan layanan yang semakin baik dari infrastruktur air limbah. Peraturan Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan hibah ke PEMDA masih bersifat generik dan walaupun Pemerintah Indonesia belum memiliki program nasional bagi penerapan mekanisme hibah untuk sanitasi, DJCK telah merumuskan petunjuk pelaksanaan yang dipakai untuk tujuan ini.

Untuk menumbuh-kembangkan rasa memiliki Pemerintah Indonesia, pemakaian prosedur dan fasilitas AusAID tertentu akan dibatasi hanya pada beberapa bantuan teknis dalam penyusunan dan pengelolaan program. Program lainnya akan dilaksanakan seleuruhnya oleh Pemerintah Indonesia secara beriringan dengan pelaksanaan komponen program induk.

2.1.5 Donor lain pendukung air limbah

Bank Dunia dan Pemerintah Belanda membantu sanitasi Indonesia melalui proyek Pembangunan Sektor Sanitasi Indonesia (ISSDP) di bawah dana "Trust Fund" WASAP. Bantuan ini meliputi persampahan dan drainase serta pengelolaan air limbah. ISSDP mengembangkan konsep strategi sanitassi kota yang menyertakan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan strategi ini. Dalam fase pertamanya, ISSDP telah menghasilkan enam strategi sanitasi kota[26] dan selanjutnya enam kota lagi sedang dipersiapkan. Dua dari enam kota pertama,

[26] Surakarta , Blitar, Banjarmasin , Denpasar, Payakumbuh, Jambi

Banjarmasin dan Surakarta telah dipilih sebagai penerima Hibah Sanitasi WSI untuk membantu mewujudkan strategi sanitasi kota mereka. Program Hibah air limbah WSI di Banjarmasin dan Surakarta sangat mendukung komponen air limbah dalam strategi sanitasi kota ISSDP. Perluasan strategi sanitasi ini ke 330 kota dengan berbagai ukuran selama lima tahun mendatang merupakan komponen utama program sanitasi Pemerintah Indonesia dan menjadi tantangan yang berat. Pemerintah Indonesia secara aktif mencari bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan dari berbagai lembaga bilateral.

Kelompok kerja lintas-instansi AMPL yang semula dibentuk dibawah WASPOLA memberikan bantuan koordinasi antara donor dan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan air minum dan sanitasi. Selain wakil-wakil Pemerintah Indonesia, Pokja (kelompok kerja) AMPL ini menyertakan pihak non-pemerintah seperti PERPAMSI. Proyek Bantuan Kebijakan Air Minum dan Sanitasi (WASPOLA) yang dibantu oleh Australia telah memberikan bantuan untuk Pokja AMPL.

Tim Teknis Pengembangan Sanitasi (TTPS) telah dibentuk dengan sekretariat beranggotakan lima orang untuk memfokuskan pada masalah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sanitasi nasional. Tim ini didukung oleh ISSDP dan program Air Minum dan Sanitasi Bank Dunia. Fasilitas WASPOLA menyediakan bimbingan dan koordinasi umum terkait pelaksanaan *Sanitation Road Map* (Arah Kedepan Sanitasi).

ADB sekarang membantu penyusunan Proyek Kesehatan dan Pengelolaan Sanitasi Metropolitan (MSMHP) dimana komponennya yang meliputi sanitasi komunal, saluran air limbah, persampahan dan drainase menjadi program terpadu untuk sanitasi di Yogyakarta, Medan dan Makassar. Karena kesulitan dalam penyusunan program, komponen air limbah untuk Makassar telah dihilangkan dari pinjaman MSMHP mendatang, karena tidak memenuhi kriteria kesiapan dari Pemerintah Indonesia dan ADB. AusAID membantu penyusunan analisis dampak lingkungan untuk komponen air limbah Makassar, yang akan mendukung pencantuman saluran air limbah Makassar dalam pinjaman ADB di masa depan. Pemerintah Indonesia baru-baru ini meminta bantuan dari AusAID untuk menyelesaikan studi kelayakan bagi saluran air limbah Makassar agar proyek siap dievaluasi dan didanai melalui pinjaman ADB. Sebagai respon terhadap perihal ini, Makassar dicantumkan sebagai calon kota untuk mendapatkan bantuan penyusunan rencana investasi saluran air limbah melalui WSI. Komitmen donor lain/MDB untuk program yang sedang berjalan dan di masa depan, disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10: Kegiatan donor lain

Kota dengan saluran air limbah	Prioritas Pemerintah Indonesia untuk saluran air limbah baru	ADB MSMHP	WASAP (D) - Pemerintah Belanda	Program kedepan Bank Dunia	JICA
Jakarta	Bogor	Medan	Payakumbuh	Bandung (perluasan)	Saluran air limbah Denpasar
Medan	Surabaya	Yogyakarta	Denpasar		Jakarta
Yogyakarta	Palembang	Makassar	Blitar		
Solo	Bandar Lampung		Surakarta		
Bandung	Batam		Banjarmasin		

Kota dengan saluran air limbah	Prioritas Pemerintah Indonesia untuk saluran air limbah baru	ADB MSMHP	WASAP (D) - Pemerintah Belanda	Program kedepan Bank Dunia	JICA
Cirebon			Jambi		
Tangerang					
Banjarmasin					
Balikpapan					
Samarinda					
Denpasar					

2.1.6 Penyesuaian dengan rekomendasi ODE mengenai bantuan WSS di Indonesia

Tujuan komponen sanitasi WSI yang diusulkan sangat sejalan dengan temuan dan rekomendasi dalam laporan evaluasi ODE mengenai bantuan WSS di Indonesia, 27 yakni perluasan bantuan layanan sanitasi perkotaan termasuk untuk rumah-tangga miskin. Hibah Sanitasi yang diusulkan untuk sambungan saluran limbah dan fasilitas komunal setempat bagi warga miskin sudah sesuai dengan rekomendasi ODE ini.

2.1.7 Keterlibatan bersama dengan mitra pembangunan

Komponen sanitasi WSI dibentuk oleh berbagai pandangan instansi mitra Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan yang melaksanakan program pembangunan sanitasi untuk Pemerintah Indonesia. Diskusi awal dengan Pemerintah Indonesia mengidentifikasi bantuan dalam penyusunan rencana investasi air limbah sebagai prioritas pertama. Pemerintah Indonesia melihat ini sebagai mekanisme untuk mendapatkan dana eksternal untuk mewujudkan program pembangunannya yang ambisius.

Keterlibatan terus menerus telah dilakukan bersama DJCK dan Bank Dunia dalam penyusunan PAMSIMAS, lalu dalam pembentukan Dana “Trust Fund” PAMSIMAS untuk menyediakan bantuan teknis dan hibah desa pelengkap untuk sekitar 100 desa.

Pengembangan program WSI menyertakan konsultasi erat dengan DJCK dan Bank Dunia untuk menentukan besaran dan lokasi sasaran bantuan, juga aspek penyusunan program yang penting untuk memastikan pembayaran dalam jangka waktu WSI.

---

[27] *Independent Evaluation of Australian Aid to Water Supply and Sanitation Services, Indonesia Draft Country Working Paper, March 2009*.

Keterlibatan dalam Hibah Air Minum telah membawa lebih banyak pemangku kepentingan dan instansi pelaksana Pemerintah Indonesia. Keterlibatan ini dimulai lebih awal dengan disain Hibah Air Minum melalui program WASAP(I) Bank Dunia, yang hasil evaluasinya menjadi pemicu utama untuk proyek IDPL Bank Dunia tahap ketiga. Para pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia meliputi Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan DJCK-PU. Pemakaian mekanisme Hibah memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan pinjaman dari MDB sebagai hibah untuk PEMDA, jadi menghilangkan hambatan waktu pada dana eksternal untuk sektor air minum dan sanitasi. Minat Bank Dunia dan ADB sangat besar pada aplikasi model AusAID yang memungkinkan pinjaman ADB dialihkan ke pemerintah daerah sebagai hibah untuk program pembangunan sanitasi. Kerjasama erat dengan AusAID dan mitra-mitra pembangunan telah dimulai terkait aspek ini dan terus berlanjut. Revisi terkini yang dilakukan pada peraturan Pemerintah Indonesia akan membuat proses ini menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, karena memungkinkan hibah berbasis luaran dan pembiayaan hibah konvensional untuk diberikan melalui mekanisme Hibah.

Keterlibatan lebih resmi bersama Pemerintah Indonesia dalam komponen air minum dan sanitasi akan dilakukan melalui Dewan IndII karena program WSI dilaksanakan melalui IndII menurut *"Subsidiary Agreement"* yang ada. Tabel dibawah menjelaskan tingkat keterlibatan para mitra pembangunan.

Tabel 11: Keterlibatan bersama mitra pembangunan – komponen sanitasi WSI

	Perluasan saluran air limbah Banjarmasin dan Surakarta	Rencana Investasi Air Limbah
Kemitraan		
Mitra Utama	Pemerintah Indonesia	Pemerintah Indonesia
Pemangku Kepentingan	DJCK, BAPPENAS, PEMDA	DJCK, BAPPENAS, PEMDA
Pelaksanaan		
Metode pelaksanaan	Penerusann hibah via anggaran Pemerintah Indonesia	AusAID melaksanakan T/A melalui kontrak langsung konsultan
Tipe perjanjian	Pekerjaan perluasan via *perjanjian penerusan hibah* dengan PEMDA.	Tercakup dalam SA yang ada
Dokumen disain	Disain Pemerintah Indonesia oleh konsultan nasional dan kajian oleh konsultan internasional	Disain oleh konsultan lokal dan internasional
Sumberdaya		
Sumberdaya tambahan		Pemilihan kota, dan penyusunan lingkup kerja dan ToR oleh konsultan IndII.
	Supervisi	
Jangka Waktu		
Q4 *Okt-Des 2009*	Kajian disain lengkap, termasuk analisis dampak lingkungan dan revisi biaya	Dialog dengan Pemerintah Indonesia (DJCK, BAPPENAS) dan PEMDA. Menyepakati pembagian biaya dan pengaturan pelaksanaan

	Perluasan saluran air limbah Banjarmasin dan Surakarta	Rencana Investasi Air Limbah
	Evaluasi melalui "Peer Review"	
Q1 *Jan-Mar 2010*	Penanda-tangan perjanjian penerusan hibah Konstruksi dimulai	Pemilihan konsultan
Q2 *Apr-Jun 2010*	Konstruksi	Studi dimulai
Q1 *Jan-Mar 2011*	Verifikasi sambungan dan pembayaran hibah	Studi selesai

2.1.8 Dasar pemikiran pencatuman kedalam WSI

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak prakarsa untuk menjalankan peningkatan air minum dan sanitasi secara ektensif. Sebagian besar prakarsa ini bergantung pada komitmen masyarakat donor untuk membantu program. Tujuan strategi Pemerintah Indonesia sangat cocok dengan tujuan ausAID untuk WSI dan rekomendasi ODE untuk layanan air minum dan sanitasi di Indonesia. Selain itu, selama diskusi untuk merumuskan program WSI, Pemerintah Indonesia menyatakan lebih suka pada penyediaan studi infrastruktur air limbah dan investasi untuk saluran air limbah yang bisa ditawarkan ke masyarakat donor untuk pendanaannya. Komponen sanitasi WSI ditujukan untuk ini, karena mempertimbangkan bahwa peningkatan pengelolaan dan pengolahan limbah manusia di kawasan perkotaan akan membawa manfaat kesehatan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan kesehatan lingkungan akan membuat kelompok masyarakat yang rentan merasakan manfaatnya, seperti warga miskin, balita, orang tua dan orang cacat atau berpenyakit kronis.

Tabel 12: Sanitasi WSI dalam kaitannya dengan program mitra

Sanitasi WSI	Pemerintah Indonesia dan Program Mitra	Penjelasan
• Rencana investasi untuk **sistim saluran air limbah** di lima kota • Perluasan saluran air limbah untuk **Banjarmasin** dan Surakarta, hingga 10.000 sambungan.	• Memperbanyak jumlah kota yang memiliki saluran air limbah, dari 11 menjadi 15. • Memperluas cakupan saluran air limbah di 15 kota, hingga 20 persen	• Penyusunan rencana investasi yang bisa dipakai untuk mendapatkan dana dari IFI, dan penyediaan layanan untuk rumah-tangga miskin. • Memberikan hibah untuk Banjarmasin dan Surakarta untuk memperluas sistim saluran air limbah hingga 10.000 sambungan dengan perkiraan 60% rumah-tangga miskin akan tersambung di kawasan pelayanan.

2.1.9 Menangani tujuan WSI

Tabel 4 (bab 1.2.2) menunjukkan bagaimana program yang diusulkan menangani setiap tujuan WSI, yakni: memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi; membuat layanan air minum dan sanitasi menjadi lebih berkelanjutan melalui reformasi sektor dan peningkatan kapasitas; meningkatkan kesehatan kesehatan dan mutu kehidupan warga miskin dan rentan dengan jalan meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan memperluas akses

mereka ke layanan air minum dan sanitasi; dan meningkatkan efektivitas bantuan dan melengkapi program pembangunan dari lembaga lain.

2.2 DESKRIPSI KOMPONEN SANITASI WSI

Bantuan untuk program sanitasi Pemerintah Indonesia ditujukan untuk infrastruktur sanitasi perkotaan. Bantuan WSI terdiri dari dua komponen:

(a) Hibah Sanitasi bagi pemerintah daerah Banjarmasin dan Surakarta untuk layanan baru hingga mencapai 10.000 rumah-tangga, melalui campuran saluran air limbah dan sanitasi komunal setempat; dan

(b) Bantuan dalam penyusunan rencana investasi saluran air limbah untuk lima (5) kota untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Hibah Sanitasi akan mengikuti prosedur pelaksanaan yang sama seperti yang dipakai untuk Hibah Air Minum. Prosedur ini dijelaskan kembali di bab ini dengan penekanan pada perbedaannya dengan proses Hibah Air Minum.

2.2.1 Sistim Saluran Air Limbah Banjarmasin

Sistim saluran air limbah Banjarmasin dibangun melalui Proyek Pembangunan Perkotaan Kalimantan yang didanai oleh Bank Dunia dari 1995 hingga 2002; sistim air limbah ini semula dioperasikan oleh PDAM. Pada tahun 2006, pemerintah daerah membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PDPAL) yang merupakan satu-satunya perusahaan air limbah di luar Jakarta, lalu mengalihkan aset sistim air limbah ke PDPAL dan memberikan penyertaan modal PDPAL untuk memperluas sistim. Sistim ini melayani kawasan tangkapan air di utara dengan 2.000 sambungan, dan kawasan tangkapan tengah dengan 1.200 sambungan. PDPAL telah menyusun program rinci untuk memperluas sistim sebanyak 15.000 sambungan, dan masih ada kapasitas tak-terpakai di kawasan tangkapan air utara dan tengah, walaupun saluran pengumpul belum diperpanjang untuk memasok instalasi pengolahan.

IndII telah mempekerjakan konsultan28 untuk mengevaluasi kapasitas dan kinerja sistim saluran air limbah yang ada dan dioperasikan oleh PDPAL, juga kesiapannya untuk melaksanakan program perluasan WSI di tahun 2010. Konsultan tersebut melaporkan bahwa PDPAL bisa melaksanakan hingga 4.600 sambungan ke sistim saluran limbah yang ada, dengan perluasan kecil ke jaringan saluran limbah yang ada. PDPAL juga telah mengidentifikasi dan menyusun program untuk 1000 rumah-tangga yang akan dilayani oleh sistim setempat dengan mengikuti model SANIMAS Pemerintah Indonesia. Komponen ini mengikuti rekomendasi dari strategi sanitasi kota yang disusun melalui ISSDP, tapi lebih menekankan saluran air limbah. Lingkup pekerjaan konsultan telah diperluas dengan mencantumkan disain dan spesifikasi perpanjangan saluran limbah yang baru. Ringkasan laporan konsultan ini bisa dilihat di Lampiran 10. Evaluasi sistim saluran limbah oleh konsultan menunjukkan bahwa masih ada infiltrasi pada sistim saluran limbah yang mengakibatkan berkurangnya tekanan air limbah pada tempat tujuan akhir di instalasi pengolahan. Sumbernya telah diidentifikasi, yakni sambungan rumah yang tidak dibuat dengan baik dan penutup lobang orang. Sumber infiltrasi lainnya adalah kerusakan pada struktur lobang orang dan sambungan pipa yang tidak dipasang dengan baik. Konsultan dipertahankan agar bisa membantu dalam langkah-langkah

[28] PT Mott MacDonald International

perbaikan untuk masalah ini, penyusunan disain dan spesifikasi saluran lateral untuk sambungan baru, serta analisis kapasitas PDPAL untuk mengoperasikan dan merawat sistim saluran air limbah. Analisis konsultan MMI mengenai kapasitas PDPAL dalam mengelola sistim saluran limbah akan menjadi dasar bantuan teknis terpisah yang didanai oleh IndII (lihat bab 2.2.3). Analisis pendahuluan mengenai kapasitas PDPAL dalam mengelola sistim saluran limbah, menunjukkan kelemahan teknis, keuangan dan kelembagaan. Namun para aparat pemerintah daerah sangat mendukung peningkatan sistim saluran air limbah dan secara konsisten menanam modal untuk memperluas aset PDPAL.

Saat ini PDPAL mengumpulkan ongkos pengguna dari rumah-tangga yang telah tersambung, dengan nilai 25% dari nilai tagihan air minum. Nilai ini bisa menutup biaya operasi dan perawatan sistim dan memulihkan sebagian biaya depresiasi. Pemerintah daerah telah memiliki draf pertaturan sebelum DPRD meminta sambungan wajib ke sistim saluran air limbah dimana jaringan saluran sudah terpasang. PDPAL mempunyai kebijakan untuk ongkos sambungan (concessionary) bagi warga miskin. Kebijakan ini memungkinkan sambungan gratis dan pembebasan ongkos pengguna selama enam bulan pertama.

2.2.2 Sistim Saluran Air Limbah Surakarta

Sistim saluran air limbah Surakarta dibangun selama 1995-2001 sebagai bagian dari Proyek Pembangunan Perkotaan Semarang Surakarta yang didanai oleh Bank Dunia. Sistim saluran air limbah ini terdiri dari dua kawasan tangkapan air limbah yang dialirkan ke dua instalasi pengolahan dengan kapasitas 84 l/det, 12 km saluran utama dengan diameter 600 mm hingga 1300 mm, dan saluran sekunder dan lateral dengan diamter 300 mm hingga 500 mm. Sistim saluran air limbah ini melayani 10.800 sambungan. PDAM bertanggung-jawab atas operasi sistim air limbah ini dan membentuk divisi air limbah dan direktur teknis sebagai bagian organisasinya.

Tim penyusunan WSI telah melakukan survei pada sistim Surakarta untuk menaksir kecocokan untuk perluasan. Laporan analisis sistim ini disajikan di Lampiran 11. Analisis ini menemukan bahwa kondisi Surakarta lebih mendukung jika dibandingkan dengan Banjarmasin, baik untuk kontruksi, operasi dan perawatan saluran air limbah. Secara keseluruhan komponen sistim yang ada bisa berfungsi walaupun modifikasi baru-baru ini pada instalasi aktivasi endapan tinja di Semanggi malah menimbulkan masalah lain. WWTP Semanggi diperbaharui pada tahun 2008 melalui penambahan tangki aerasi dan aktivasi endapan tinja yang memiliki kapasitas lebih tinggi sebesar 30 l/detik atau setara untuk 6.000 sambungan. Saluran interseptor dan saluran utama mempunyai kapasitas total untuk 25.000 sambungan.

Sistim saluran air limbah Surakarta tidak memiliki stasiun pompa jadi bergantung pada daya tarik bumi untuk mengumpulkan dan mengalirkan air limbah ke instalasi pengolahan air limbah (WWTP). Karena kawasan tangkapan Semanggi masih sedikit terbebani, maka PDAM menggelontor saluran utama dengan jalan menyesuaikan pintu air agar air dari tiga aliran mengalir melewati pusat kota lalu ke saluran utama. Saluran utama dengan diameter 600 mm lalu ditingkatkan menjadi 1.000 mm dibangun selama era Belanda sebagai saluran pengumpul untuk pembuangan. Saluran ini menggabungkan pengumpulan limbah dan pengelontoran yang mengambil air drainase dari sungai kecil dan kawasan genangan lalu membuangnya di sungai Bengawan Solo di hulu kota. Ini dilakukan setiap hari. Data dari analisis mengenai air limbah baku di saluran masuk (*intake*) instalasi pengolahan, menunjukkan bahwa penipisan (*dilution*) karena limbah dan mungkin infiltrasi telah mengurangi kekuatan air limbah. Sistim Surakarta berada di bawah beban infiltrasi yang rendah karena permukaan air tanah lebih rendah daripada Banjarmasin dan tidak ada pengaruh air pasang dan banjir lokal. Selain itu, operasi instalasi endapan tinja aktivasi oleh PDAM tidak mengikuti prosedur umumnya untuk daur ulang endapan tinja aktivasi, sehingga mengakibatkan konsentrasi endapan tinja aktivasi di tangki aerasi. Konsultan[26] yang diperkerjakan untuk Banjarmasin juga

memberikan kajian disain serta peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk staf PDAM untuk menjalankan prosedur pengelontoran saluran yang benar dan operasi instalasi pengolahan secara tepat.

2.2.3 WSI Assistance for Sanitation and Sewerage Expansion

WSI akan membantu pemerintah Banjarmasin dalam membangun 3.600 sambungan dari 15.000 sambungan baru yang diusulkan untuk perluasan sistim saluran air limbah Banjarmasin. WSI juga akan membantu penyediaan fasilitas sanitasi komunal setempat oleh pemerintah daerah untuk 1.500 rumah-tangga miskin yang tidak bisa dilayani oleh sistim saluran air limbah, yakni dengan mengikuti disain SANIMAS.

WSI akan membantu pemerintah kota Surakarta dalam menyediakan 4.000 sambungan rumah tambahan ke sistim saluran limbah yang ada dengan jalan memperluas jaringan saluran sekunder dan lateral dan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan yang ada. WSI juga akan membantu penyediaan fasilitas sanitasi komunal setempat oleh pemerintah daerah untuk 1.500 rumah-tangga miskin yang tidak bisa dilayani oleh sistim saluran air limbah, yakni dengan mengikuti disain SANIMAS.

Bantuan untuk pemerintah kota ini akan diberikan dalam bentuk Hibah Sanitasi untuk pemerintah kota pada saat perluasan yang diusulkan selesai dilaksanakan. Bentuk bantuan ini akan mengikuti prosedur yang sama seperti yang dipakai untuk Hibah Air Minum untuk menyalurkan hibah ke pemerintah daerah. Nilai hibah adalah Rp. 5 juta (AUD 600) per sambungan yang berfungsi ke saluran air limbah, dan Rp. 2 juta (AUD 240) untuk setiap sambungan rumah-tangga miskin yang dilayani oleh sistim setempat.

Komponen hibah sanitasi WSI juga menyertakan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk PDPAL Banjarmasin dan staf PDAM yang bertanggung-jawab mengoperasikan sistim saluran air limbah, lihat bab 2.11 untuk lebih jelasnya.

2.2.4 Tujuan Komponen Sanitasi WSI

Tujuan komponen sanitasi ini disesuaikan dengan sasaran dan tujuan keseluruhan WSI untuk memperluas akses ke layanan sanitasi bagi warga miskin. Secara khusus, komponen sanitasi ini akan membantu pemerintah kota Banjarmasin dalam mewujudkan 15.000 sambungan saluran air limbah yang ditargetkan dan pemerintah kota Surakarta dalam memasang 6.000 sambungan yang ditargetkan.

- ***Peningkatan Akses ke Sanitasi***

  Tujuan komponen Hibah Sanitasi WSI adalah untuk membantu penyediaan layanan sanitasi bagi total 10.000 rumah-tangga di Banjarmasin dan Surakarta, dari jumlah ini sekitar 5.000 adalah rumah-tangga miskin. Ini akan diwujudkan melalui kombinasi sambungan saluran limbah langsung dan fasilitas komunal setempat. Sambungan saluran limbah langsung adalah untuk campuran warga miskin (MBR) dan non-MBR, sedangkan sistim komunal khusus hanya untuk rumah-tangga miskin.

- ***Peningkatan Efektivitas Bantuan***

  Penerapan dan penerimaan pemerintah daerah terkait mekanisme penerusan hibah sebagai instrumen Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan program sanitasi, akan meningkatkan pelaksanaan bantuan untuk komponen sanitasi karena menyediakan saluran untuk MDB dan

donor bilateral agar bisa memberikan dana untuk sektor ini. Komponen ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan tata-kelola yang ditunjukkan di sektor sanitasi dan bantuan langsung untuk sektor ini melalui mekanisme yang berkelanjutan.

- ***Dukungan untuk Tujuan Pemerintah Indonesia***

  Komponen ini secara langsung mendukung strategi sanitasi Pemerintah Indonesia yang mentargetkan 20 persen cakupan layanan saluran limbah hingga akhir 2014. Pencatuman sistim komunal dalam sistim saluran air limbah juga secara langsung mendukung *Road Map* Pemerintah Indonesia. Sistim komunal nantinya akan tersambung ke sistim saluran air limbah, dengan demikian mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan efisiensi penyediaan layanan sanitasi.

- ***Pelaksanaan melalui Sistim Pemerintah Indonesia***

  Bantuan akan dilaksanakan melalui mekanisme Pemerintah Indonesia yang ada. Pemerintah daerah merancang perluasan saluran limbah dengan memakai dana dan prosedur perencanaan mereka sendiri. Pelaksanaan perluasan ditunjang oleh dana pendamping dari Pemerintah Indonesia dan dana pemerintah kota Banjarmasin, dengan memakai mekanisme alokasi anggaran. Bantuan WSI akan disalurkan melalui anggaran Kementerian Keuangan ke pemerintah kota yakni dengan memakai mekanisme penerusan hibah untuk pemerintah daerah. Pemerintah kota Banjarmasin akan menanda-tangani perjanjian penerusan hibah dengan Kementerian Keuangan yang menetapkan ketentuan bantuan. Pelaksanaan akan mengikuti petunjuk pelaksanaan dari DJCK untuk penerusan hibah bagi program sanitasi pemerintah daerah.

2.2.5 Disain Hibah Sanitasi WSI

Disain bantuan untuk pemerintah kota Banjarmasin dan Surakarta mengikuti disain umum Hibah Air Minum; disain ini bersifat berbasis luaran dan bantuan menuju langsung ke pemerintah daerah. Seperti halnya Hibah Air Minum, hibah sanitasi memerlukan kontribusi penyertaan modal dari PEMDA untuk otoritas pengoperasi sistim air limbah lokal. Nilai hibah yang diberikan di Tabel 13 sudah dibahas dan diterima oleh pemerintah pusat. Hibah ini lebih tinggi daripada Hibah Air Minum, yang mencerminkan tingginya biaya untuk infrastruktur air limbah. Karena Hibah Sanitasi ditujukan untuk sistim saluran air limbah yang ada, maka pengaturan pembiayaan untuk saluran limbah baru belum dipelajari secara rinci untuk memungkinkan penerapan mekanisme “penerusan” hibah. Aspek ini akan dipelajari dalam komponen Rencan Induk Air Limbah. Namun DJCK telah menyusun petunjuk pelaksanaan hibah sanitasi dengan mengikuti mekanisme Hibah Air Minum, agar komponen Hibah Sanitasi WSI bisa dipakai oleh Pemerintah Indonesia sebagai mekanisme yang tepat untuk menyalurkan dana eksternal ke program sanitasi Pemerintah Indonesia.

Seperti untuk prakarsa Hibah Air Minum, nilai total hibah untuk pemerintah daerah akan ditentukan oleh peningkatan jumlah sambungan layanan PDPAL/PDAM. Masih ada lingkup disain yang memungkinkan penyesuaian nilai hibah agar mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia melakukan pemetaan fiskal tahunan dari semua pemerintah daerah, dan ini bisa dipakai untuk menyesuaikan nilai hibah keatas atau kebawah, tergantung kekuatan keuangan pemerintah daerah tertentu. Rincian nilai ini bisa dipakai untuk meningkatkan program oleh Pemerintah Indonesia dalam tahun-tahun berikutnya.

Mekanisme prosedural Hibah Sanitasi akan mengikuti mekanisme Hibah Air Minum. Pemerintah daerah akan menanda-tangani “perjanjian penerusan hibah” dengan Kementerian Keuangan, dan perjanjian ini menetapkan persyaratan hibah dan target peningkatan cakupan layanan yang akan dibantu oleh hibah. Perjanjian hibah ini juga akan menjelaskan parameter pelaksanaan dan daerah dimana peningkatan sambungan layanan akan dilaksanakan. Setelah perjanjian ditanda-tangani,

Badan Pelaksana akan melakukan survei dasar di kawasan yang ditentukan sebagai lokasi perluasan yang diusulkan. Urutan kegitan mengikuti penjelasan mengenai proses Hibah Air Minum di Bab 1.2.3.

2.2.6 Penetapan Sasaran Rumah Tangga Miskin

Penetapan rumah-tangga miskin sasaran untuk komponen perluasan saluran air limbah, mengikuti pendekatan umum yang sama seperti untuk Hibah Air Minum, dengan beberapa pengecualian. Pertama, kawasan perluasan telah ditentukan dalam disain perluasan sistim. Kedua, karena saluran air limbah bergantung pada gaya tarik bumi, maka sulit untuk melakukan konfigurasi sistim untuk bisa menjangkau kantung-kantung kemiskinan. Karena itu, penetapan rumah-tangga miskin sasaran dalam komponen air limbah akan dimulai dengan survei dasar untuk menentukan rumah-tangga miskin, yang tidak tersambung ke sistim saluran limbah dan yang memenuhi kriteria kemiskinan seperti ditetapkan dalam perjanjian penerusan hibah. Lalu komponen saluran air limbah akan diarahkan untuk menyambung 50% rumah-tangga miskin yang telah ditentukan ke perluasan sistim saluran limbah.

Namun, rumah-tangga sasaran untuk sistim komunal setempat, yang akan dibantu melalui komponen ini, harus memenuhi semua ktiteria kemiskinan.

2.2.7 Perkiraan Biaya Hibah Sanitasi

Perkiraan biaya perluasan yang diusulkan diberikan di Tabel 13 dibawah. Perkiraan ini dihitung secara terpisah dan telah disilang-periksa dengan perkiraan biaya disain dari PEMDA.[29]

Tabel 13 Perkiraan Biaya Hibah Sanitasi

Perkiraan Biaya Perluasan Sistim Saluran air Limbah untuk 5.000 Sambungan		
Komponen Sistim Saluran Air Limbah	**Biaya / Sambungan (Rp. Juta)**	**Biaya (Rp. Miliar)**
Instalasi Pengolahan Air Limbah	7	35
Stasiun Pengungkit (*Lifting*)	1	5
Saluran Utama	3	15
Saluran Lateral	6.4	32
Sambungan Rumah & IC	2	10
Total	19.4	97
Hibah WSI		25
Hibah WSI sebagai % dari Biaya Investasi		21%

[29] Asumsi perkiraan biaya ini adalah: permukaan tanah relatif datar dan penggalian dengan kedalaman terbatas, jadi mewakili biaya rata-rata pemasangan yang biosa berbeda-beda untuk kawasan tertentu. Kurangnya data mengenai biaya kontruksi yang umumnya berlaku, mengurangi akurasi perkiraan komponen pekerjaan sipil.

Rata-Rata		
Hibah WSI sebagai % dari Biaya Bertahap (*Incremental*)		60%
Perkiraan Biaya Saluran Air Limbah Komunal untuk 1.000 Rumah-Tangga Miskin		
Komponen Sistim Komunal	**Biaya (Rp. Juta)**	**Biaya / Sambungan (Rp. Juta)**
Pipa Pengumpul & IC	206	2
Tangki Kolektor	146	1.5
Total	351	3.5
Hibah WSI	200	2
Hibah sebagai % dari Biaya Investasi		57%

2.2.8 Dampak Lingkungan dan Sosial

Diharapkan tidak terjadi dampak buruk karena instalasi pengolahan sudah beroperasi dan memenuhi standar mutu air buangan lingkungan (*effluent*) dari Pemerintah Indonesia.[30] Meski begitu, perlu menerapkan tingkat pengolahan yang lebih tinggi agar mencapai mutu air buangan yang bisa diterima. Pemasangan jaringan saluran limbah diharapkan tidak menimbulkan risiko lingkungan, karena jaringan ini akan diletakkan dibawah fasilitas umum seperti jalan. Gangguan muingkin timbul selama kegiatan kontruksi, tapi ini bisa dikurangi. Manfaat lingkungan dari sistim saluran air limbah di Banjarmasin, yang banyak memiliki jalur air untuk transportasi, rekreasi dan wisata, akan lebih besar daripada ganguan yang berlangsung hanya sebentar. Demikian juga, Surakarta adalah kota berpenduduk padat dengan alternatif terbatas untuk sanitasi setempat. Sebagai pusat wisata, kota ini akan mendapatkan banyak manfaat dari pembangunan sistim saluran air limbah yang layak dan berkelanjutan.

2.2.9 Survei Dasar dan Verifikasi

Survei dasar dan verifikasi akan mengikuti prosedur untuk Hibah Air Minum dan akan memakai konsultan yang sama.

2.2.10 Kesadaran Kemiskinan dan Isu Jender

Demikian juga, aspek ini akan mengikuti prosedur Hibah Air Minum. Konsultan dasar akan membantu penguatan aspek kemiskinan dan isu jender oleh PEMDA/PDPAL/PDAM.

2.2.11 Pengaturan Pelaksanaan

[30] *World Bank Implementation Completion Report 25720-ID, 24 June 2003*.

Seperti untuk Hibah Air Minum WSI, perluasan saluran air limbah Banjarmasin dan Surakarta akan dikelola melalui IndII untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumberdaya yang tersedia di AusAID Jakarta dan pengaturan yang ada bersama Pemerintah Indonesia. Biaya pelaksanaan WSI telah dicantumkan dalam anggaran WSI. Sumberdaya dan anggaran untuk mengelola WSI akan dipadukan kedalam kontrak IndII yang ada, melalui perubahan kontrak yang sesuai. Perjanjian Pemerintah Indonesia dan GoA untuk pelaksanaan Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi WSI akan dicantumkan dalam Pengaturan Tambahan IndII melalui pertukaran surat dengan Pemerintah Indonesia.

2.2.12 Pelaksanaan Komponen Sanitasi

Komponen untuk meningkatkan cakupan saluran air limbah kota Banjaramasin akan menyertakan perluasan sistim saluran limbah yang ada, yang menghasilkan sambungan saluran limbah ke rumah-tangga, dan menyediakan fasilitas sanitasi setempat untuk keluarga miskin. Komponen ini akan dilaksanakan dengan memakai mekasnisme yang sama seperti untuk Hibah Air Minum, dengan penyesuaian pada nilai hibah. Pelaksanaan program Hibah Sanitasi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan DJCK sebagai Badan Pelaksana. Pelaksanaan akan memaatuhi peraturan Pemerintah Indonesia yang ada untuk pemakaian dana hibah melalui anggaran Pemerintah Indonesia, dan transfer dana hibah ke pemerintah daerah peserta.31 Koordinasi dan pengawasan dua program Hibah WSI ini akan dilakukan melalui Dewan IndII dan Tim Teknis WSI yang dibentuk untuk mengkaji komponen WSI.

Dana Hibah Sanitasi akan ditempatkan di anggaran nasional Pemerintah Indonesia dan disimpan di rekening khusus Kementerian Keuangan. Pemakaian dana ini dikenai ketentuan perjanjian hibah terpisah dan surat pembayaran yang menyatakan keharusan pengembalian dana yang tak-terpakai ke GoA. Dana akan disalurkan ke pemerintah daerah peserta sesuai prosedur yang ditentukan dalam perjanjian penerusan hibah antara Kementerian Keuangan dan masing-masing pemerintah daerah. Prosedur pelaksanaan Hibah Sanitasi WSI akan mengikuti prosedur Hibah Air Minum: untuk kedua program ini, kelanjutan dan keseragaman praktek dan prosedur akan dipastikan dari keterlibatan DJCK sebagai badan pelaksana.

2.2.13 Bantuan Teknis Pendukung Kegiatan

Komponen saluran air limbah Banjarmasin dan Surakarata disiapkan dan dimulai dengan bantuan konsultan kajian disain, yang dipekerjakan melalui IndII. Konsultan kajian disain akan menganalisis mutu teknis disain dan melaporkan potensi untuk menyerap kombinasi 10.000 sambungan saluran limbah dan fasilitas sanitasi setempat. Konsultan ini dimobilisasi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Konsultan kajian telah melaporkan masalah penting terkait operasi sistim Banjarmasin, karena kontur tanah yang datar dan tingginya permukaan air tanah. Kajian konsultan ini telah menyusun rekomendasi untuk peningkatan kapasitas personil otoritas air limbah, dan penyempurnaan prosedur operasi. Rekomendasi untuk Surakarta sama untuk peningkatan kapasitas tapi agak berbeda operasi air limbah menjadi bagian dari organisasi otoritas air minum (PDAM). Penekanan prosedur operasi difokuskan lebih banyak pada operasi instalasi pengolahan endapan tinja aktiviasi, daripada pengendalian infiltrasi.

---

[31] Peraturan Menteri Keuangan 168 dan 169 tahun 2008 mengenai transfer hibah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Pelaksanaan komponen Hibah Sanitasi Banjarmasin dan Surakarta akan dibantu oleh konsultan teknis khusus untuk melaksanakan komponen peningkatan kapasitas, akan menyertakan pengawasan pekerjaan kontruksi untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan disain dan praktek teknis yang bagus, dan akan membantu dalam pemakaian prosedur operasi dan pengelolaan sistim yang lebih bagus.

Komponen peningkatan kapasitas dalam bantuan yang diusulkan akan difokuskan pada: (i) operasi dan perawatan saluran air limbah; (ii) operasi dan perawatan WWTP; (iii) prosedur keamanan saluran air limbah; (iv) pemantauan, analisis dan pencatatan mutu air limbah; dan (v) sistim pengelolaan, pencatatan pelanggan dan operasi usaha. Mungkin nanti ada kasus dimana sumberdaya IndII harus dipakai untuk mendanai: (a) survei mengenai bagian-bagian sistim Banjaramasin, yang menurut pemetaan telah dilaporkan hilang; dan (b) investasi yang sangat kecil untuk, misalnya, saluran pengukur aliran, peralatan laboratorium dan alat uji yang bisa dibawa.

Komponen peningkatan kapasitas juga akan menyertakan pengembangan kemampuan untuk perumusan kebijak, strategi penetapan harga layanan termasuk subsidi, penetapan tarif dan mekanisme pemulihan biaya.

2.2.14 Jadual Pelaksanaan

Jadual pelaksanaan ditunjukkan di Lampiran 9. Jadual ini akan mengikuti jadual Hibah Air Minum yang disajikan di Tabel 14, Bab 2.3.6. Seperti disebutkan sebelumnya, konsultan kajian disain untuk Banjarmasin telah dimobilisasi sejak 19 Oktober 2009.

2.3 RENCANA INVESTASI AIR LIMBAH – LIMA KOTA

Saat ini cakupan saluran air limbah masih terbatas pada sebelas kota,[32] dengan berbagai ukuran cakupan layanan; secara umum, cakupan layanan masih dibawa dua persen dari populasi perkotaan. *Sanitation Road Map* dari Pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan jumlah kota yang memiliki saluran air limbah, dari sebelas hingga enambelas kota hingga 2014. *Road Map* ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan sistim saluran air limbah di kota-kota tersebut hingga mencapai 20%. Komponen sanitasi WSI mengusulkan penyusunan rencana investasi di lima kota tersebut, sebagai bagian tujuan *Sanitation Road Map* dari Pemerintah Indonesia.

Pengembangan rencana investasi saluran air limbah "*bankable*", merupakan prioritas Pemerintah Indonesia yang jelas. Ini adalah pilihan pertama dari menu kemungkinan intervensi di sektor sanitasi secara umum, dan prioritas ini diperkuat selama proses identifikasi dan disain oleh WSI. Alasan untuk ini adalah prioritas tinggi yang telah diletakkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan dalam kebutuhan infrastruktur saluran air limbah di kawasan metropolitan dan kota besar dengan kepadatan tinggi. Kurangnya infrastruktur air limbah dan pengolahan air limbah di lingkungan perkotaan telah mencapai tahap dimana pemerintah pusat secara aktif mencari bantuan donor dan mengalokasikan sumberdaya nasional untuk pembangunan infrastruktur sanitasi.

Sebagian, ini didorong oleh prakarsa peraturan perundang-undangan yang lebh jelas, yang memungkinkan transfer hibah ke pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan untuk menutup

[32] Jakarta, Medan, Cirebon, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Surakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Prapat

kekurangan infrastruktur air limbah. Penting artinya bahwa mekanisme kelembagaan dan pembiayaan yang dipakai untuk membiayai infrastruktur saluran air limbah dan memperkuat otonomi daerah, melibatkan pemerintah daerah sebagai peserta utama dalam perluasan infrastruktur melalui rasa memiliki dan komitmen dengan dukungan finansial dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat.

Isu ini penting bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur saluran air limbah dan mendapatkan komitmen IFI untuk membiayai pembangunan saluran air limbah.

2.3.1 Pemilihan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan komponen rencana investasi saaluran air limbah akan berlangsung setelah proses penyaringan dan pemilihan calon kota penerima rencana investasi ini. Kriteria wajib adalah komitmen dari PEMDA, yang disetujui oleh DPRD untuk memulai pelaksanaan dengan saling berbagi biaya yang disepakati bersama pemerintah pusat. Komitmen ini adalah pendahulu perjanjian penerusan hibah dengan memakai mekanisme PMK 168. Penyaringan danpemilihan awal lima kota sedang dilakukan sebagai bagian kegiatan IndII yang terpisah, yang akan menghasilkana pemilihan akhir lima kota dari daftar calon sebanyak 17 kota.

2.3.2 Mendapatkan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan

Salah satu ketentuan penting dalam perjanjian tersebut adalah komitmen dana anggaran dari PEMDA dalam tahun-tahun pelaksanaan proyek. Walau ini tidak bisa dijamin, proses pemilihan menyertakan komitmen tertulis dari walikota / bupati, juga dari DPRD. Dengan kerangka kerja seperti ini, Bank Pembangunan Multi-lateral (MDB) bisa memulai penyusunan proyek, evaluasi dan perundingan pinjaman. Yang lebih penting, kerangka kerja ini akan menjadi dasar untuk pendanaan AusAID di masa depan untuk infrastruktur saluran air limbah di kota-kota terpilih.

Sebagai bagian dari rencana investasi, PEMDA akan menanda-tangani perjanjian dengan pemerintah pusat untuk membiayai porsi investasi yang disepakati. Pemerintah pusat akan memenuhi kewajibannya melalui dana anggaran nasional atau dana eksternal dari hibah atau pinjaman. Selama penyusunan rencana investasi, Pemerintah Indonesia bisa melibatkan Bank Dunia, ADB, JICA, atau IFI lain untuk mendapatkan hibah atau pinjaman untuk investasi ini.

2.3.3 Isu Pro Warga Miskin dan Jender

Untuk memastikan layanan bagi rumah-tangga miskin didalam rencana induk, akan dilakukan analisis tentang tingkat dan karakteristik kemiskinan di kawasan program yang diusulkan, dengan identifikasi hambatan pada partisipasi masyarakat miskin dan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi warga miskin dan rentan. Pengumpulan data akan memakai data primer kualitatif dan sekunder kuantitatif. Rumah-tangga miskin akan diidentifikasi dan dicantumkan dalam peta rencana investasi. Akan diberikan juga berbagai opsi teknis yang tepat untuk penyediaan layanan secara lokal, yang nantinya akan tersambung ke jaringan saluran limbah. Hasil analisis kemiskinan dan pemaduan layanan bagi warga miskin kedalam rencana investasi, akan disebar-luaskan dalam lokakarya bersama PEMDA yang diselenggarakan oleh konsultan.

2.3.4 Pelaksanaan oleh WSI/IndII

Tidak seperti komponen WSI lainnya, rencana investasi saluran air limbah akan disusun oleh konsultan yang dipekerjakan dibawah WSI dengan memakai rekening pra-pembayaran (*imprest account*). Pemerintah Indonesia akan banyak dilibatkan dalam proses pemilihan lima kota melalui Tim Teknis Pembangunan sanitasi (TTPS). [33] Pemerintah Indonesia juga akan disertakan dalam proses seleksi konsultan, dan TTPS dan wakil dari setiap PEMDA akan diberi kesempatan untuk mengkaji usulan konsultan dan menyatakan pendapat mereka. Selama proses pelaksanaan secara bertahap, semua pemangku kepentingan akan disertakan dalam pengembangan rencana dan usulan pembiayaan. Secara khusus, proses ini akan melibatkan konsultasi erat dengan Pemerintah Indonesia, MDB dan PEMDA. Gambaran umum Kerangka Acuan (ToR) untuk penyusunan rencana investasi dicantumkan di Lampiran 14. Komponen utama rencana investasi ini akan menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat dan daerah, juga pengaturan pembiayaan. Koordinasi antara DJCK, Kementerian Keuangan dan Bappenas akan dilakukan melalui Dewan IndII. Luarannya meliputi analisis kelayakan komponen rencana induk, perkiraan biaya, analisis ekonomi dan keuangan, serta kerangka acuan untuk AMDAL dan RKL yang mempertimbangkan isu sosial, termasuk kemiskinan, jender dan kelompok rawan. Rencana akan menjelaskan pendekatan yang tepat untuk menyediaan saluran air limbah di kawasan padat penduduk dan masyarakat miskin. IndII akan bekerjasama dengan MDB untuk memasukkan rencana investasi kedalam alur pelaksanaan.

2.3.5 Hubungan Sanitasi WSI dengan Program AusAID Lainnya

Komponen ini erat kaitannya dan melengkapi insiatif “Infrastruktur untuk Pertumbuhan” yang dibantu melalui IndII. Penyusuanan rencana investasi saluran air limbah menjelaskan projek jaringan pipa untuk ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia ke lembaga pembangunan. Komponen ini merupakan pilihan pertama DJCK yang ingin mewujudkan sistim saluran air limbah baru di lima kota dalam lima tahun mendatang. Rencana investasi ini berpotensi untuk menarik intervensi AusAID di masa depan. Pencantuman komitmen PEMDA untuk menyediakan dana pendamping dan melaksanakan investasi yang diusulkan, merupaka ciri yang bisa dibankkan dari rencana ini. IndII mengusulkan pembayaran beberapa Hibah Peningkatan Infrastruktur untuk proyek PEMDA yang difokuskkan pada air limbah. Ini bisa meenjadi konsentrasi usaha dan fokus sektor pada sanitasi.

2.3.6 Jadual Pelaksanaan

Persiapan kegiatan ini telah dimulai melalui IndII, dengan melibatkan konsultan untuk menentukan PEMDA serta untuk mendapatkan komitmen untuk biaya dan pelaksanaan rencana investasi ini.

[33] Tim Teknis Pembangun Sanitasi (TTPS) komisi resmi antar-Kementerian yang bertanggung-jawab mengawasi semua program sanitasi Pemerintah Indonesia.

Tabel 14: Jadual pelaksanaan yang diusulkan

	Tahapan Pokok Kegiatan	Jangka Waktu	Tindakan
1	Penyusunan Komponen	Agu – Des 09	Kegiatan IndII untuk mengidentifikasi kota calon peserta, mendapatkan komitmen pendanaan dan menyusun lingkup kerja, dan ToR untuk rencana investasi.
2	Seleksi Konsultan	Jan – Mar 2010	Oleh WSI melalui rekening pra-pembayaran (*Imprest Account*) IndII
3	Penyusunan Rencana Investasi oleh Konsultan	Apr 2010 – Mar 2011	Dikelola oleh WSI

BAB 3: PENGATURAN PENGELOLAAN YANG DIUSULKAN

3.1 PERUBAHAN "SUBSIDIARY AGREEMENT" (*SUBSIDIARY*) FASILITAS INDII

Karena waktu yang sempit untuk melaksanakan WSI, hubungan yang erat antara WSI dan kegiatan air minum dan sanitasi yang didanai oleh fasilitas IndII dan pentingnya menekan lonjakan biaya, maka diusulkan untuk melaksanakan komponen air minum dan sanitasi WSI melalui payung yang disediakan oleh program IndII yang sedang berjalan. Ini akan memerlukan perubahan pada "Subsidiary Agreement" IndII dan kontrak AusAID dengan Kontraktor Pengelola IndII.

Gambar 1: Struktur Pelaksanaan WSI

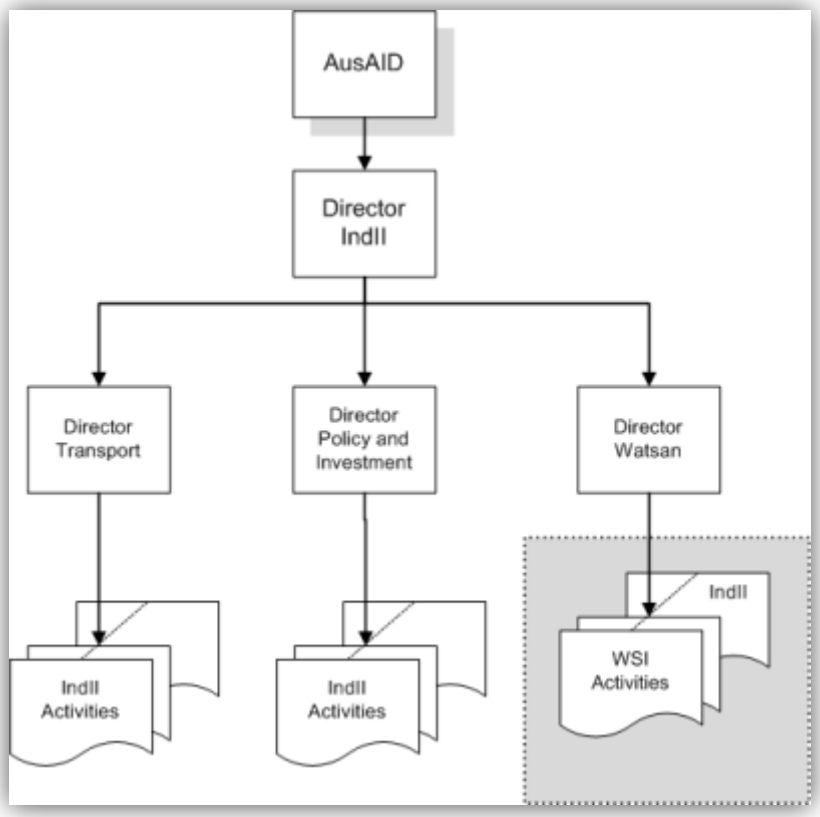

3.1.1 Pengaturan organisasi pelaksanaan WSI

Struktur manajemen IndII saat ini akan diperluas dan ditambah agar sesuai untuk fokus kegiatan yang muncul pada sektor air minum dan sanitasi serta transportasi, dan sumberdaya tambahan akan disediakan untuk mengimbangi beban kerja tambahan yang terkait dengan pengawasan dan penyediaan dukungan bagi penyusunan dan pelaksanaan komponen air minum dan sanitasi. Perubahan utama akan memerlukan penunjukkan Direktur Watsan yang bertanggung-jawab atas Kegiatan Watsan IndII dan WSI (yang sudah mencakup kegiatan teknis terkait pasokan air minum perkotaan, sanitasi dan pengelolaan limbah padat). Diperkirakan Direktur Watsan ini akan dibantu oleh lima staf teknis dan administrasi nasional.

3.2 PERUBAHAN "SUBSIDIARY AGREEMENT"

Diperkirakan draf perubahan "Subsidiary Agreement" telah disusun oleh AusAID dan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Ini akan diselesaikan melalui pertukaran surat segera setelah persetujuan AusAID yang diperlukan diberikan untuk pendanaan WSI.[34]

3.3 PERAN DAN TANGGUNG-JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Gambaran umum peran dan tangung-jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam program Hibah Sanitasi dan Hibah Air Minum, diberikan di Tabel 15.

Tabel 15: Tanggung-Jawab Pemangku Kepentingan

<table>
<tr><th>Hibah Air Minum</th><th>Hibah Sanitasi</th></tr>
<tr><td colspan="2">Dewan IndII dan Tim Teknis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dewan Pengelola IndII akan bertanggung-jawab atas pengawasan pelaksanaan komponen Air Minum dan Sanitasi WSI, juga program bantuan IndII yang sedang berjalan. Dewan ini akan dibantu oleh Tim Teknis yang terfokus khusus pada kegiatan Watsan WSI dan IndII, dan yang beranggotakan para wakil dari instansi-instansi Pemerintah Indonesia (termasuk DJCK sebagai badan pelaksana kedua program Hibah WSI).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kementerian Pekerjaan Umum (temasuk DJCK)</td></tr>
<tr><td colspan="2">PU diberdayakan melalui PMK 168 & 169 / 2008 untuk melaksanakan program Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi dari Pemerintah Indonesia, termasuk yang terkait dengan verifikasi penyelesaian kerja sebelum pembayaran hibah. Sesuai wewenang ini, PU telah menyusunm pedoman pelaksanaan untuk kedua program ini dan mengeluarkan perintah kepada Direktur Jenderal Permukiman Manusia (Cipta Karya). Program Hibah Air Minum dan Sanitasi WSI sebagian besar akan mengikuti pedoman-pedoman ini.</td></tr>
<tr><td>DJCK telah bekerjasama dengan PEMDA dan PDAM dan telah melaksanakan, melalui konsultasi dengan tim disain WSI, proses penyaringan untuk menentukan peringkat PEMDA yang telah menyatakan minatnya untuk ikur serta. Sebagai bagian proses ini, DJCK telah bekerjasama dengan PEMDA untuk menentukan kawasan didalam zona layanan PDAM mereka, sebagai kawasan lokasi perluasan layanan air minum, dan menetapkan pagu jumlah sambungan yang memenuhi syarat untuk hibah.</td><td>DJCK telah bekerjasama dengan Pemkot Banjarmasin dan Surakarta serta BUMD yang bertanggung-jawab mengelola layanan saluran air limbah, untuk menentukan kawasan pelaksanaan perluasan saluran air limbah dan skema sanitasi masyarakat yang baru, serta untuk menetapkan pagu jumlah sambungan baru yang memenuhi syarat untuk hibah.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PU melalui DJCK akan bertanggung-jawab membuat catatan-catatan yang diperlukan Pemerintah Indonesia dan AusAID untuk pemantauan dan evaluasi kemajuan dalam program Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi WSI.</td></tr>
</table>

[34] Direktur Jenderal Pengelolaan Hutang memberitahukan bahwa hibah bilaterla tidak perlu mengikuti prosedur umumnya agar bisa dicantumkan dalam APBN (dengan persetujuan DPR); hanya diperlukan surat persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Hibah Air Minum	*Hibah Sanitasi*
Kementerian Keuangan	
Kementerian Keuangan akan menerima dana WSI dalam rekening khusus yang akan dipakai untuk membayar PEMDA, setelah verifikasi sambungan air minum dan sanitasi yang baru. Kementerian Keuangan akan bertanggung-jawab mengelola, mengatur dan melaporkan pemanfaatan dana WSI dan mengajukan permohonan ke AusAID untuk mengisi rekening tersebut sesuai keperluan.	
AusAID	
AusAID akan bertanggung-jawab mengawasi tata-kelola program WSI atas nama GoA. AusAID akan mengawasi kinerja Kontraktor Pengelola IndII dan mengatur kajian dan evaluasi independen terkait pelaksanaan program WSI.	
Kontraktor Pengelola IndII	
Kontraktor Pengelola IndII akan bertanggung-jawab menyediakan sumberdaya untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program Hibah Air Bersih dan Sanitasi WSI secara tepat waktu, termasuk dalam penyusunan dan sosialisasi lebih lanjut serta pelaksanaan survei dasar dan verfikasi independen.	
	Kontraktor Pengelola IndII akan bertanggung-jawab, melalui konsultasi dengan masing-masing PEMDA, mempekerjakan dan mengelola konsultan yang akan menyusun rencana investasi sanitasi kota.
Pemerintah Daerah Peserta	
PEMDA akan menanda-tangani Perjanjian Penerusan Hibah dengan Kementerian Keuangan, yang menyatakan kesediaan mereka untuk melaksanakan program Hibah mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan tata-kelola tertentu dan peraturan yang berlaku. Mereka akan memastikan utilitas air minum dan sanitasi mereka memenuhi ketentuan ini, dan bahwa entitas yang dipekerjakan untuk melaksanakan survei dasar dan verifikasi mampu melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif dan mendapatkan akses ke data yang diperlukan.	
PEMDA harus mematuhi persyaratan penyertaan modal untuk PDAM, sebelum meminta pembayaran hibah.	

3.4 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO – KOMPONEN AIR MINUM

3.4.1 Keterlambatan dalam memulai Hibah Air Minum

Analisis awal oleh DJCK menunjukkan bahwa permintaan dari PDAM dan PEMDA sangat kuat. Saat ini 25 PEMDA telah dipilih dengan syarat untuk ikut serta. Kemungkinan jumlah rumah-tangga miskin yang bisa tersambung didalam wilayah PEMDA diperkirakan mencapai 90.000, atau 50 persen lebih besar daripada total jumlah sambungan yang didanai melalui Hibah Air Minum.

Ini menyiratkan bahwa, walau kebutuhan sudah dipastikan, minat yang rendah akan membuat periode komitmen menjadi lebih lama dan permulaan kegiatan menjadi lebih lambat. Ini perlu diatasi dengan sosialisasi dan kegiatan persiapan secara intensif di awal program. Ada risiko bahwa beberapa PDAM akan lebih lambat dalam melaksanakan program, sedangkan lainnya lebih cepat dari

jadual. Perjanjian penerusan hibah akan memperbolehkan alokasi-ulang porsi hibah yang belum terpakai.

Faktor utama untuk memulai adalah nilai hibah. Hibah Air Bersih WSI bersifat bertahap, yakni biaya 1.000 sambungan pertama diganti dengan nilai Rp. 2.000.000,- (AUD 250) per sambungan, sedangkan biaya untuk sambungan sisanya hingga pagu jumlah yang disepakati dibayar dengan nilai Rp. 3.000.000,- (AUD 375) per sambungan. Skala hibah sebanding dengan biaya bertahap (*incremental*) rata-rata senilai Rp. 6.000.000 (AUD 750) untuk memasok sambungan baru.

3.4.2 Kapasitas yang terbatas untuk pra-pembiayaan

Hibah Air Minum akan dilaksanakan sebagai program berbasis luaran, dan peserta perlu melaksanakan program perluasan layanan air minum yang disepakati – yang diukur melalui peningkatan jumlah sambungan layanan – dan ini akan menjadi dasar hibah. Kesediaan untuk ikut serta mungkin lebih besar daripada kapasitas pra-pembiayaan untuk investasi awal. Ini telah diatasi dengan jalan menyaring PEMDA dan PDAM untuk menilai kapasitas pra-pembiayaan mereka. Hanya PEMDA dan PDAM yang mampu menyediakan pra-pembiayaan akan dipilih untuk ikut serta. Pagu yang disepakati dibuat lebih rendah daripa kapasitas pra-pembiayaan yang dinilai.

Yang terakhir, Peraturan Presiden yang baru mengenai peminjaman komersial memberikan akses untuk membiayai PDAM yang layak kredit, agar mereka bisa memulai pra-pembiayan untuk pekerjaan dasar bagi sambungan baru.

3.4.3 Waktu yang terbatas untuk melaksanakan Hibah Air Minum dalam satu tahun

Suatu tantangan yang terkait dengan durasi proyek WSI selama satu setengah tahun, adalah ketidak-sesuaian antara tahun fiskal Pemerintah Australia (GoA) dan Pemerintah Indonesia (Pemerintah Indonesia). Untuk melaksanakan WSI dengan mengikuti prosedur konvensional, anggaran Pemerintah Indonesia 2010 akan perlu direvisi pada bulan Agustus 2009 untuk mengakomodasi belanja yang direncanakan. Walau penyusunan program untuk anggaran Pemerintah Indonesia 2010 memiliki waktu yang mencukupi, tapi jangka waktu hanya enam bulan untuk melaksanakan program ini agar sesuai dengan Tahun Anggaran GoA 2010-2011. Namun, ini bisa diatasi dengan jalan memulai program ini di akhir tahun anggaran Pemerintah Indonesia 2009 dan memakai anggaran PDAM yang tersedia untuk perluasan program.

Seleksi awal PEMDA dan PDAM akan didasarkan pada dana anggaran yang tersedia dalam sisa tahun anggaran 2009 Pemerintah Indonesia, dan akan mendukung program yang memenuhi kriteria Hibah Air Bersih WSI. Ini akan mengurangi dan menghilangkan kebutuhan merencanakan pelaksanaan dalam enam bulan pertama dari tahun anggaran 2011 Pemerintah Indonesia (enam bulan terakhir dari tahun anggaran 2010/2011 Pemerintah Indonesia).

Jika penyusunan program tidak berjalan sesuai rencana, maka langkah penanganannya akan memerlukan penyerahan lebih banyak dana ke PAMSIMAS, yang memiliki kapasitas penyerapan anggaran yang besar. Program PAMSIMAS semula dirancang untuk 5000 desa tapi dikurangi menjadi 4000 agar cocok untuk sumberdaya pinjaman IDA. Kekurangan yang 1000 ini akan ditutup sebagian oleh komponen PAMSIMAS WSI untuk 400 desa. Karena itu, masih ada kapasitas yang tersisa untuk melaksanakan progran di 600 desa berikutnya dari disain semula.

3.4.4 Risiko Kepercayaan (*Fiduciary*)

Risiko kepercayaan untuk Hibah Air Minum relatif lebih rendah daripada untuk PAMSIMAS, karena program ini akan dilaksanakan sebagai program berbasis luaran dan pembayaran diberikan setelah luaran yang disepakati dikonfirmasi di lapangan melalui survei verifikasi independen. Risiko yang umumnya terkait dengan pengontrakan dan program kontruksi, sebagian besar dihilangkan melalui pembayaran hibah pada nilai yang ditetapkan untuk setiap sambungan yang berfungsi, setelah diverifikasi dan diserahkan pada proyek. Faktor utama dalam mengurani risiko kepercayaan residual adalah pelaksanaan survei dasar dan selanjutnya survei verifikasi. Kehandalan survei akan diperkuat lagi dengan pemeriksaan catatan pelanggan PDAM untuk menyilang-periksa pembentukan sambungan baru. Survei dasar akan dilaksanakan oleh konsultan yang diadakan oleh IndII dan bekerjasama dengan LSM sebagai bagian proses sosialisasi.

Survei verifikasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga independen yang didukung oleh pendanaan WSI. Konsultan independen ini akan bekerjasama dengan BPPSPAM (DJCK) untuk melakukan survei. BPPSPAM telah bekerjasama sejak 2002 dengan BPKP untuk menyusun laporan audit dan analisis kinerja yang terkait dengan semua PDAM. Laporan dan analisis ini telah diterima oleh Pemerintah Indonesia, dan oleh Kementerian Keuangan khususnya, sebagai standar untuk menentukan kinerja dan kesehatan finansial PDAM.

Pengisian rekening khusus Hibah Air Minum akan dikenai ketentuan harus menyertakan laporan keuangan mengenai pemakaian hibah. Jika ada bukti bahwa pembayaran telah dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan rekening khusus, perjanjian penerusan hibah dan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Hibah Air Minum (PIM), maka pengisian dengan nilai pembayaran yang diminta akan ditahan sampai laporan yang memuaskan diberikan. Jika dana telah dibayarkan secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian hibah, PIM atau rekening khusus, maka dana ini akan dikurangi oleh alokasi untuk perjanjian penerusan hibah yang terkait. Kementerian Keuangan akan membuat laporan pengelolaan keuangan kuartalan (FMR) untuk IndII dan mengenai pembayaran dari rekning khusus serta status rekening khusus.

3.5 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO – KOMPONEN SANITASI

3.5.1 Dimulainya Sambungan

Risiko utama dalam komponen sanitasi Banjarmasin dan Surakarta terkait dengan dimulainya layanan sanitasi oleh rumah-tangga. Diperkirakan bahwa dimulainya sambungan saluran air limbah sebagian besar untuk rumah-tangga berpenghasilan menengah, dan fasilitas setempat seluruhnya untuk rumah-tangga miskin. Dimulainya sambungan saluran limbah akan tergantung pada kebijakan sambungan PDPAL/PDAM yang telah memberikan indikasi bahwa mereka akan menawarkan diskon ongkos sambungan untuk sambungan awal dan untuk rumah-tangga miskin. PEMDA telah membahas draf peraturan dengan DPRD yang memerintahkan sambungan ke sistim saluran limbah kota untuk properti disepanjang penjajaran saluran limbah.

Jika dimulainya sambungan saluran limbah tetap rendah dan dibawah target, maka diusulkan untuk memakai porsi terbesar dari hibah untuk memperluas layanan sanitasi setempat. Jika keterlambatan masih berlanjut dalam memulai sambungan, maka diperlukan alokasi-ulang dana ke komponen Rencana Investasi Saluran Air Limbah, dengan demikian menambah jumlah rencana investasi dari 4 menjadi 5 atau 6.

3.5.2 Keterlambatan Konstruksi

Ada risiko keterlambatan program kontruksi dalam perluasan saluran limbah. Identifikasi dan kuantifikasi risiko kontruksi akan menjadi luaran dari kegiatan Kajian Disain, yang dijadualkan selesai di pertengahan November. Temuan kajian disain akan membantu mengarahkan dan menjadualkan kegiatan kontruksi untuk memenuhi jadual pelaksanaan WSI. Keterlambatan kontruksi yang tidak bisa dikelola akan mengakibatkan dimulainya sambungan menjadi lebih rendah dan, dalam kasus seperti ini, dana mungkin akan dialokasi-ulang ke perluasan sistim saluran air limbah Bandung dan Surakarta.

3.5.3 Dana yang Tersedia

Ada risiko kecil bahwa dana dari PEMDA dan PDPAL/PDAM tidak cukup untuk melaksanakan proyek. Dana telah dialokasikan dalam anggaran 2010 oleh PEMDA. Walau dianggap kecil, tapi jika risiko ini terjadi, maka langkah penanganannya adalah PDPAL/PDAM harus memberikan pra-pembiayaan untuk sebagian biaya. Dalam diskusi dan pertemuan sebelumnya dengan PDPAL dan PDAM, kepastian telah diberikan bahwa kapasitas pra-pembiayaan mereka cukup, dilengkapi dengan pembayaran hibah dalam kelompok.

3.5.4 Risiko Kepercayaan (*Fiduciary*)

Risiko kepercayaan untuk Hibah Sanitasi pada dasarnya sama dengan untuk Hibah Air Minum, terkait mekanisme penanganannya. .

IndII akan mengembangkan Rencana Manajemen Risiko Sampingan dan Rencana Anti Korupsi, yang akan diselesaikan pada bulan Desember 2009. Rencana-rencana ini akan mengidentifikasi risiko dan hambatan dan memberikan rekomendasi penanganannya dan, jika dirasa perlu, tindakan respon. Rencana-rencana ini harus diselesaikan sebelum dimulainya dana kelompok pertama. Mengingat struktur yang ada seperti dijelaskan diatas, rencana-rencana ini akan mengidentifikasi isu spesifik untuk diperhatikan oleh Hibah Sanitasi WSI, juga melengkapi proses yang ada bukan menduplikasi atau menggantikan proses yang ada.

Tabel 16: Matrik Risiko

	Risiko	Tindakan Penanganan Risiko	Tingkat Risiko setelah Penanganan
1	PEMDA tidak bisa menyusun anggaran untuk TA 2010 karena komitmen dana AusAID yang terlambat	Pemerintah Indonesia memakai SA IndII yang ada dan porsi hibah IEG agar bisa memulai proses penganggaran sebelum persetujuan akhir WSI dan disediakannya anggaran WSI. PEMDA bisa mulai menanda-tangani Perjanjian Hibah dan memakai dana yang tersedia di PDAM. Seleksi PDAM dilakukan berdasarkan ketersediaan dana untuk pra-pembiayaan awal.	**Rendah**
2	Risiko mata uang	Langkah penanganan umum adalah mempertahankan Rekening Khusus dalam Rupiah, dan hanya mentransfer dana tiga bulan dalam empat kelompok.	

	Risiko	Tindakan Penanganan Risiko	Tingkat Risiko setelah Penanganan
3	Risiko mata uang – merosotnya nilai dollar akan mengurangi dana yang tersedia	Merosotnya nilai dollar dan permintaan pendanaan secara ajeg, bisa ditangani dengan memakai dana hibah IndII yang belum terpakai.	
4	Risiko mata uang – meningkatnya nilai dollar akan membuat dana yang tersedia menjadi berlebih.	Meningkatnya nilai dollar dan permintaan pendanaan secara ajeg, bisa ditangani dengan jalan mengubah perjanjian hibah PEMDA untuk beberapa PEMDA terpilih yang nemiliki kapasitas untuk menyerap lebih banyak dana. Peningkatan nilai dollar dan menurunnya permintaan ditangani dengan jalan mengurangi transfer ke rekening khusus dan menerapkan langkah penanganan "permintaan."	**Rendah**
5	Permintaan yang rendah dari beberapa PEMDA atau keterlambatan dalam memulai sambungan oleh PEMDA. Ini adalah skenario risiko yang kemungkinan besar akan terjadi.	Dimulainya kegiatan akan dikenai kajian paruh-proyek (Agustus – September 2010), dan alokasi-ulang hibah akan dilakukan untuk PEMDA yang mampu memasang lebih banyak saambungan (lihat diktum 3).	**Sedang**
6	Permintaan sambungan air minum yang rendah	Risiko ini telah ditangani dengan jalan menyebar program ke 25 PEMDA dan menyimpan 50% permintaan yang tersisa. Permintaan yang telah ditentukan dari 25 PEMDA mencapai 104.000 sambungan. Perjanjian hibah akan mengalokasikan 70.450 sambungan yang setara dengan AUD 20,7 juta dengan nilai tukar Rp. 8.250. Masih ada permintaan untuk sekitar 34.000 sambungan dengan nilai hibah sebesar kira-kira AUD 10 juta. Jika permintaan masih saja tetap rendah dan tidak bisa diatasi, maka dana yang belum terpakai akan dialokasi-ulang ke komponen PAMSIMAS.	**Rendah**
7	Permintaan yang rendah dari rumah-tangga miskin untuk sambungan di beberapa wilayah PEMDA.	Permintaan yang telah diidentifikasi adalah 104.000 sambungan untuk rumah-tangga miskin. Program mengharuskan hanya 50% sambungan baru untuk rumah-tangga miskin. Karena itu, targetnya adalah sekitar 35.000 rumah-tangga miskin dari 104.000 sambungan yang diminta untuk rumah-tangga miskin.	**Rendah**
8	Permintaan yang rendah untuk sambungan air limbah	Memungkinkan lebih banyak dana untuk layanan sanitasi setempat. Alokasi-ulang hibah dari Banjarmasin ke Surakarta atau sebaliknya. Alokasi hibah ke Bandung sebagai opsi cadangan.	**Sedang**
9	Permintaan yang rendah untuk sambungan aluran air limbah dan sanitasi.	Dana dialihkan ke program Hibah Air Minum.	**Sedang**

	Risiko	Tindakan Penanganan Risiko	Tingkat Risiko setelah Penanganan
10	Kurangnya dana pra-pembiayaan oleh PEMDA.	PEMDA akan mengalokasikan anggaran pada Desember 2009, atau akan mengalokasikan anggaran yang direvisi pada Agustus – September 2010. Dalam kasus belakangan, PDAM akan membiayai pekerjaan terlebih dahulu (pra-pembiayaan). PEMDA dan PDAM telah dipilih berdasarkan dana mereka yang tersedia. . PEMDA/PDAM bisa meminta hibah diberikan dalam kelompok 500 -1000 sambungan untuk mengatasi masalah arus kas.	**Rendah**
11	Waktu terbatas untuk pelaksanaan dalam satu tahun	Pemakaian anggaran PDAM dan PDPAL akan memungkinkan pemindahan ke 2011, paling lambat Maret dan verifikasi di bulan April. Alokasi-ulang paruh proyek untuk PEMDA yang melaksanakan dengan cepat, akan mengurangi risiko ini.	**Sedang**
12	Keterlambatan kontruksi – air minum dan saluran aair limbah. Ada risiko bahwa proses pengontrakan dan kontruksi mungkin tertunda, jadi mengurangi pencapaian target sambungan.	Pemilihan Hibah Air Minum PEMDA dilakukan dengan dasar kapasitas tak-terpakai yang ada di PDAM calon peserta, dan mengharuskan hanya untuk pipa distribusi dan retikulasi agar sambungan baru diberikan Untuk Hibah Sanitasi, di Banjarmasin sambuingan akan diberikan di jaringan saluran utama yang ada dan hanya memerlukan sambungan lateral untuk sambungan baru.	**Rendah**
13	Risiko kpercayaan dan korupsi oleh kontraktor	Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi memakai metodologi berbasis luaran. Dana hibah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Verifikasi pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh konsultan independen yang ditunjuk melalui WSI. Dana hibah ditetapkan sebesar sekitar 45% dari biaya rata-rata untuk sambungan air minum baru dan sekitar 60% untuk sambungan saluran limbah baru. Perjanjian hibah PEMDA menetapkan mekanisme pengembalian biaya dari PEMDA, jika nanti terbukti ada pengeluaran yang tidak memenuhi syarat setelah hibah dibayarkan.	**Rendah**
14	Rencana Investasi Saluran Air Limbah – PEMDA tidak memberikan komitmen pendanaan.	Kriteria untuk memulai tergantung pada komitmen. Daftar panjang berisi 14 PEMDA sedang disaring dan melalui proses seleksi otomatis untuk mendapatkan 4 PEMDA yang betul-betul berniat.	**Rendah**
15	Dana Pemerintah Indonesia tidak cukup untuk pelaksanaan, atau tidak ada minat dari lembaga donor untuk membiayai.	Komponen ini merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia yang akan dilaksanakan. Bank Dunia, ADB, JICA, serta AusAID dan USAID telah membentuk kelompok koordinasi bantuan untuk mengelola dan memantau pembangungan jaringan pipa untuk program sanitasi.	**Rendah**

BAB 4: KETENTUAN PERLINDUNGAN

4.1 PRIORITAS KEBIJAKAN AUSAID

4.1.1 Kemiskinan

Tujuan WSI untuk memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi – khususnya bagi warga miskin dan untuk meningkatkan kesehatan dan mutu kehidupan warga miskin dan rentan – mencerminkan perhatian AusAID pada pengurangan kejadian dan keparahan kemiskinan dengan peningkatan akuntabilitas lembaga negara.

Fokus Hibah Air Minum adalah pada kawasan perkotaan yang bersebelahan, membutuhkan dan belum terlayani dengan konsentrasi warga miskin yang tinggi. Namun, kawasan seperti juga berisi rumah-tangga non-miskin yang akan disertakan juga pada usaha perluasan oleh PEMDA/PDAM, untuk memungkinkan subsidi silang bagi rumah-tangga miskin dan meningkatkan kelayakan finansial dari utilitas yang menyediakan layanan bagi semua kalangan masyarakat. Target rumah-tangga miskin yang akan mengambil sambungan air minum baru, agar PEMDA bisa mendapatkan Hibah, adalah minimum 50 persen. Manfaat sambungan air perpipaan untuk warga miskin telah terbukti banyak dan meningkatkan kesehatan, pendapatan dan harga diri.[35]

Komponen air limbah (Hibah Sanitasi) ditujukan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan melalui pengelolaan dan pengolahan air limbah yanag lebih baik. Disain perluasan saluran air limbah Banjarmasin sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis. Disain ini dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang akan membawa manfaat bagi masyarakat umum, tapi diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya, terutama kesehatan dan kebutuhan pengeluaran untuk perawatan medis. Skema ini mentargetkan 40 persen rumah-tangga miskin akan mengambil sambungan di kawasan cakupan layanan. Rencana investasi untuk empat (4) kota akan mengidentifikasi dan mencantumkan lingkungan miskin kedalam disainnya, untuk memastikan layanan bagi warga miskin saat rencana dilaksanakan.

Kegiatan peningkatan kapasitas untuk PEMDA menyertakan peningkatan kesadaran akan manfaat melayani warga miskin bagi PEMDA dan masyarakat secara keseluruhan, dan pengembangan langkah praktis agar warga miskin bisa berpartisipasi. Partisipasi warga miskin dalam kegiatan akan dipantau.

4.1.2 Kesetaraan Jender

Kesetaraan jender merupakan prioritas utama AusAID. Kebijakan AusAID mengakui bahwa perhatian pada kesetaraan jender memungkinkan penentuan sasaran prakarsa yang lebih baik dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Dalam WSI, banyak kegiatan dengan fokus masyarakat akan dilaksanakan melalui PAMSIMAS, yang merupakan pengulangan ketiga dari WSLIC 1 dan 2. Pengalaman WSLIC menunjukkan pentingnya memastikan kepekaan jender di semua tingkatan program, mulai dari pemerintah hingga konsultan yang dipekerjakan untuk proses masyarakat dan peningkatan kapasitas. Dengan melihat pengalaman ini, dan pelajaran yang ditarik terkait kemunduran akibat mengabaikan kesetaraan jender dalam kegiatan, PAMSIMAS telah memadukan langkah kesetaraan jender dalam kegiatannya dan telah

[35] Bank Dunia, 2006, *Indonesia Enabling Water Utilities to Serve the Urban Poor*

mengembangkan *Rencana Aksi Jender*. Bantuan WSI untuk PAMSIMAS akan mencantumkan langkah-langkah kesetaraan jender ini.

Survei dasar dan selanjutnya survei audit terkait program Hibah Air Minum dan program perluasan saluran air limbah, akan mengidentifikasi apakah rumah-tangga dengan kepala perempuan ikut serta secara setara dalam kegiatan, untuk memberitahukan usaha-usaha yang lebih baik untuk menyertakan mereka. Akan diselenggarakan diskusi di semua tingkatan pemerintahan, tapi khususnya di PEMDA/PDAM, untuk menggalang dukungan bagi prakarsa jender. Peningkatan kapasitas kelembagaan PEMDA akan menyertakan kesadaran jender dan kepekaan jender jika dianggap memungkinkan. PEMDA akan didorong untuk memberi kesempatan yang sama bagi pejabat pemerintah pria dan perempuan untuk ikut serta dalam peningkatan kapasitas, dan bagi pria dan perempuan di kalangan masyarakat untuk mengakses informasi. PEMDA juga akan didorong untuk berkonsultasi dengan organisasi perempuan dalam menetapkan biaya sambungan.

Waktu dan tenaga yang dipakai oleh perempuan untuk mengumpulkan dan membawa air, akan berkurang karena adanya sambungan air perpipaan, jadi memberikan waktu untuk kegiatan lain termasuk mencari penghasilan. Anak-anak yang sering membantu pengumpulan air juga akan merasakan manfaatnya, dan akibat buruk dari membawa ember besar berisi air akan berkurang pada perkembangan tubuh mereka. Perempuan juga akan merasakan manfaat dari kesehatan lingkungan yang semakin baik. Waktu yang dipakai untuk mengurusi anak, orang tua dan lainnya yang jatuh sakit akibat air kotor, akan berkurang. Nilai anggaran rumah-tangga untuk membayar perawatan medis juga akan berkurang.

4.1.3 Pendekatan pro warga cacat

Perluasan yang diusulkan untuk layanan air minum dan saluran air limbah diharapkan memberi manfaat bagi warga cacat, karena memberikan akses lebih besar ke layanan ini bagi banyak rumah-tangga. Ini sesuai dengan prinsip *Pembangunan untuk Semua* dari AusAID, dan mungkin akan diverifikasi melalui data yang dikumpulkan dari survei dasar dan verifikasi paska sambungan. Selain itu dalam diskusi dengan Pemerintah Indonesia mengenai Hibah Air Minum, WSI akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi dengan para warga cacat dan organisaasi warga cacat selama siklus seluruh proyek, terutama dalam fase disain. WSI akan mempromosikan proses ini dengan jalan menyertakan warga cacat dalam program sosialisasi IndII yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai skema ini. Sebagai bagian dari peran dan tanggung-jawab M&E, IndII akan menilai apakah warga cacat ikut serta dalam diskusi masyarakat mengenai air minum dan sanitasi, dan apakah kebutuhan merekaa dipertimbangkan dalam disain dan perawatan fasilitas air minum dan sanitasi.

4.1.4 Pendekatan lingkungan

Kajian mengenai risiko lingkungan dari pelaksanaan Hibah Air Minum, PAMSIMAS dan komponen air limbah, dengan memakai Pedoman Pengelolaan Lingkungan AusAID, mengungkapkan bahwa hanya perluasan saluran limbah akan menimbulkan banyak risiko lingkungan. Namun risiko ini bisa ditangani dengan langkah-langkah yang tepat. Ringkasan perlindungan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Hibah Air Minum: Pekerjaan kontruksi untuk Hibah Air Minum akan dilaksanakan oleh PDAM dan, dalam beberapa kasus, oleh Dinas Pekerjaan Umum PEMDA. Kedua instansi pelaksan ini diwajibkan mengikuti ketentuan yang ada dari Pemerintah Indonesia mengenai perlindungan lingkungan. Salah

satu kriteria dalam memilih pemerintah daerah dan PDAM peserta program Hibah Air Minum, adalah bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai didalam instalasi utama agar tidak memerlukan pembangunan fasilitas saluran masuk (*intake*) baru (satu-satunya elemen perluasan yang berpotensi menimbulkan dampak penting). Kegiatan kontruksi lainnya terbatas pada perluasan sistim distribusi, yang akan memasang jaringan pipa di jalan-jalan kota. Diperkirakan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk tidak perlu dilakukan.

Hibah Sanitasi: Program air limbah (sistim saluran air limbah) meliputi studi investasi dan perluasan jaringan saluran limbah Banjarmasin dan Surakarta. Studi investasi akan menyertakan analisis perlindungan lingkungan awal sebagai bagian luaran. Perluasan saluran limbah yang diusulkan akan menyertakan kajian mengenai potensi dampak lingkungan. Contohnya, untuk Banjarmasin, kajian ini akan difokuskan pada kapasitas pengolahan dari instalasi yang ada, dan mutu air limbah yang dibuang (*effluent*) ke saluran air kota. Ini mungkin memerlukan pembaharuan disain instalasi pengolahan. Kajian disain sistim saluran limbah akan difokuskan pada: penjajaran saluran limbah utama; kedalaman yang diusulkan untuk saluran limbah utama sebagai risiko keamanan kontruksi; lokasi stasiun pompa dari segi polusi suara dan bau; dan jadual kontruksi dari segi gangguan pada kegiatan masyarakat dan arus lalulintas. Kajian disiain akan menyusun rekomendasi yang tepat untuk langkah-langkah penanganan isu lingkungan yang diidentifikasi sebagai risiko potensial.

BAB 5: KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI (MEF)

5.1 IKHTISAR MEF WSI

Mengikuti komentar dari kajian oleh rekan kerja mengenai Ringkasan Disain WSI dan Dokumen Pelaksanaan (DSID), disarankan untuk menyusun Kerangka Pemantauan dan Evaluasi (MEF) yang komprehensif dan yang menjelaskan hasil-hasil, indikator utama, serahan (*deliverable*) dan hubungan jelas yang terbukti dengan MEF IndII yang ada.

5.2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI YANG DIUSULKAN UNTUK M&E WSI

5.2.1 Gambaran Umum dan Definisi

Pendekatan yanag diusulkan untuk Pemantauan dan Evaluasi (M&E) WSI didasarkan pada metodologi yang sederhana dan jelas, yang bisa menghasilkan hasil dan informasi nyata dalam waktu relatif singkat. MEF WSI berkorelasi dengan MEF IndII yang lebih luas dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas dari tata-kelola, kapasitas dan kemitraan (terutama dengan PDAM dan PEMDA) sesuai dengan peningkatan akses ke infrastruktur air minum dan sanitasi.

Lampiran 7 memberikan gambaran umum mengenai kerangka kinerja dan berbagai tingkat M&E yang diusulkan untuk WSI. M&E WSI difokuskan pada tingkat hasil setiap komponen kegiatan, tapi juga mengakui sifat berbasis luaran dari sebagian besar kegiatan (Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi). Karena itu, indikator luaran utama dicantumkan dalam kerangka kinerja. Ciri utama WSI adalah mengukur peningkatan akses, terutama dari segi peningkatan tata-kelola dan kapasitas di tingkat PDAM dan PEMDA.

Untuk memperjelas definisinya - *Akses*[36] ditetapkan sebagai *persentase populasi yang memakai layanan air minum yang "semakin bagus."* Ini menyiratkan penyediaan 20 liter per orang per hari dari sumber air yang "semakin baik," dalam jarak satu kilometer dari tempat tinggal pengguna. Sumber air yang "*semakin bagus*" adalah sambungan air perpipaan rumah / kran air umum / sumur bor / sumur gali terlindungi / mata air terlindungi / penampungan air hujan.

Akses ke sanitasi yang memadai adalah *persentase populasi yang memakai sanitasi yang "semakin bagus,"* jika sanitasi berarti: sambungan ke saluran limbah umum, sambungan ke sistim septik, jamban siram-guyur, cubluk (*pit latrine*) sederhana, atau cubluk berventilasi. Sistim pembuangan kotoran manusia dianggap memadai jika milik pribadi dan menjauhkan kotoran manusia dari manusia.

5.2.2 Metodologi

Pendekatan M&E untuk semua komponen akan konsisten dan difokuskan pada dua tingkat – pada hasil dan pemantauan hasil yang sedang berjalan (primer) dan pada analisis dampak secara independen (sekunder). Lihat Kerangka Kinerja di Lampiran 7.

---

[36] Definisi akses diambil dari Bank Dunia dan sesuai dengan definisi global terkini untuk pemantauan kemajuan *Millennium Development GoAls* (*MDGs*) yang diusulkan oleh WHO dan UNICEF.

Pemantauan primer akan menjadi tanggung-jawab tim WSI dengan arahan dari Direktur Teknis (TD). Pertama-tama, studi dasar perlu diselesaikan untuk komponen Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi. Bank Dunia telah melakukan studi dasar untuk komponen PAMSIMAS. Draf kerangka acuan (ToR) dasar disajikan sebagai Lampiran 5.

Studi dasar akan menjadi landasan, karena banyaknya jumlah rumah-tangga yang harus ditangani, dan menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang disarankan sebagai berikut:

- Apakah saat ini saudara memiliki sambungan air minum yang berfungsi di rumah anda?
- Berapa jumlah orang yang tinggal di rumah anda? Apakah kepala rumah-tangga pria atau perempuan?
- Jika tersambung, apakah anda bersedia membayar biaya untuk merawat sambungan? Jika ya, berapa?
- Studi dasar akan diselesaikan oleh kelompok konsultan dasar. Konsultan ini akan mengembangkan metodologi dasar dan membahas proses pemilihan dan pelaksanaan bersama TD (Direktur Teknis).

5.2.3 Pelaporan Primer

Pelaporan untuk setiap komponen akan memakai format yang diberikan melalui IndII, dan terjadi setiap bulan. Laporan enam-bulanan akan mengabungkan informasi dan analisis mengenai pencapaian hingga kini.

Proses verifikasi merupakan elemen penting untuk WSI, karena pembayaran melalui Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi sangat tergantung pada hasil verifikasi mengenai fungsi sistim air minum dan sanitasi.

Pendekatan verifikasi telah disusun dan akan diselesaikan sebagai bagian proses persetujuan, dan penanda-tanganan kontrak dengan PDAM dan PEMDA. Pemantauan proses verifikasi akan dilakukan oleh PEMDA, dengan dukungan diberikan ke PEMDA dan PDAM untuk membantu peningkatan sistim verifikasi menjadi bersifat jangka panjang.

Untuk PAMSIMAS, ada ketergantung pada laporan Bank Dunia mengenai kemajuan dan dampak. Diusulkan agar wakil WSI ikut serta dalam studi dampak/evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan laporan mengenai PAMSIMAS setiap enam bulan - untuk sementara setiap April dan Oktober dalam satu tahun.

5.2.4 Pemantauan Sekunder

Untuk pemantauan sekunder, pekerjaan ini akan dilakukan oleh spesial M&E eksternal. Draf ToR untuk evluasi paruh-proyek dan akhir program disajikan di Lampiran 6.

Pertanyaan penting dalam evaluasi kegiatan adalah besaran partisipasi masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan akses yang lebih bagus ke fasilitas air minum dan sanitasi, dan untuk menumbuh-kembangkan perilaku hidup bersih. Pertanyaan penting lainnya adalah menilai efektivitas dan efisiensi PDAM dan PEMDA dalam membagikan hibah dan membuktikan sambungan rumah.

Selain kajian meja mengenai laporan dan wawancara yang ada dengan para pemangku kepentingan utama, diusulkan studi dampak menyertakan serangkaian 'studi kasus.' Ini akan memerlukan informasi dasar untuk mengukur dan memperkirakan dampak penignkatan fasilitas air minum dan sanitasi pada rumah-tangga, dan untuk mengukur peningkatan dalam kapasitas dan mekanisme tata-kelola PEMDA dan PDAM.

Tim independen perlu mengembangkan metodologi studi kasus dan pertanyaan kinerja yang tepat sebagai bagian dari proses.

Tabel berikut memberikan jangka waktu indikatif untuk penyelesaian langkah pemantauan utama dan studi dampak pada titik tengah dan penyelesaian WSI.

Tabel 17: Kerangka indikatif – pemantauan

Tahapan Pokok M&E	Format	Waktu
Pelaporan bulanan	Format laporan bulanan IndII	Aakhir setiap bulan kalender
Pelaporan enam-bulanan	Format laporan semesteran IndII	April 2010, Oktober 2010, April 2011
Laporan semester PAMSIMAS WB	Format pelaporan Bank Dunia	April 2010 and Okober 2010
Kajian paruh-proyek	Konsultan disain	
Laporan penyelesaian kegiatan	Format IndII	
Laporan studi kasus	Akan ditentukan	

Tanggung-jawab luas atas M&E berada pada TD (Direktur Teknis) WSI. Bantuan juga akan diberikan sesuai keperluan melalui Spesialis M&E IndII. Bab 5.2.6 dibawah memberikan lebih banyak rincian mengenai pengaturan pengelolaan untuk WSI yang terkait dengan M&E.

5.2.5 Pelaporan dan Studi Dampak

Pelaporan untuk WSI akan memakai format pelaporan yang ada, yang diusulkan melalui MEF IndII yang lebih luas.

Mengingat pentingnya dan rumitnya kegiatan ini, WSI akan menyusun laporan bulanan. Proses pelaporan bulanan akan dimasukkan kedalam laporan semesteran, yang memberikan lebih banyak rincian mengenai kemajuan program dan informasi terkait pencapaian luaran dan hasil utama.

Untuk PAMSIMAS, WSI akan bergantung pada Bank Dunia (WB) untuk memberikan laporan semesteran (April dan Oktober setiap tahun). Informasi dari laporan ini akan diambil untuk memenuhi ketentuan pelaporan WSI dan untuk memberi informasi ke Komisi Pengendali dan Tim Teknis IndII.

Pendekatan studi kasus diusulkan untuk elemen utama WSI, untuk menilai efektivitas dan efisiensi komponen kegiatan dan dampak dari peningkatan fasilitas air minum dan sanitasi pada rumah-tangga.

Pendekatan studi kasus akan menjadi bagian dari studi dampak yang akan dilaksanakan pada titik tengah pencapaian kegiatan, dengan penekanan khusus pada hasil. Kriteria akan mencantumkan pertimbang DAC (efisiensi, efektivitas, relevansi dll.). ToR yang diusulkan disajikan sebagai Lampiran 6.

5.2.6 Pengaturan Pengelolaan M&E WSI

Secara umum pengaturan pengelolaan WSI telah dijelaskan secara rinci didalam DSID. Untuk M&E, Direktur Teknis WSI akan bertanggung-jawab mengumpulkan dan menyusun semua laporan, juga mengawasi kajian paruh-proyek dan laporan penyelesaian kegiatan.

Direktur Teknis WSI melapor ke Direktur Fasilitas IndII dan terus memberinya informasi mengenai kemajuan dan pencapaian WSI versus hasil. Informasi dan data yang diambil dari laporan WSI akan dimasukkan kedalam kerangka pelaporan yang lebih luas untuk IndII. WSI (seperti IndII) akan memiliki tim teknis yang akan memberikan saran teknis yang terkait dengan kegiatan. Informasi akan disaring melalui Tim Teknis (juga Tim Teknis IndII) ke Komisi Pengendali (*Steering Committee*). Laporan brifing akan disusun untuk pertemuan Dewan Pengelola, yang diselenggarakan setiap tiga bulan.

WSI akan berkoordinasi dan berhubungan dengan WB untuk komponen PAMSIMAS setiap enam bulan, saat misi pelaporan telah diselesaikan. Pertemuan informasl juga dijadualkan sesuai keperluan antara Direktur Teknis WSI dan wakil Bank Dunia.

Sesuai dengan M&E pengelolaan program keseluruhan, WSI akan dinilai dari segi proses manajemen dan hasil. Ini akan diukur oleh spesialis M&E IndII, sebagai bagian dari pengelolaan program keseluruhan / semua M&E Fasilitas. Ini akan terjadi setiap tahun dan pelajaran yang ditarik akan memberi umpan balik ke proses pengelolaan.

LAMPIRAN

CATATAN:

LAMPIRAN 1: PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH

dan

LAMPIRAN 2: FORMAT PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH

(dalam bahasa Indonesia dan disajikan secara terpisah).

LAMPIRAN 3: DAFTAR PEMERINTAH DAERAH YANG TERPILIH UNTUK HIBAH AIR MINUM

ALOKASI ANGGARAN UNTUK HIBAH AIR MINUM			
NO	Pemerintah Daerah	Jumlah Sambungan Rumah	Alokasi Anggaran (Rp. Juta)
1	KAB. SERANG	3.000	7.000
2	KAB. BOYOLALI	1.000	2.000
3	KOTA MALANG	6.250	19.000
4	KAB. KLATEN	3.000	7.000
5	KAB. CIAMIS	3.000	7.000
6	KOTA PEKALONGAN	3.000	7.000
7	KAB. BANGKALAN	1.700	3.400
8	KAB. WONOSOBO	1.400	2.800
9	KAB. BOGOR	4.000	10.000
10	KOTA BOGOR	4.000	10.000
11	KAB. WONOGIRI	2.000	4.000
12	KAB. LOMBOK TIMUR	500	1.000
13	KAB. TASIKMALAYA	3.000	7.000
14	KAB. CILACAP	2.500	5.500
15	KOTA TEGAL	3.000	7.000
16	KAB. BANJAR	3.000	7.000
17	KAB SIDOARJO	5.000	14.000
18	KOTA PALEMBANG	5.000	14.000
19	KAB. PANDEGLANG	1.500	3.000
20	KAB. BANYUMAS	3.000	7.000
21	KAB. KUNINGAN	3.000	7.000
22	KAB. KARAWANG	3.000	7.000
23	KOTA PALANGKARAYA	1.500	3.000
24	KAB. KUDUS	3.000	7.000
25	KAB. JOMBANG	1.100	2.200
	TOTAL PRIORITAS	70.450	170.900

LAMPIRAN 4: PENYALURAN DANA HIBAH AIR MINUM

Mekanisme pelaksanaan dan aliran dana

Prosedur dan proses lengkap akan dicantumkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Hibah Air Minum* dam dokumen disain *Hibah Air Minum*, dan ciri-ciri dari mekanisme yang diusulkan adalah sebagai berikut:

(a) GoA dan Pemerintah Indonesia akan membnuat perjanjian resmi untuk melaksanakan WSI melalui amandemen Pengaturan Tambahan (*Subsidiary*) IndII.

(b) Dana yang dialokasikan ke komponen PAMSIMAS, Air Limbah dan Hibah Air Minum merupakan penerusan anggaran, dana PAMSIMAS dan Air Limbah dalam anggaran DJCK dan dana Hibah Air Minum dalam rekening pembantu anggaran Kementerian Keuangan.

(c) Kementerian Keuangan akan menjalankan rekening khusus di BI, menunjuk pejabat yang berwenang menanda-tangani dan memberitahu GoA. Setelah ketentuan terkait efektivitas hibah WSI dipenuhi, GoA akan memberikan deposito awal untuk rekening khusus.

(d) Setelah sosialisasi ke PEMDA/PDAM mengenai tata-kelola, fokus pro warga miskin daan isu jender / kelompok rentan, Kementerian Keuangan menanda-tangani perjanjian penerusan hibah dengan pemerintah daerah terpilih, yang menetapkan nilai hibah untuk pemerintah daerah, jumlah sambungan yang disepakati, bidang-bidang yang dikembangkan dan ketentuan lain yang terkait.

(e) IndII melakukan survei dasar untuk pemerintah daerah yang telah menanda-tangani perjanjian penerusan hibah.

(f) Pemerintah memberikan biaya terlebih dahulu ke PDAM – semuanya atau sebagian – untuk program perluasan.

(g) Konsultan sosialisasi akan bekerjasama dengan PEMDA untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi sosialisasi untuk promosi sambungan baru bagi masyarakat, yang memastikan bahwa rumah-tangga miskin, perempuan dan kelompok rawan mendapatkan informasi ini.

(h) PDAM melaksanakan program perluasan yang diprogramkan melalui kontraktor swasta, dan menjalankan sambungan baru.

(i) Tiga bulan setelah perluasan selesai, IndII melakukan survei verifikasi melalui lembaga independen. Sambungan yang telah diverifikasi akan menjadi dasar hibah.

(j) Pemerintah daerah menyerahkan permohonan pembayaran hibah ke DJCK. DJCK akan menyilang-periksa permohonan pembayaran dengan hasil survei verifikasi. Kemudian DJCK menyerahkan otorisasi pembayaran ke Kementerian Keuangan, dilengkapi dengan hasil survei verifikasi, dan menyerahkan salinannya ke IndII.

(k) Pejabat penanda-tangan rekening khusus Kementerian Keuangan membayar dan menyerahkan salinan rincian pembayaran ke IndII. Kementerian Keuangan meminta pengisian rekening khusus ke GoA. IndII melakukan verifikasi bahwa pengeluaran telah memenuhi ketentuan pengaturan tambahan dan persyaratan rekening khusus dan menyetujui pengisian rekening.

(l) Saat menerima verifikasi pengeluaran dan permintaan dana kuartalan, Kantor AusAID akan mengatur pembayaran melalui pengisian rekening khusus.

Gambar 2: Aliran dana dan proses pelaksanaan Hibah Air Minum

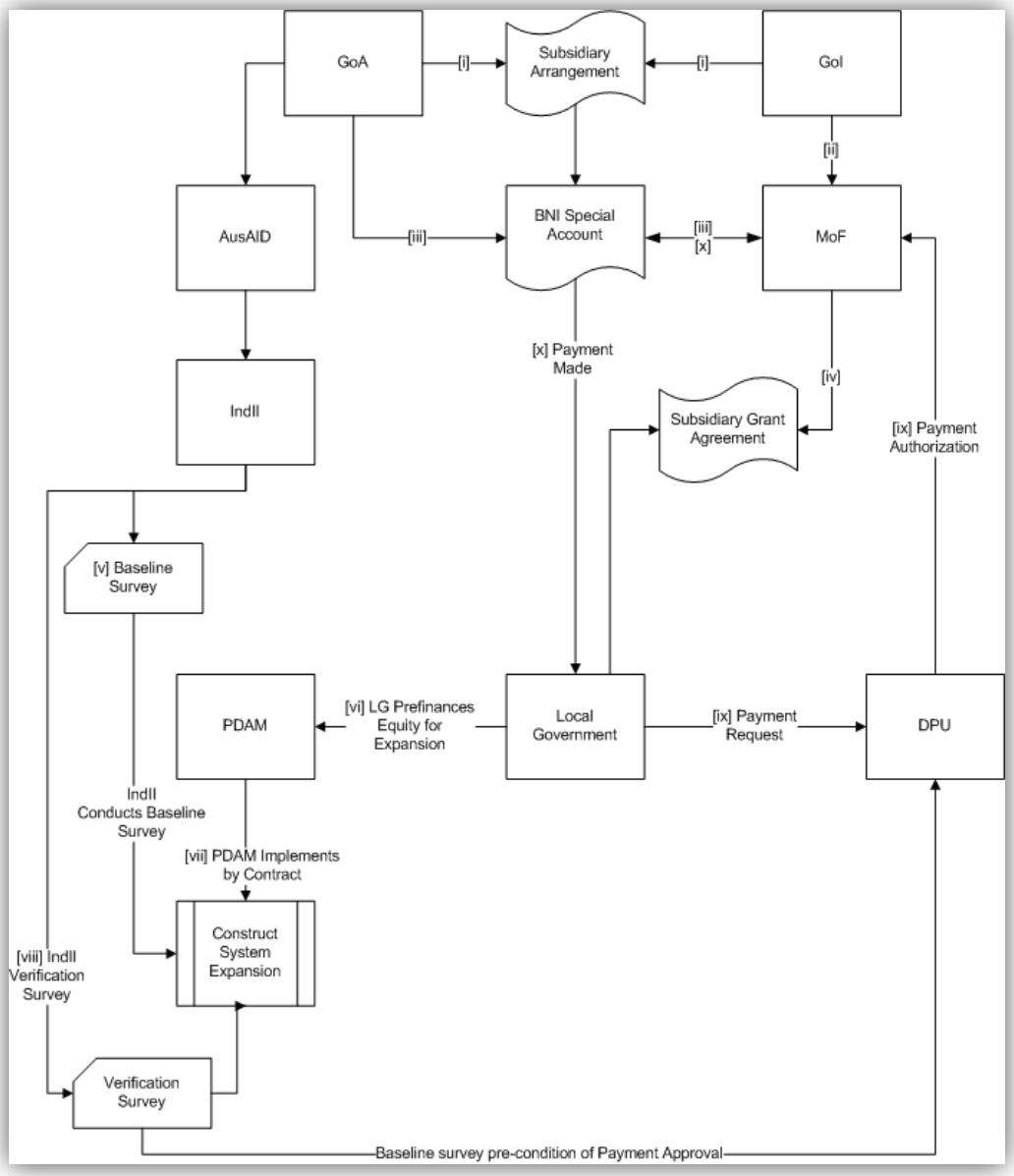

LAMPIRAN 5: GAMBARAN UMUM KERANGKA ACUAN UNTUK SURVEI DASAR

Pendahuluan

Pemerintah Australia (GoA) mengumumkan Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI) pada bulan Desember 2008. Kegiatan ini cocok untuk Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) yang lebih luas. Alokasi dana yang disetujui adalah AUD 300 juta dan, dari jumlah ini, AUD 100 juta akan disalurkan melalaui mitra multi-lateral dan mitra pembangunan lain dan AUD 200 juta akan dialokasikan ke program negara bilateral, termasuk AUD 60,5 juta untuk Indonesia. Dana bilateral akan dibelanjakan selama periode 1 Juli 2009 hingga 30 Juni 2011. Alokasi untuk Indonesia akan dipakai untuk komponen program WSI berikut ini:

- Percontohan pelaksanaan skema hibah berbasis luaran (Hibah Air Minum) sebagai insentif agar Pemerintah Daerah (PEMDA) mempercepat penyediaan sambungan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Alokasi yang diusulkan senilai AUD 20 juta diharapkan membantu penyediaan sekitar 60.000 sambungan air yang berfungsi dalam waktu dua tahun.
- Memperluas Program Air Minum dan Sanitasi Ketiga untuk Masyarakat Berpenghasilan Kecil (PAMSIMAS) yang saat ini mencakup 4000 desa; alokasi yang diusulkan senilai AUD 22,5 juta akan memungkinkan perluasan ke 400 desa tambahan, termasuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas. Komponen ini akan dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian program Bank Dunia.
- Membantu usaha memperluas layanan saluran air limbah di kota-kota besar. Alokasi yang diusulkan senilai AUD 10 juta akan dipakai untuk mendanai rencana investasi untuk sistim saluran air limbah di empat kota, dan pembangunan 10.000 sambungan baru untuk sistim saluran limbah di Banjarmasin dan Surakarta.
- Membantu lebih lanjut dalam tata-kelola sektor; alokasi yang diusulkan senilai AUD 5 juta akan dipakai untuk mendanai prakarsa masyarakat madani yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan jender dan kemiskinan dalam mengakses layanan yang semakin bagus.
- AUD 3 juta telah dialokasikan untuk menutup biaya pengelolaan program secara langsung, pemantauan dan evaluasi, dan untuk biaya verifikasi.

Pemantauan dan Evaluasi (M&E) merupakan elemen utama dari keseluruhan IndII, dan bagian penting dari pendekatan adalah untuk membentuk dasar yang memadai untuk mengukur pencapaian dan, yang lebih penting, dampak pembangunan dari peningkatan infrastruktur transportasi.

Maksud Studi Dasar

Maksud usulan adalah untuk melakukan studi dasar mengenai rumah-tangga contoh, dimana WSI melaksanakan Hibah Air Minum dan kegiatan Air Limbah.

Serahan (*deliverable*) yang diusulkan meliputi laporan dasar dan pernyataan dampak terkait, yang menjadi patokan pengukuran melalui analisis dan kajian di masa depan.

Usulan ini menjelaskan rincian pendekatan dan metodologi yang akan dipakai dalam studi ini, pengaturan pengelolaan antara WSI dan Konsultan, serta rincian biaya untuk menyelesaikan penugasan ini.

Makalah ini dimaksudkan untuk disetujui secara prinsip agar perundingan bisa dilakukan untuk memulai studi dasar.

Metodologi Studi Dasar WSI

Metodologi yang diusulkan adalah memilah-milah tugas menjadi langkah-langkah tertentu, termaasuk perencanaan dan fase disain dan studi dasar.

Perencanaan dan Fase Disain

Tugas 1: Arah dan Koordinasi Proyek

Tugas 2: Mengembangkan disain studi untuk mengumpulkan data dasar untuk Hibah Air Minum dan Air Limbah.

Tugas 3: Menyusun formulir dan kuesioner standar untuk mengumpulkan data (see pertanyaan yang disarankan dalam MEF WSI).

Tugas 4: Menetapkan dan menunjuk Asisten Riset untuk menyiapkan pengumpulan data.

Tugas 5: Melatih Asisten Riset

Tugas 6: Menyelesaikan Laporan Pendahuluan

Fase Studi Dasar

Tugas 7: Mengumpulkan dan menyusun data untuk Hibah Air Minum dan komponen Air Limbah

Tugas 8: Mengkaji semua data yang dikumpulkan olrh asisten riset

Tugas 9: Menyelesaikan pemilihan rumah-tangga untuk pengumpulan data yang lebih rinci

Tugas 10: Menentukan, indikator, metodologi dan pertanyaan yang akan dipakai

Pengaturan Pengelolaan

Konsultan akan melapor ke Direktur Teknis (TD) WSI mengenai semua aspek studi dan terus berkomunikasi mengenai kemajuan dan isu.

Laporan pendahuluan singkat akan disusun oleh konsultan, ditambah laporan akhir yang menjelaskan metodologi yang dipakai, analisis data yang dikumpulkan, semua data baku dan salinan alat pengumpulan data.

Anggaran yang Diusulkan

Akan ditentukan

LAMPIRAN 6: KERANGKA ACUAN UNTUK KAJIAN PARUH-PROYEK DAN PENYELESAIAN KEGIATAN

Nama proyek: Prakarsa Air Minum dan Sanitasi (WSI) dibawah Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) – sebuah program yang didanai oleh AusAID

Latar Belakang: Pemerintah Australia (GoA) mengumumkan Prakarsa Air Minum dan Sanitasi di bulan Desember 2008. Tujuana utamanya adalah untuk:

- Memperluas akses ke layanan air minum dan sanitasi, terutama bagi warga miskin, perempuan dan anak sekolah;
- Membuat layanan air minum dan sanitasi menjadi lebih berkelanjutan, dengan jalan mendukung reformasi sektor dan meningkatan kapasitas;
- Meningkatkan mutu kesehatan dan kehidupan rentan masyarakat miskin, dengan jalan meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku hidup bersih dan memperluas akses mereka ke layanan air minum dan sanitasi; dan
- Meningkatkan efektivitas bantuan dan melengkapi program lain.

Dana yang disetujui untuk WSI adalah AUD 300 juta, dimana AUD 100 juta akan disalurkan melalui lembaga pembangunan multi-lateral dan AUD 200 untuk program negara bilateral, termasuk Indonesia. Pelaksanaan program bilateral diharapkan selesai di akhir Juni 2011.

Diusulkan dana perluasan dari WSI senilai AUD 60,5 juta dipakai untuk:

- percontohan pelaksanaan skema hibah berbasis luaran (Hibah Air Minum) untuk mendorong PEMDA agar mempercepat penyediaan sambungan baru PDAM; alokasi yang diusulkan senilai AUD 20 juta diharapkan membantu penyediaan sekitar 60.000 sambungan air baru dalam waktu dua tahun;
- memperluas program air minum dan sanitasi PAMSIMAS yang saat ini mencakup 4000 desa; alokasi yang diusulkan senilai AUD 22,5 juta akan memungkinkan perluasan ke 400 desa tambahan, termasuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas;
- membantu usaha memperluas layanan saluran air limbah di kota-kota besar; alokasi yang diusulkan senilai AUD 10 juta akan dipakai untuk mendanai rencana investasi untuk sistim saluran air limbah di empat kota, dan pembangunan 10.000 sambungan baru untuk sistim saluran limbah di Banjarmasin dan Surakarta;
- Membantu lebih lanjut dalam tata-kelola sektor; alokasi yang diusulkan senilai AUD 5 juta akan dipakai untuk mendanai prakarsa masyarakat madani yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan jender dan kemiskinan dalam mengakses layanan yang semakin bagus.

AUD 3 juta telah dialokasikan untuk menutup biaya pengelolaan program secara langsung, pemantauan dan evaluasi, dan untuk biaya verifikasi.

Untuk memaksimalkan sinergi dan efisiensi pengelolaan serta memperkecil masalah koordinasi, program WSI dikelola melalui struktur IndII yang ada. Ini telah diwujudkan melalui perubahan pada *Pengaturan Tambahan* IndII yang ada saat ini.

Ringkasan WSI

Air perpipaan perkotaan (AUD 20 juta)	***Hibah Air Minum:*** 60.000 rumah-tangga terlayani oleh air perpipaan, 360.000 jiwa penerima manfaat
Sanitasi perkotaan (AUD 10 juta)	**Bantuan Teknis:** penyusunan rencana investasi air limbah untuk empat kota (AUD 5 juta). **Perluasan saluran air limbah Banjarmasin:** 10.000 sambungan baru ./ 90.000 jiwa penerima manfaat (AUD 5 juta).
Peningkatan air minum perdesaan (AUD 12 juta)	**PAMSIMAS:** 550.000 jiwa dengan akses layanan air minum yang semakin bagus
Peningkatan sanitasi perdesaan (AUD 10,5 juta)	**PAMSIMAS:** +/- 800.000 jiwa dengan akses ke sanitasi yang semakin bagus. Bantuan sosialisasi di desa-desa baru.
Reformaasi tata-kelola sektor (AUD 5 juta)	Komponen masyarakat madani
Pengelolaan program (AUD 3 juta)	Menyertakan biaya bertahap (*incremental*) MC IndII

Tujuan proyek:

Cantumkan tujuan kegiatan stelah selesai.

Tujuan dan lingkup kegiatan evaluasi:

Tujuan umum evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan proyek dan pencapaian sasaran dan tujuan. Khususnya, misi evaluasi dimaksudkan untuk mencakup berikut ini:

- Evaluasi pencapaian tujuan – apakah tujuan program telah tercapai? Apakah tujuan terkait dengan program?
- Apakah nilai untuk uang tercapai mengingat besarnya ukuran dan lingkup program?
- Apakah kapasitas PEMDA dan PDAM telah ditingkatkan untuk melanjutkan pelaksanaan dan manajemen?
- Apakah pendekatan cocok untuk program semacam ini (yakni pendekatan untuk penyediaan layanan dan infrastruktur)?
- Pengumpulan pelajaran yang ditarik dan praktek-praktek bagus;
- Analisis hambatan, jika ada, yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan program dan bagaiman hambatan ini telah dan bisa ditangani di program kedepan;
- Tindak lanjut apa yang telah dilakukan sebagai akibat program ini?
- Dampak apa yang ditimbulkan oleh program pada peningkatan akses bagi perempuan, warga cacat dan lingkungan secara keseluruhan.
- Menekankan isu dan pertimbangan penting lain yang terkait dengan siklus hidup Program.

Evaluasi ini akan menjadi pembelajaran dan kegiatan antisipasi kedepan. Penekanan pada pembelajaran berkaitan dengan konsep pemahaman mengenai apa yang telah dan belum dilakukan, sebagai pedoman untuk proyek di masa depan.

Acuan dan sumberdaya evaluasi

- Ringkasan Disain dan Dokumen Pelaksanaan (DSID);
- Laporan kemajuan bulanan dan laporan semesteran;
- Laporan IndII dan laporan Banak dunia serta studi dampak;
- Dokumen Disain Proyek WSI.

Kewajiban

Konsultan evaluasi akan melaksanakan kewajibajn-kewajiban berikut:

- Kajian meja secara komrehensif dan analisis dokumen (dokumen tersebut diatas);
- Disain metodologi dan alat evaluasi, termasuk metodologi studi kasus;
- Diskusi di lokasi proyek dengan para personil proyek;
- Konsultasi di lokasi proyek dengan para penerima manfaat dan pemangku kepentingan proyek;
- Analisis informasi yang terkumpul dan validasi draf pertama laporan bersama Direktur Teknis WSI.

Luaran

Pelaksana evaluasi diharapkan menghasilkan laporan evaluasi, yang mencantumkan rekomendasi yang diterima. Laporan ini harus menyebutkan:

- Informasi sebagai tanggapan terhadap tujuan evaluasi (seperti tersebut diatas);
- Pelajaran yang ditarik dari pengalaman proyek;
- Rekomendasi untuk prakarsa yang sama di masa depan;
- Laporan akan menjelaskan metodologi yang dipakai untuk evaluasi dan mencantumkan daftar orang yang diajak konsultasi dan ringkasan kuesioner dan wawancara. .

Durasi

Durasi kontrak akan berlangsung selama

Kualifikasi:

- Konsultan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan proses evaluasi;

- Konsultan harus mengenal prakarsa air minum dan sanitasi, terutama yang terkait dengan aspek tata-kelola dan peningkatan kapasitas untuk kegiatan WATSAN;
- Konsultan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pemakaian metodologi studi kasus, sebagai alat untuk pengembangan, pendidikan, penyebaran informasi dan mempengaruhi sikap dan perilaku terkait isu-isu sensitif;
- Pengetahuan harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai mengenai disain proyek dan proses pelaksanaan proyek;
- Konsultan harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan proyek pembangunan WATSAN yang berbasis masyarakat.

Prosedur Pelaporan / Pengawasan

Konsultan akan berada dibawah pengawasan dan melapor ke Direktur Teknis WSI di Jakarta, Indonesia.

LAMPIRAN 7: KERANGKA KINERJA WSI

Komponen	Hasil	Indikator Utama Hasil	Indikator Utama Luaran	Pihak yang Bertanggung-jawab	Metode Pemantauan Primer	Keterangan dan Temuan	Metode Pemantauan Sekunder
1. Hibah Air Minum	- Peningkatan investasi oleh PEMDA untuk infrastruktur air minum - Peningkatan dalam mekanisme penyediaan layanan	- 25 PDAM telah memperluas investasi untuk infrastruktur air minum dan cakupan layanan ke rumah-tangga sasaran	400.000 orang memperoleh akses ke air minum yang aman 65.000 pelanggan baru membayar tarif pemulihan biaya. Semua masukan kegiatan diberikan melalui sistim dan proses Pemerintah Indonesia.	Direktur Teknis WSI Wakil PDAM	Studi dasar Kunjungan verifikasi di lokasi proyek Laporan PDAM??		Surevi kepuasan di rumah-tangga terpilih Metode studi kasus untuk sampel rumah-tangga secara acak .
2. PAMSIMAS	- Peningkatan akses ke fasilitas air minum yang aman di masyarakat sasaran - Peningkatan praktek kesehatan dan kebersihan	- 400 desa tersambung ke fasilitas air minum - % pengurangan sakit akibat air kotor	550.000 orang mendapatkan akses ke air minum yang aman 800.000 orang mendapatkan akses ke sanitasi dasar 200.000 orang termasuk anak sekolah menunjukkan praktek kebersihan yang bagus Semua masukan kegiatan diberikan melalui sistim dan proses Pemerintah Indonesia.	Direktur Teknis WSI Wakil Bank Dunia	Studi dasar dan data Bank Dunia Laporan semesteran Bank Dunia		Laporan dan studi dampak dari Bank Dunia
3. Rencana Induk Air Limbah dan sambungan Banjarmasin	- Peningkatan akses ke fasiliotas saluran air limbah di masyarakat sasaran - Program Pemerintah Indonesia dan anggaran untuk investasi air limbah di empat kota berukuran sedang.	- PDPAL melaksanakan program perluasan saluran air limbah ke 10,000 rumah-tangga - Program investasi air limbah diterima untuk dilaksanakan	10.000 rumah-tangga tersambung ke sistim saluran limbah Banjarmasin Sambungan dipasang menurut program investasi yang disepakati Perjanjian dijalankan untuk melaksanakan program investasi oleh PEMDA Program investasi diselesaikan	WSI Technical Director Banjarmasin local government	Studi dasar Kunjungan verifikasi di lokasi proyek		Surevi kepuasan di rumah-tangga terpilih Metode studi kasus untuk sampel rumah-tangga secara acak .

Komponen	Hasil	Indikator Utama Hasil	Indikator Utama Luaran	Pihak yang Bertanggung-jawab	Metode Pemantauan Primer	Keterangan dan Temuan	Metode Pemantauan Sekunder
4. Masyarakat Madani	Disediakan oleh AusAID						
5. Tema Saling-silang	- Tema saling-silang (jender, lingkungan, warga cacat) diarus-utamakan diseluruh kegiatan WSI	- Peningkatan akses ke fasilitas air minum dan sanitasi untuk perempuan, anak dan orang cacat. - Dampak lingkungan diperkecil melalui perencanaan dan konsultasi yg efektif	Perempuan dan orang cacat diajak konsultasi terkait infrastruktur air minum dan sanitasi Rencana kelola lingkungan disusun untuk semua kegiatan air minum dan sanitasi	Direktur Teknis WSI	Laporan bulanan		Studi kasus di rumah-tangga terpilih
6. Pengelolaan Kegiatan WSI	- -WSI dikelola secara efektif dan efisien	- Serahan (*deliverable*) kegiatan tercapai – secara tepat waktu dan sesuai anggaran. - Hubungan yang ditunjukkan dengan MEF IndII	Kajian berkala mengenai rencana pelaksanaan dan pengelolaan Pencantuman pelajaran yang ditarik kedalam perencanaan kegiatan	Direktur Teknis WSI Spesialis M&E IndII	Kajian mengenai laporan kegiatan bulanan dan semesteran		Studi kasus mengenai seluruh kegiatan, terkait dengan kontribusi bagi kerangka IndII yuang lebih luas. Bagian dari pekerjaan M&E IndII yang lebih luas

LAMPIRAN 8 : JADWAL PELAKSANAAN HIBAH AIR MINUM

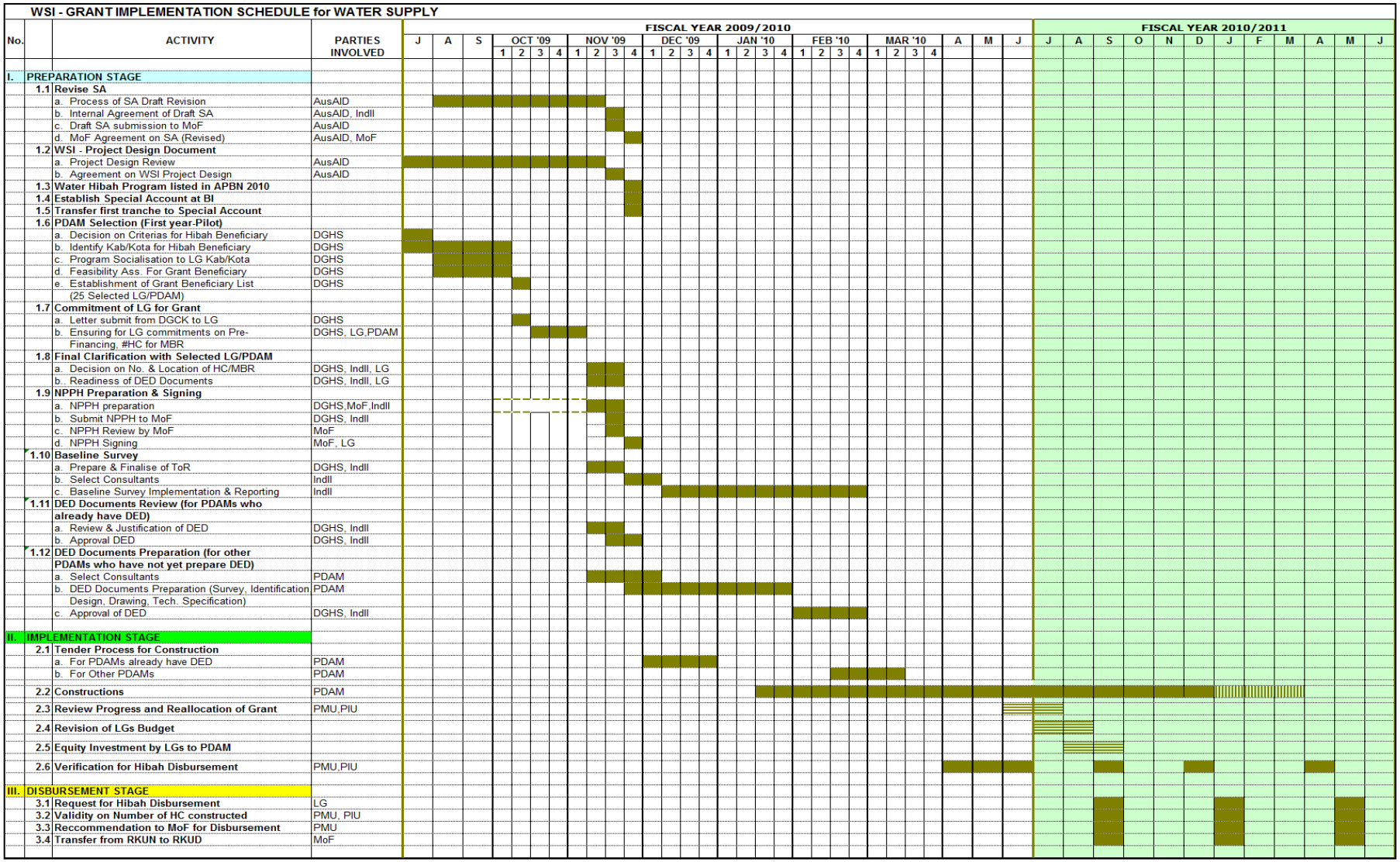

LAMPIRAN 9: JADUAL PELAKSANAAN HIBAH SANITASI

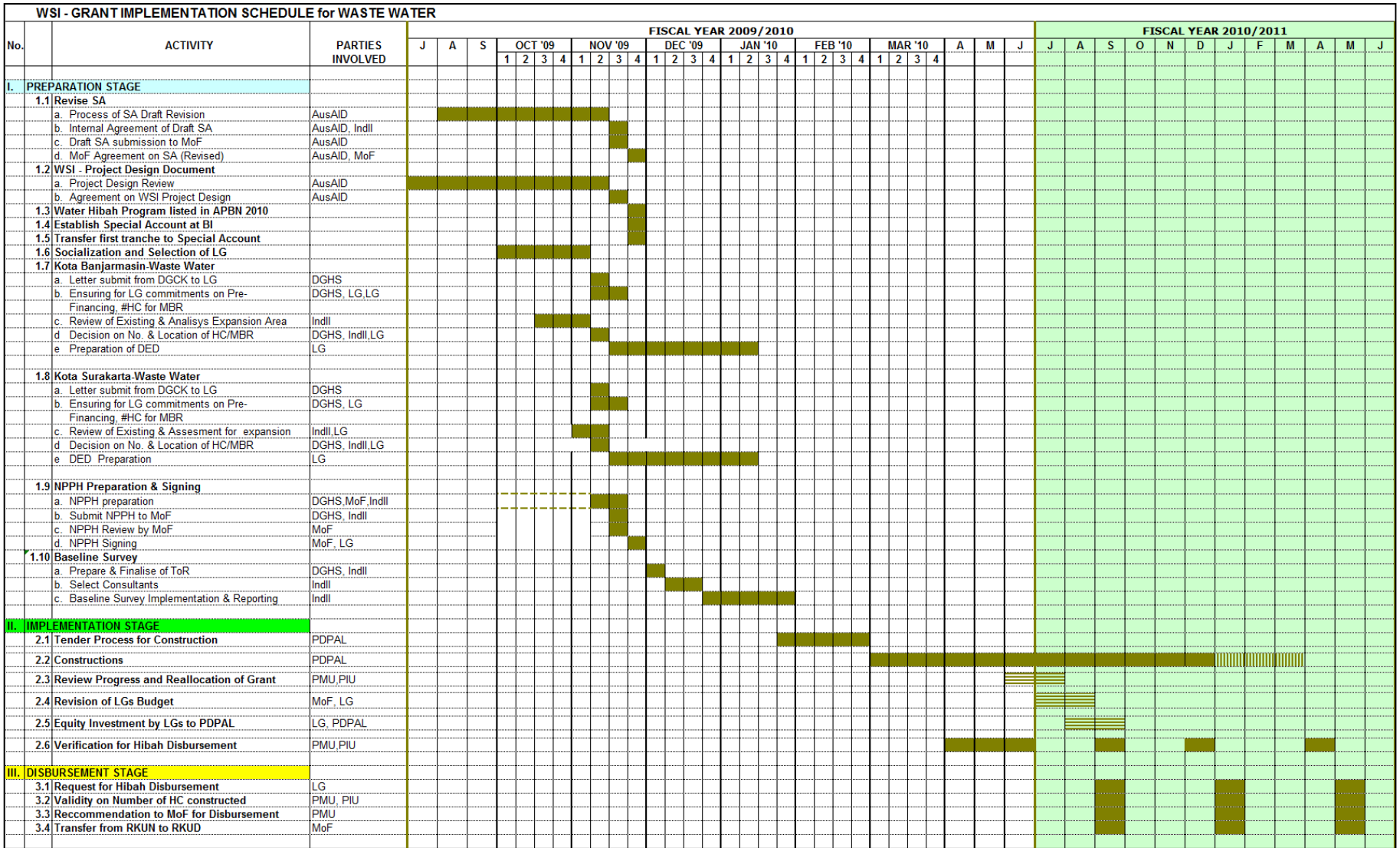

LAMPIRAN 10: ANALISIS SALURAN AIR LIMBAH BANJARMASIN

RINGKASAN

Perluasan Air Limbah Banjarmasin - Mott MacDonald – Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini (hanya ringkasan) menyajikan laporan akhir Mott MacDonald mengenai analisis independen untuk proyek perluasan air limbah Banjarmasin, dan meliputi:

- ringkasan laporan antara (interim);
- perkiraan kapasitas tak-terpakai dalam sistim jaringan untuk beban tambahan;
- perkiraan kapasitas tak-terpakai dalam instalasi pengolahan untuk beban tambahan;
- kemungkinan lokasi sambungan baru;
- model sanitasi setempat untuk kota Banjarmasin;
- perkiraan jumlah rumah-tangga untuk sistim sanitasi komunal setempat;
- kemungkinan lokasi untuk sistim sanitasi komunal setempat;
- analisis perluasan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP);
- analisis rencana kontruksi;
- analisis dokumen lingkungan;
- mengusulkan rencana penanganan (mitigasi); dan
- laporan kemajuan.

Ringkasan Eksekutif ini menyajikan temuan dan isu utama.

Tiga instalasi pengolahan melayani populasi yang tersambung di Banjarmasin, yakni: Hasan Basri (HKSN), Pekapuran Raya dan Lambung Mangkurat. Setiap instalasi pengolahan dan jaringan saluran limbah yang melayaninya dipertimbangan secara terpisah terhadap setiap pendorong proyek seperti yang ditentukan dalam lingkup pekerjaan. .

Kajian Mott MacDonald menemukan bahwa dokumen dan data berbeda-beda dari segi mutu dan kehandalan, dengan variasi yang sama dalam prosedur dan praktek pengumpulan data. Mott MacDonald telah menyusun rekomendasi untuk verifikasi dan validasi informasi utama agar bisa melakukan evaluasi yang akurat mengenai kinerja sistim yang ada dan memungkinkan perencanaan investasi modal dan operasi yang efisien. Isu dan rekomendasi utama meliputi:

Pemeriksaan visual, evaluasi data historis mengenai mutu air dan bukti subyektif menunjukkan banyak isu infiltrasi di tiga kawasan tangkapan air dan ketidak-pastian aliran aktual dan beban air limbah. Mott MacDonald telah melakukan tiga (3) tes infiltrasi untuk secara kasar membuktikan laju infiltrasi berdasarkan pengukuran langsung. Tercatat bahwa hasilnya tidak akan bisa memberikan data yang sangat terpercaya, tapi paling tidak memberikan gambaran kasar mengenai kondisi aktual. Tercatat juga bahwa laju infilitrasi yang tinggi terjadi di jaringan pipa Pekapuran dan HKSN. Mott MacDonald menyarankan bahwa survei aliran perlu dilaksanakan agar bisa mengkuantifikasi aliran dan infiltrasi aktual dan mempertimbangkannya dalam perencanaan investasi modal dan operasi. Mott MacDonald juga menyarankan kajian jaringan secara sistimatis untuk mengidentifikasi penyebab infiltrasi dan kemungkinan langkah penanganan dengan biayanya untuk meningkatkan pemakaian jaringan saluran limbah yang ada.

Cacatan mengenai ruas-ruas utama dari jaringan yang ada telah hilang. Mott MacDonald menyarankan bahwa survei jaringan perlu dilakukan untuk mendapatkan catatan yang lengkap. Data ini akan memungkinkan penyusunan model jaringan dan secara lebih akurat menentukan kapasitas pipa, juga akan bermanfaat bagi perawatan jaringan dan keterpaduan investasi modal di masa depan.

Mott MacDonald telah mengidentifikasi bahwa rumah-tangga di kawasan tangkapan air memiliki kesadaran yang rendah terkait isu sanitasi, yang bisa memperlambat proyek dan merusak keberlanjutannya, jadi banyak membatasi efektivitas program. Mott MacDonald menyarankan bahwa kampanye peningkatan kesadaran perlu direncanakan dan dilaksanakan untuk menegaskan kesediaan masyarakat untuk tersambung dan membayar layanan air limbah dan meningkatkan jumlah sambungan.

HKSN terletak di utara kawasan tangkapan air dan memiliki kapasitas 2100m³/hari dan saat ini melayani sekitar 425 rumah-tangga. Instalasi pengolahan ini sekarang sedang menjalani pekerjaan perluasan untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 5100m³/hari. Mott MacDonald memperkirakan bahwa, setelah pekerjaan perluasan selesai, instalasi pengolahan ini akan memiliki kapasitas untuk mengolah air limbah dari sekitar 2.614 properti. Evaluasi pendahuluan Mott MacDonald menunjukkan bahwa masih ada kapasitas tak-terpakai di jaringan saluran limbah, yang cukup untuk menampung 2.508 sambungan rumah tambahan. Evaluasi Mott MacDonald menunjukkan bahwa tidak ada ruas jaringan saluran limbah yang saat ini dioperasikan hingga kapasitas penuh, karena itu sambungan baru bisa dibuat di kawasan yang saat ini dilayani oleh jaring saluran limbah. Kawasan dengan kapasitas tak-terpakai paling tinggi adalah Jl. Abdi Persada (679 sambungan baru) dan Jl. AMD (533 sambungan baru).

Pekapuran terletak di bagian barat kawasan pengumpulan dan memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2500 m3/hari. Instalasi pengolahan ini melayani sekitar 2.056 sambungan dari total kemungkinan 3.779 sambungan di kawasan pengumpulan, berdasarkan evaluasi Mott MacDonald mengenai data peta GIS. Evaluasi pendahuluan Mott MacDonald menunjukkan bahwa masih ada kapasitas tak-terpakai di jaringan saluran limbah, yang cukup untuk menampung 1.723 sambungan di kawasan pengumpulan. Walau kapasitas pemompaan di instalasi pengolahan cukup untuk sekitar 1.163 sambungan baru, tapi evaluasi Mott MacDonald menemukan bahwa sekarang instalasi pengolahan ini sudah beroperasi hingga kapasitas penuh. Karena itu, kapasitas instalasi pengolahan menjadi faktor penghambat perluasan sistim saluran air limbah Pekapuran.

Lambung Mangkurat terletak di pusat kota dan memiliki kapasitas sebesar 500 m3/hari. Instalasi pengolahan ini sekarang melayani 1.298 sambungan, yang mencakup cakupan 100% di kawasan pengumpulan saat ini. Evaluaasi pendahuluan dari Mott MacDonald menunjukkan bahwa buangan volumetrik air limbah ke instalasi pengolahan lebih besar daripada kapasitas instalasi ini,.

Mott MacDonald memakai pemetaan GIS untuk secara visual menyajikan perkiraan lokasi sambungan yang ada, dan kemungkinan lokasi sambungan baru di masing-masing dari tiga kawasan tangkapan air. Lokasi jaringan dan saluran induk air limbah saat ini, dan saluran induk dan jaringan baru yang direncanakan, juga dipetakan. Peta ini menujukkan bahwa di HKSN masih ada potensi untuk 1508 sambungan tambahan, di Pekapuran 1773 sambungan tambahan, dan di Lambung Mangkurat 360 sambungan tambahan. Setelah sambungan baru, kita akan memiliki 100% cakupan layanan untuk Lambung Mangkurat dan Pekapuran Raya. Kapasitas pipa akan 100% termanfaatkan dan tidak ada lagi kapasitas yang memakai pipa induk yang ada.

Sanitasi komunal setempat, sebagai solusi lainnya untuk pengelolaan air limbah, telah menjadi pokok analisis oleh Mott MacDonald dalam fase berikutnya. Diidetifikasi bahwa ada tiga tipe sistim komunal yang dipakai di Banjarmasin, yakni: septik tank komunal, penyimpanan kolektif sementara (model Imhoff) dan toilet umum (MVK). Mott MacDonald memprioritaskan 5 (lima) kawasan untuk sisitim

komunal di Banjarmasin, berdasarkan analisis sebelumnya yang dilaksanakan oleh Proyek Pembangunan Sektor Sanitasi Indonesia (ISSDP). Berdasarkan kegiatan “jalan bersama” yang dilakukan bersama lurah-lurah dan PDPAL kota Banjarmasin, Mott MacDonald mengidentifikasi jumlah calon rumah-tangga untuk sanitasi komunal setempat. Jumlah total sebanyak 9.024 rumah-tangga ini akan dikenai pembangunan sanitasi komunal setempat, yang terdiri dari 7.206 rumah-tangga untuk fasilitas pengumpulan kolektif sementara, 1.055 rumah-tangga untuk tangki septik komunal, dan 763 rumah-tangga untuk toilet umum (MCK).

Mengenai dokumen lingkungan, Mott MacDonald telah menilai dokumen lingkungan yang ada yang disusun oleh PDPAL. Untuk menyingkat dan memenuhi keharusan memiliki DPPL, PDPAL hingga kini telah menyusun UKL/UPL untuk instalasi Pekapuran dan Lambung Mangkurat. Tidak ada dokumen yang disusun bagi HKSN. UKL dan UPL tersebut belum dievaluasi oleh BLH Banjarmasin. Kajian mengenai UKL dan UPL ini menunjukkan bahwa dokumen ini tidak lengkap. Ketentuan untuk dokumen ini dijelaskan secara umum di Lampiran 1 (A.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 / MenLH / 3 / 1994 mengenai Pedoman Umum untuk Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Prosedur Pemantauan Lingkungan, Pasal D). Batas waktu untuk membuat DPPL bagi tempat operasi seperti WWTP adalah 25 September 2009, seperti dijelaskan di A.6 diatas. Disarankan bahwa dokumentasi dilengkapi sesegera mungkin agar tempat instalasi tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan.

Kawasan layanan HKSN lebih luas dari 500 hektar. Sesuai A.4 diatas, PDPAL diharuskan menyusun ANDAL. Jika kontruksi sudah lebih dari 30% selesai, ANDAL harus diselesaikan sesegera mungkin.

Laporan ini berdasarakan temuan dalam evaluasi cepat Mott MacDonald dalam 10 hari kerja pertama. Mott MacDonald sekarang melanjutkan ke fase berikutnya, dengan Draf Laporan Akhir dijadualkna untuk diserahkan pada tanggal 09 November 2009.

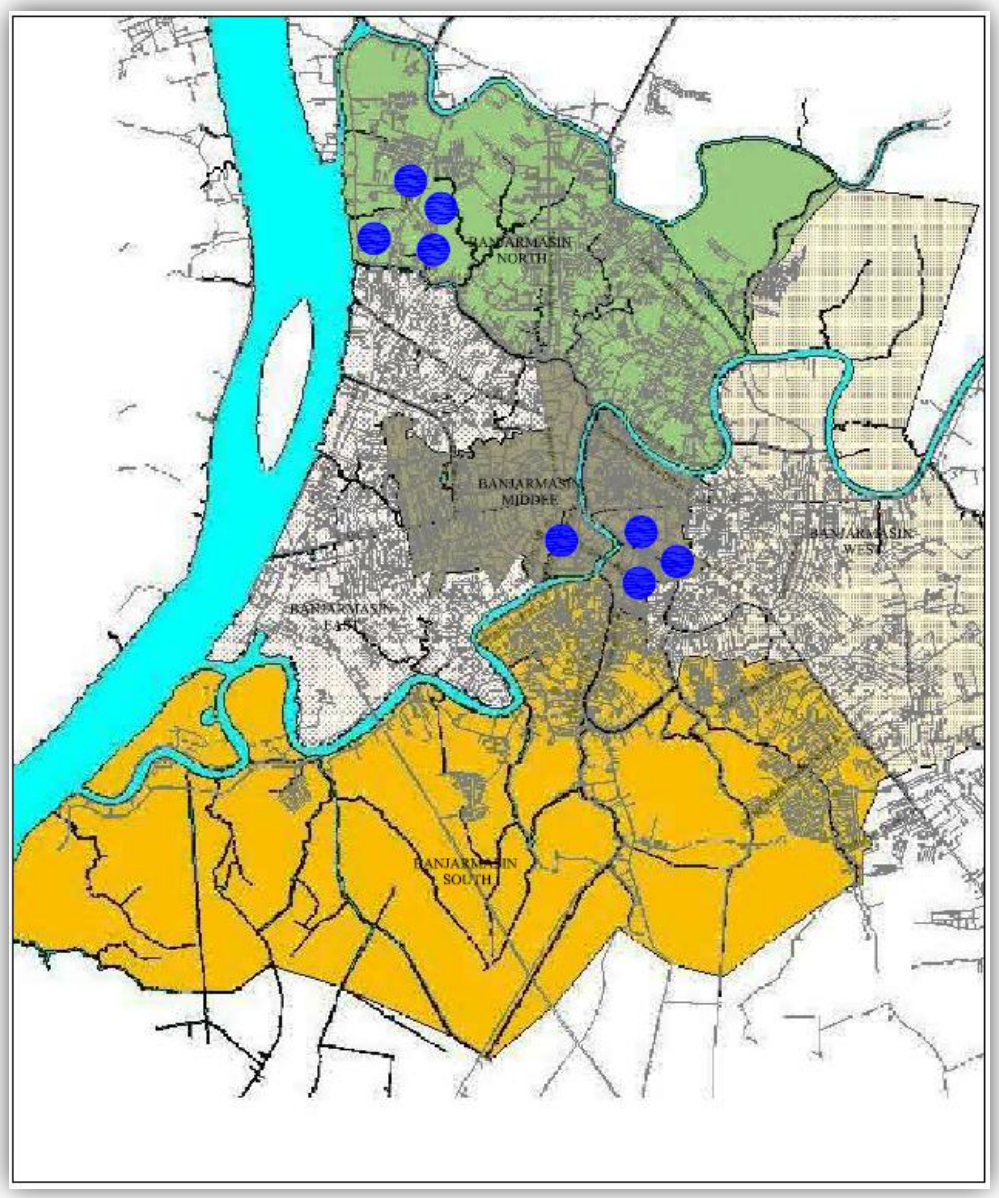
BANJARMASIN NORTH
BANJARMASIN MIDDLE
BANJARMASIN WEST
BANJARMASIN EAST
BANJARMASIN SOUTH

LAMPIRAN 11: ANALISIS SISTIM SALURAN AIR LIMBAH SURAKARTA OLEH INDII

Pada tahun 2008, populasi Surakarta adalah 556.054 jiwa dalam kawasan perkotaan seluas 4.404 hektar. Kontribusi air limbah adalah 89% dari rumah-tangga, 7% dari industri kecil, dan 4% dari rumah-sakit dan pabrik. Surakarta sudah memiliki sistim saluran air limbah dengan cakupan layanan sebesar 10%. Sistim ini dibangun selama 1995 – 2001 melalui Program Pembangunan Perkotaan Semarang Surakarta (SSUDP). Sistim saluran air liombah ini meliputi:

Subyek	Total	Tahun
- WWTP Semanggi 30 lt/detik	1 unit	1999 / 2000
Perluasan tangki aerasi, kap. 30 lt/det	1 unit	2008
- IPAL Mojosongo 24 lt /detik	1 unit	1997 / 1998
- Interseptor	12 km	1997 - 1999
(600 mm s/d 1.300 mm)		
- Pipa lateral dan sekunder	70 km	1998 / 1999
(150 mm s/d 500 mm)		2004-2009
- Sambungan properti	10.800 Unit	1997 - 2008

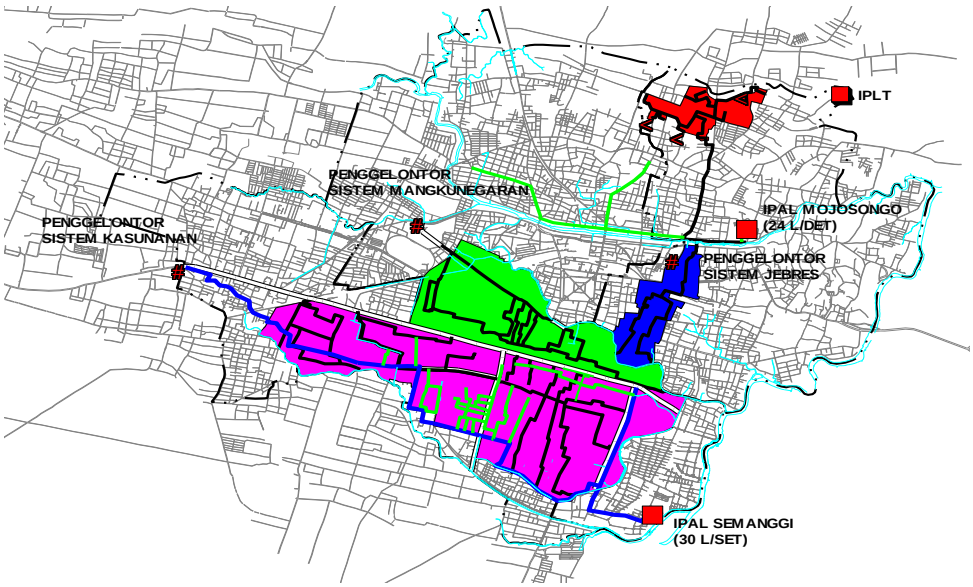

Service area's

WWTP Mojosongo

Perumnas Mojosongo : 3.000 smb.

Kel. Mojosongo : 734 smb.

Kel. Nusukan : 681 smb.

Kel. Kadipiro : 125 smb.

WWTP Semanggi

Kel. Mangkubumen	: 350 smb.	Kel. Punggawan	: 25 smb.
Kel. Ketelan	: 88 smb.	Kel. Keprabon	: 62 smb.
Kel. Timuran	: 26 smb.	Kel. Kampung Baru	: 87 smb.
Kel. Manahan	: 1 smb.	Kel. Pajang	: 433 smb.
Kel. Sondakan	: 616 smb.	Kel. Laweyan	: 27 smb.
Kel. Bumi	: 237 smb.	Kel. Tipes	: 461 smb.
Kel. Kemlayan	: 22 smb.	Kel. Kratonan	: 269 smb.
Kel. Serengan	: 631 smb.	Kel. Danukusuman	: 497 smb.
Kel. Joyosuran	: 539 smb.	Kel. Penumping	: 118 smb.
Kel. Sriwedari	: 120 smb.	Kel. Jayengan	: 150 smb.
Kel. Panularan	: 677 smb.	Kel. Kauman	: 106 smb.
Kel. Kedung Lumbu	: 133 smb.	Kel. Pasar Kliwon	: 56 smb.
Kel. Baluwarti	: 121 smb.	Kel. Semanggi	: 334 smb.

Operasi sistim air limbah menjadi tanggung-jawab PDAM. PDAM telah memperluas sistim yang ada dengan jalan memperpanjang saluran air limbah hingga menjangkau kawasan layanan baru di kota, dan telah memasang unit tangki aerasi tambahan untuk WWTP Semanggi. Pemerintah kota ini sekarang ingin memperluas lagi sistim untuk menjangkau 6.000 sambungan properti tambahan. Perluasan sistim dilakukan secara bertahap dan dibiayai oleh pemerintah kota, PDAM dan oleh pemerintah pusat. Tahap pertama akan memakai kapasitas tak-terpakai WWTP Semanggi dan sistim saluran induk yang ada. Tahap awal ini akan memperbanyak saluran retikulasi yang akan tersambung ke 3.000 properti tambahan di kawasan layanan Semanggi hingga awal 2011. Tahap awal ini merupakan lingkup pekerjaan yang diusulkan untuk bantuan pendanaan dari program WSI. Lingkup pekerjaan ini adalah mengkaji mutu dan kesiapan disain yang disusun oleh pemerintah kota dan yang akan diajukan untuk bantuan pendanaan dari AusAID.

Kawasan Perluasan Layanan yang Diusulkan

Pemerintah kota ini sekarang ingin memperluas lagi sistim untuk menjangkau 6.000 sambungan properti tambahan. Perluasan sistim dilakukan secara bertahap dan dibiayai oleh pemerintah kota, PDAM dan oleh pemerintah pusat. Tahap pertama akan memakai kapasitas tak-terpakai WWTP Semanggi dan sistim saluran induk yang ada. Tahap awal ini akan memperbanyak saluran retikulasi yang akan tersambung ke 3.000 properti tambahan di kawasan layanan Semanggi hingga awal 2011. Tahap awal ini merupakan lingkup pekerjaan yang diusulkan untuk bantuan pendanaan dari program WSI.

Kawasan Layanan Semanggi

Kawasan layanan Semanggi dilayani oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP) Semanggi dengan kapasitas total saat ini sebesar 60 lt/detik. Kapasitas WWTP ditingkatkan mulai dari 30 lt/detik

menjadi 60 lt/detik selama tahun anggaran 2008. Proses pengolahan tambahan dengan tangki aerasi, Gambar ……, menunjukkan kawasan layanan dan lokasi kawasan layanan WWTP Semanggi yang meliputi:

Kel. Mangkubumen	: 350 smb.	Kel. Punggawan	: 25 smb.
Kel. Ketelan	: 88 smb.	Kel. Keprabon	: 62 smb.
Kel. Timuran	: 26 smb.	Kel. Kampung Baru	: 87 smb.
Kel. Manahan	: 1 smb.	Kel. Pajang	: 433 smb.
Kel. Sondakan	: 616 smb.	Kel. Laweyan	: 27 smb.
Kel. Bumi	: 237 smb.	Kel. Tipes	: 461 smb.
Kel. Kemlayan	: 22 smb.	Kel. Kratonan	: 269 smb.
Kel. Serengan	: 631 smb.	Kel. Danukusuman	: 497 smb.
Kel. Joyosuran	: 39 smb.	Kel. Penumping	: 118 smb.
Kel. Sriwedari	: 120 smb.	Kel. Jayengan	: 150 smb.
Kel. Panularan	: 677 smb.	Kel. Kauman	: 106 smb.
Kel. Kedung Lumbu	: 133 smb.	Kel. Pasar Kliwon	: 56 smb.
Kel. Baluwarti	: 121 smb.	Kel. Semanggi	: 334 smb.

Kapasitas Terpasang dari Pipa Induk

Beban saat ini pada jaringan air limbah telah dihitung untuk mempelajari kemungkinan menambah sambungan baru. Gambar skematis sistim jaringan disajikan di Gambar ….. Panjang pipa induk dan pipa inseptor adalah 17 km. Diameter pipa induk adalah 300 – 600 mmm, diameter interseptor adalah 600 – 1300 mm. Pipa induk dan pipa interseptor bisa melayani 25.000 sambungan (data PDAM)..

Kapasitas yang Ada di Instalasi Pengolahan Air Limbah

WWTP terdiri dari bar screen, grid chamber, tangki ekualisasi, stasiun pompa influent, aerasi, sedimentasi, pompa endapan tinja (sludge) dan sludge drying bed. Lokasi WWTP ditunjukkan dalam Gambar ……

Kapasitas semula dari WWTP Semanggi adalah 30 l/det. Selanjutnya kapasitas ini ditingkatkan dengan menambah tangki aerasi hinga mencapai 60 l/detik. Dengan kapasitas saat ini, instalasi ini bisa mengolah limbah dari 12.000 sambungan properti.

Standar Mutu Air Limbah dan Air Buangan (*effluent)*

Mutu air limbah tidak dipantau setiap hari. Laporan laboratorium mengenai mutu air limbah juga tidak ada. Dari kunjungan lapangan, diamati bahwa perancang WWTP memakai tangki aerasi. Staf WWTP menegaskan bahwa air limbah terolah dari WWTP bermutu bagus dan tanpa bau. Air buangan dialairkan ke sungai Pemulung melalui saluran terbuka. Analisis mengenai mutu air buangan dari WTTP Semanggi (data dari PDAM):

Analisis di Maret 2009	*Inlet*	: BOD 100 mg/l,TSS 60.5 mg/l, pH 7.9
	Outlet	: BOD 21 mg/l, TSS 23.0 mg/l, pH 8,20
Analisi di April 2009	*Inlet*	: BOD 92 mg/l,TSS 78.5 mg/l, pH 7.5
	Outlet	: BOD 29,96 mg/l, TSS 28 mg/l, pH 7,52

Kesimpulan:

1. WWTP Semanggi memiliki kapasitas tak-terpakai sebesar 30 l/det yang setara dengan 6000 sambungan
2. Saluran induk dan interseptor mengalirkan kapasitas untuk 25.000 sambungan
3. Kesiapan untuk memasang sambungan baru sekitar 4000 unit, menyertakan pipa lateral dengan diameter 150 mm dan 200 mm (ditunjukkan di Gambar …..).

LAMPIRAN 12: LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN AIR LIMBAH TINGKAT KOTA OLEH INDII

Umum

Kondisi sanitasi perkotaan selalu buruk di kota-kota Indonesia, karena berbagai sebab, paling tidak sebabnya adalah urbanisasi yang cepat, solusi yang tidak tepat, tata-kelola yang buruk, dan rendahnya kapasitas kelembagaan dan organisasi dalam sektor. Desentralisasi yang sedang berjalan dan komitmen yang semakin besar dari pemerintah yang baru, sekarang menawarkan peluang untuk mengubah kehidupan jutaan orang penghuni kota melalui intervensi bersasaran dalam manajemen sanitasi di kota besar melalui kegiatan ini.

Kota-kota yang akan mendapatkan layanan adalah: (akan ditentukan kemudian)

Setiap kota ini dipilih memalui proses yang dirancang untuk memastikan komitmennya untuk peningkatan layanan penglolaan air limbah di wilayah juridiksinya. Kota-kota tersebut juga harus memenuhi kriteria prioritisasi yang diterapkan untuk memulai "jaringan pipa" dari pemerintah daerah yang berkomitmen di masa depan, dan meningkatkan harmonisasi bantuan donor dan program Pemerintah Indonesia.

Lingkup pekerjaan untuk layanan di wilayah juridiksi setiap kota meliputi pengembangan:

- Rencana Induk
- Studi Kelayakan dan
- Disain Teknis Rinci (*Detailed Engineering Design*) untuk satu atau lebih intervensi yang akan meningkatkan pengelolaan air limbah.

Pekerjaan akan didokumentasikan agar pihak yang kompeten di masa depan bisa menilai usulan dan menyusun disain tanpa harus mengacu pada penyusun disain pertama. Perencanaan akan mentargetkan intervensi air limbah rumah-tangga, walau Rencana Induk harus mempertimbangkan dampak air hujan saat ini dan yang direncanakan, infrastruktur persampahan dan sistim pengelolaan dalam rencana manajemen limbah rumah tangga. Pembuangan limbah industri secara aman juga perlu dipertimbangkan tapi, jika jelas diminta oleh pemerintah daerah peserta, pengelolaannya akan menjadi masalah yang harus diatur oleh pemerintah daerah, tapi layanan pengolahan tidak diberikan untuk limbah ini. .

Tidak ada batasan tipe (dan jumlah) intervensi namun intervensi harus tepat untuk kondisi fisik, kultural, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan yang ada di setiap lokasi. Lingkup berikut ini akan dipertimbangkan:

1. Program perubahan perilaku, seperti kesadaran masyarakat, kampanye cuci-tangan, advokasi dan kegiatan komunikasi lainnya;
2. Meningkatkan fasilitas toilet / jamban individual dan komunal, serta menyediakan fasilitas pengolahan limbah setempat untuk kampung yang ada dan yang baru;
3. Peningkatan penyediaan fasilitas toilet umum untuk kampung yang ada dan yang baru, dengan pengolahan setempat, termasuk peningkatan pengelolaan lingkungan seperti produksi biogas dan daur ulang air (yang disebut opsi "SANIMAS");
4. Fasilitas toilet untuk tempat umum (sekolah, pasar, tempat pembuangan sampah, dll) dengan pengolahan setempat;
5. Pengumpulan endapan tinja (kotoran manusia) (melalui berbagai bentuk tangki vakum) dengan pengolahan khusus dan/atau peraturan mutu untuk penyedia jasa swasta untuk layanan ini;
6. Peningkatan fasilitas pengolahan endapan tinja yang ada dan pembangunan fasilitas yang baru;

7. Sistim saluran air limbah dan fasilitas pengeolahan air limbah terpusat (*off-site*) untuk semua diatas;
8. Pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran data, informasi dan pengetahuan mengenai layanan dan fasilitas sanitasi; dan
9. Peningkatan pengembangan organisasi, kelembagaan dan kebijakan, termasuk penerapan program kredit kecil, pengembangan koperasi, pengembangan dan pemberlakuan peraturan atau penyediaan insentif untuk memicu praktek sanitasi yang lebih bagus.

Memang tidak pembatasan terkait tipe (dan jumlah) intervensi tapi kepadatan populasi yang tinggi dan ruang hidup yang relatif terbatas di banyak kota besar, menyiratkan bahwa pengolahan terpusat dan jaringan saluran air limbah menjadi opsi yang umum dipakai.

Lingkup pekerjaan tidak menyertakan bantuan untuk instansi pusat terkait pengelolaan program, disain rinci atau pelaksanaan peningkatan kapasitas tertentu, juga kegiatan pemantauan dan evaluasi. Walau begitu Konsultan diharapkan memberikan bantuan secara ad-hoc seperti diminta untuk kegiatan terkait ini, yang akan dilakukan oleh orang lain.

Tujuan

Secara umum, fase perencanaan ini akan (i) menciptakan lingkungan yang memberdayakan di kota peserta; (ii) mengembangkan budaya partisipatif dan kapasitas kelembagaan instansi-instansi utama lokal; (iii) mengidentifikasi, memilih dan merancang solusi teknis yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efektif-biaya; dan (iv) menjelaskan peningkatan kebijakan, kelembagaan dan organisasional yang diperlukan untuk mempertahankan peningkatan pengelolaan air limbah, pertama-tama melalui pelaksanaan intervensi yang layak yang DEDnya telah disusun.

Tujuan khususnya adalah untuk memberikan Rencana Induk (*Master Plan*), Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Disain Teknis Rinci (*Detailed Engineering Design*), agar kota bisa memulai pelaksanaan peningkatan.

Rencana Induk

Rencana induk akan menjelaskan intervensi yang disepakati, termasuk investasi fisik yang diperkirakan dalam horison perencanaan selama 20 tahun. Investasi utama dalam empat periode lima-tahunan juga akan dijelaskan. Rencana ini akan mencantumkan strategi yang dijelaskan dan telah disusun didalam “Strategi Sanitasi Kota” (*City Sanitation Strategy*), atau harus menyertakan bab yang menjelaskan strategi yang dikembangkan sebagai bagian dari proses perencanaan.

Proses penyusunan rencana induk akan dirancang untuk memastikan bahwa suatu daftar investasi yang terjangkau, bisa diterima dan diprioritaskan ditentukan dengan cukup baik agar studi kelayakan bisa dilaksanakan untuk prioritas mendesak terpilih. Proses ini harus membantu pengembangan kapasitas instansi lokal dalam pengelolaan isu sanitasi secara lebih baik di wilayah kerja mereka, termasuk pemakaian Rencana Induk (dan pemutakhiran selanjutnya) untuk koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan sektor.

Jika CSS sudah ada, proses perencanaan harus mencantumkan kajian penting mengenai Strategi ini dari segi mutunya, yang akan dinilai dalam empat bidang umum:

1. Deskripsi situasi terkini dan identifikasi isu penting dan faktor sukses, yang mencantumkan “audit kinerja” untuk kondisi sanitasi di kota dan analisis mengenai pengaturan kelembagaan yang dipakai untuk pelaksanaan kinerja saat ini dan yang mempangruhi kinerja di masa depan.
2. Analisis mengenai dimana kota ingin berada dalam horisson perencanaan dan interval lima-tahunan, yang memberikan perhatian khusus pada visi kota seperti yang disebutkan dalam berbagai dokumen perencaan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia, misi dan mandat dari instanasi terkait PEMDA, dan kejelasan tujuan strategis dan target kinerja.
3. Kelayakan tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh kota, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan strategis mereka – kelayakan meliputi tidak hanya indikator pencapaian tujuan, seperti kawasan geografis yang dilayani, cakupan populasi dengan berbagai sistim dan keseluruhan biaya investasi dan O&M, tapi juga faktor kapasitas yang mendasar seperti peningkatan yang direncanakan dalam kajian kebijakan dan perubahan prosedur, tata-kelola sektor dan struktur organisasi, orientasi pelanggan, prosedur perencanaan dan penganggaran, O&M, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumberdaya manusia dan sistim informasi.
4. Bagaimana cara mempertahankan keberhasilan, yang mencakup pengaturan yang dijalankan atau direncanakan untuk pemantauan kinerja, evlauasi kinerja serta insentif dan disinsentif untuk mengembangkan atau menjalankan fungsi ini.

Yang paling penting adalah indikasi “rasa memiliki” pemerintah daerah untuk Strategi dan mutu strategi. Diharapkan strategi yang dimaksud akan menjadi salah satu “pentahapan (incrementalism) strategis” dimana layanan yang semakin bagus membutuhkan peningkatan lebih lanjut dan aliran khusus pendapatan untuk membantu pembiayaan.

Mengenai “rasa memiliki,” proses perencanaan akan mengundang partisipasi aktif dari kelompok pemangku kepentingan utama dengan jalan menyertakan kelompok terkait secara tepat waktu, dengan penyediaan informasi spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok. Konsultan akan membantu pembentukkan Kelompok Kerja (Pokja Sanitasi) di kota yang belum memiliki kelompok ini dengan arahan dari Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) atau program pemerintah pusat lainnya, dan akan membantu pengembangan strategi selama periode kontrak. Pokja ini akan memberi konsultan saran, mengkaji pekerjaan konsultan dan mendukung permohonan persetujuan utama, seperti untuk rencana induk final, yang akan diminta dari kepala daerah (bupati/walikota) dan DPRD.

Jika CSS belum ada, proses perencanaan akan dirancang untuk menghasilkan Rencana Induk yang mencantumkan empat bidang umum diatas. Jika CSS sudah ada, Rencana Induk akan mengembangkan strategi didalam CSS yang bisa dimengerti.

Perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan bahwa intervensi sudah tepat untuk semua kalangan masyarakat, termasuk perempuan dan warga miskin. Karena itu diharapkan MP akan:

1. Mencakup wilayah geografis dari juridiksi kota dan menjelaskan beragam intervensi berdasarkan populasi terkini dan proyeksi populasi, kondisi geografis dan lingkungan, faktor sdio-ekonomi dan dan kebutuhan penerima manfaat.
2. “Kawasan Layanan” akan ditentukan (dan mungkin “dibuat resmi”), masalah sanitasi diperinci di setiap kawasan, dilengkapi dengan penjelasan mengenai kemungkinan solusi, mulai dari peningkatan pengolahan setempat hingga sistim saluran air limbah konvensional yang mengolah limbah secara terpusat.
3. Permintaan dan keterjangkauan berbagai tingkat layanan akan dipertimbangkan, bersamaan dengan teknologi yang bisa dikembangkan untuk memenuhi permintaan ini.

4. Dengan cara ini, satu set peningkatan “mutu-harga” dalam layanan akan dikembangkan dan akan memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat, yang mungkin akan berkelanjutan.
5. Keberlanjutan akan dinilai khususnya dari segi kemampuan dan kesediaan pemerintah daerah, dan terutama masyakat, untuk membayar peningkatan layanan dalam jangka panjang.
6. Pertimbangan juga perlu diberikan untuk biaya jangka panjang dan manfaat dari berbagai konfigurasi, seperti pengumpulan setempat versus terpusat dan opsi pengolahan.

Serangkaian perubahan perilaku, serta opsi pengembangan kapasitas dan teknis, juga akan disajikan ke dan dipertimbangkan oleh Pokja, bersama dengan perkiraan kebutuhan modal dan belanja operasional, kemungkinan sumber dana dan strategi untuk keberhasilan pelaksanaan.

Suatu hal yang wajib dalam rangkaian ini adalah intervensi perubahan perilaku, juga peningkatan kapasitas.

Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh DPRD dan walikota untuk serangkaian intervensi, Konsultan akan menyusun dokumen Rencana Induk yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah, dan asepk-aspek terkait akan dicantumkan dalam RPJMD, RKT dan anggaran kota, dengan demikian siap untuk studi kelayakan yang lebih rinci.

Studi Kelayakan

Umum

Studi kelayakan akan dilaksanakan untuk intervensi terpilih yang diprogramkan untuk periode lima-tahunan. Pemilihan intervensi akan didasarkan pada perkiraan nilai investasi, alternatif yang layak dan kemungkinan dampak intervensi terpilih.

Fase studi kelayakan akan mencantumkan empat kegiatan yang saling terkait:

- studi kelayakan klasik (teknis) dimana pilihan tertentu dibuat untuk intervensi terbaik – baik yang bersifat teknologi atau kelembagaan
- penyaringan dan analisis terkait dampak lingkungan
- masalah terkait lahan, seperti pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan pemindahan penduduk jika tidak bisa dihindari, dan
- pengembangan rencana peningkatan kapasitas.

Standard, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia akan menjadi dasar studi ini. Jika standard, prosedur dan kriteria tidak ada, maka Konsultan akan menekankan fakta ini dan menyarankan tindakan, dan tindakan yang lebih disukai adalah untuk membantu sistim dan prosedur mendasar dari pemerintah Indonesia.

Studi kelayakan harus dimaksudkan untuk menunjukkan, dengan kepastian yang memadai, bahwa intervensi yang diusulkan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya (tekonologi, ekonomi, sosiologi dan lingkungan) dan diperbandingkan dengan intervensi alternatif lainnya, dan biaya dan manfaat terbagi secara adil di masyarakat dan dari segi waktu.

Studi Teknis

Untuk setiap studi kelayakan, proses berikut (yang tidak harus dilakukan secara linear) akan dipertimbangkan:

1. Dasar pemikiran tertentu dan tujuan intervensi akan ditegaskan kembali ke Pokja.
2. Survei lanjutan akan dilakukan sesuai keperluan; ini bisa survei teknis atau sosio-ekonomi – termasuk kondisi infrastruktur yang ada, topografi, seurvei tanah dan hidrolis (khususnya jika bisa membantu DED) dan dan survei permintaan (penilaian tergantung) masyarakat, dan persepsi karyawan dan pemangku kepentingan.
3. Analisis dan peramalan kebutuhan, analisis kapasitas fasilitas yang ada dan penentuan kesenjangan antara kebutuhan kedepan dan fasilitas yang ada setelah optimalisasi.
4. Indetifikasi alternatif teknis untuk menutup kesenjangan, termasuk analisis dampak lingkungan dari alternatif utama.
5. Melaksanakan analisis kelembagaan, yang akan menyertakan dalam tujuannya identifikasi kemungkinan pemulihan biaya dan mekanisme subsidi, tapi juga akan mencakup secara lebih khusus empat bidang MP, yakni isu kinerja hambatan kelembagaan/organisasi, cara pengaturan di masa depan yang bisa mengurangi hambatan ini, peran instansi dalam mencapai tujuan tertentu dan mempertahankan atau mengelola peningkatan sektor.
6. Melakukan analisis biaya terkecil (dengan harga ekonomi) dan pemilihan opsi yang lebih disukasi.
7. Melakukan analisis ekonomi dan manfaat-biaya finanasial untuk memeriksa apakah tingkat pengembalian modal (*rate of return*) internal ekonomi dan finansial memenuhi kriteria pemerintah.
8. Memperkirakan total manfaat proyek dan kejadiannya di berbagai kalangan penerima manfaat.
9. Menyelesaikan analisis keuangan lebih lanjut dan mengembangkan rencana untuk mempertahankan investasi, lebih disukai melalui mekanisme pengguna-membayar.

Studi Lingkungan

Untuk setiap penyaringan lingkungan, tujuan awalnya harus untuk menentukan jika investasi yang diusulkan menimbulkan dampak penting, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika ditentukan bahwa ada potensi dampak penting, maka Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus disusun untuk pemerintah daerah, yang akan memerlukan ijin dari komisi AMDAL propinsi atau kota. Jika AMDAL tidak diperlukan, maka penyaringan akan menentuklan apakah rencana pengelolaan (UKL) dan/atau pemantauan (UPL) lingkungan diperlukan atau tidak. Jika dirasa perlu, pekerjaan lebih lanjut harus dilakukan dalam fase DED.

Masalah Lahan

Kebutuhan pembebasan lahan harus ditentukan pada tahap ini, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Rencana survei kepemilikan lahan (cadastral) dan, jika diperlukan, rencana relokasi rinci mungkin diperlukan untuk pembebasan lahan yang besar.

Rencana Peningkatan Kapasitas

Konsultan akan bekerjasama secara erat dengan sekretariat dan instansi pemerintah daerah peserta untuk pengembangan kapasitas. Ini akan dilakukan dengan jalan membantu pemerintah daerah dan operatornya dalam menyusun rencana untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan organisasi, yang tanpanya keberlanjutan investasi akan terancam. Rencana ini harus dibagi menjadi:

- intervensi yang operator infrastruktur bisa mulai dan kelola (mungkin disebut "Rencana Tindak Peningkatan Operasi dan Keuangan/FOPIP"), dan
- intervensi yang harus dimulai dan dikelola oleh kelompok inti pemerintah daerah, tapi yang sangat mempengaruhi insentifi untuk operator (mungkin disebut "Rencana Tindak Pengembangan Kelembagaan Lokal/LIDAP").

LIDAP dianggap sangat penting karena rencana ini bisa menciptakan lingkungan yang memberdayakan dan yang lebih baik, tujuan yang lebih jelas untuk instansi operator, juga meningkatkan akuntabilitas dan insentif karena peran dibeda-bedakan dan lebih banyak *check and balance* (pemeriksaan dan perimbangan) diterapkan dalam pemerintahan.

Dokumentasi dan Proses FS (Studi Kelayakan)

Semua fase studi ini akan didokumentasikan dalam laporan FS untuk setiap kota, yang membahas intervensi sesuai standar nasional atau yang bisa diterima.

Investasi pelengkap yang diharapkan untuk pengembangan kapasitas di tingkat lembaga, organisasi dan.atau perorangan, tidak memerlukan studi dan dasar pembenaran yang menyeluruh; meski begitu beberapa usaha perlu dilakukan untuk memberikan dasar pembenaran bagi semua investasi dari segi manfaat dan biaya, walau jika semua tidak bisa dikuantifikasi.

FS harus secara khusus menjelaskan pengaturan untuk pelaksanaan investasi, pemutakhiran MP dan tata-kelola program, yanag dirasa penting untuk mengembangkan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan layanan.

Hasil studi akan disajikan ke otoritas daerah dan pusat. Otoritas kota akan memberikan persetujuan secara tertulis untuk hasil studi kelayakan secara umum dan setiap investasi yang diusulkan. Fase Disain Teknis Rinci (DED) kemudian bisa dimulai untuk setiap intervensi.

Disain Teknis Rinci

Fase Disain Teknis Rinci adalah untuk memberikan disain yang efektif-biaya dengan orientasi untuk memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam MP, FS dan norma industri, standar, prosedur dan kriteria. Disain ini harus berorientasi ke kinerja sebanyak mungkin, yakni standar kinerja yang diinginkan harus dinyatakan dan pelaksana kontruksi diminta untuk menghasilkan dan melaksanakan disain yang memenuhi standar tersebut, setelah itu pembayaran bisa dilakukan. Pekerjaan yang lebih besar mungkin perlu mempertimbangkan skema insentif, seperti disain- bangun-operasi.

Setiap disain harus didokumentasikan secara memadai agar pelaksana kontruksi / pelaksana pekerjaan bisa melaksanakan disain tanpa harus berhubungan dengan perancang disain.

Disain diharapkan dimulai melalui tahap-tahap berikut (tidak harus berurutan):

1. *Pemetaan*: pengumpulan peta, foto udara dan informasi sekunder lain dan yang terakhir pembuatan peta tapak proyek untuk setiap investasi terpilih.
2. *Survei dan Investigasi:* pengumpulan informasi primer dan pembuatan informasi kontekstual untuk disain, yang meliputi:
    a. Pemeriksaan fasilitas yang ada, yang meliputi fasilitas sanitasi setempat dan terpusat yang dipilih, juga drainase, cadangan jalan, sumber polusi dan lokasi lain yang terkait. Hasilnya akan dicatat dalam "Laporan Inventarisasi Lapangan."
    b. Penetapan baku mutu (*benchmark*), lalu dimulainya (i) penyelidikan tanah, badan air penerima dan mutu air limbah sesuai keperluan, yang menghasilkan Laporan Teknis yang tepat dan (ii) survei topografi yang mengukur ciri-ciri lokal dan menghasilkan rencana (gambar bagian jika diperlukan) dan Laporan mengenai Pengukuran dan Baku Mutu.
    c. Pengumpulan standar, prosedur dan kriteria teknis dan pengembangan serta pemakaian "Lap."
3. *Kegiatan Disains*: Melakukan perhitungan teknis untuk menentukan proses dan ukuran komponen, bagan unit dalam kaitannya dengan layanan lain dan antara satu layanan dengan lainnya. Disain ini akan mencantumkan:
    a. hasil dari kegiatan pengumpulanm informasi primer dan sekunder;
    b. informasi mengenai pilihan masyarakat, yang dikumpulkan melalui sruvei sosio-ekonomi, diskusi kelompok fokus, saran dari Pokja, instansi lokal yang bertanggung-jawab, instansi nasional dll.;
    c. hasil analisis dampak lingkungan dan rencana pembebasan lahan / relokasi yang disusun dalam fase FS;
    d. rencana pengembangan kapasitas; dan
    e. akan dijelaskan dalam gambaran umum dalam memorandum disain, yang akan ditambahi dengan perhitungan yang paling penting.
4. *Dokumentasi DED*: Setiap disain akan didokumentasikan dalam:
    a. satu set gambar teknis (termasuk rencana tapak proyek, bagian membujur dan menyilang untuk pekerjaan sipil, rincian disain standar dan catatan kontruksi);
    b. surat kuantitas, dengan kunatitas dan perkiraan harga kontrak untuk setiap item, jadi membentuk "Perkiraan Tekni" untuk pelaksanaan disain;
    c. spesifikasi teknis pekerjaan, jika perlu, yang memisahkan standar yang lebih baagus dan spesifikasi tertentu; dan
    d. dokumen pelelangan (tender), berdasarkan standar dan peraturan Pemerintah Indonesia, dan termasuk surat kuantitas tanpa harga dan berbagai formulir yang diminta menurut prosedur Pemerintah Indonesia.

Perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan dokumentasi lengkap dari standar, prosedur dan kriteria yang berlaku bagi saluran air limbah, karena ini akan dipakai oleh orang lain untuk mulai mengembangkan dan meningkatklan standar saluran limbah di Indonesia.

Beriringan dengan perihal diatas, pekerjaan lingkungan lanjutan akan dilakukan untuk pengelolaan (UKL) dan pemantauan (UPL) lingkungan, jika dirasa perlu. Ini bisa mencakup (i) penyusunan UKL/UPL untuk diproses oleh pemerintah daerah sebagai bagian darioproses yang diperlukan untuk mendapatkan ijin, atau (ii) penyusunan pedoman teknis, prosedur operasional standar (SOP) atau

spesifikasi teknis yang terkait dengan dokumen ini yang akan disusun oleh pelaksana kontruksi / pemasok.

Pekerjaan DED akan menyertakan saran untuk pemerintah daerah, terkait dengan berbagai macam isu, termasuk strategi dan pemaketan (internasional, lokal dll.), interpretasi standar kinerja, perjanjian yang terkait dengan penyaluran dana ke pemerintah daerah, dan bantuan melalui koordinasi dengan instansi pusat. Pekerjaan tidak mencantumkan bantuan dalam pelelangan, perundingan, pengontrakan, pelaksanaan atau fase persiapan (yang akan diberikan melalui ketentuan yang kompetitif dan kontrak terpisah).